



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2023 disusun berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan disampaikan kepada DPRD sebagai salah satu bukti akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan Atas laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan.

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang terdiri atas Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Kas dan Setara Kas;
2. Investasi Jangka Pendek;
3. Piutang Pajak dan Bukan Pajak;
4. Persediaan;
5. Investasi Jangka Panjang;
6. Aset Tetap;
7. Kewajiban Jangka Pendek;
8. Kewajiban Jangka Panjang; dan
9. Ekuitas.

Laporan Operasional merupakan laporan finansial yang menggambarkan *riil* pendapatan dan beban selama satu tahun anggaran yang mencakup.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

1. Pendapatan-LO;
2. Beban dari kegiatan operasional;
3. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional; dan
4. Pos luar biasa dan surplus defisit-LO.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut.

1. Ekuitas awal;
2. Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar; dan
4. Ekuitas akhir.

Laporan Arus Kas merupakan laporan keuangan yang menyajikan bagian dari laporan finansial yang berupa informasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode TA 2023. Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi mengenai.

1. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan;
2. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
3. Bagaimana pembiayaan seluruh kegiatan dan kecukupan Kas;
4. Posisi keuangan dan sumber-sumber penerimaan jangka pendek dan jangka panjang; dan
5. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau selama pelaksanaan APBD TA 2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2022-2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
12. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2023, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum, Perekonomian Makro Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang kondisi gambaran umum Kabupaten Pulang Pisau, perekonomian makro Kabupaten Pulang Pisau dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pulang Pisau.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memuat basis akuntansi, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing laporan keuangan yaitu penjelasan Laporan Realisasi Anggaran, penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, penjelasan Neraca yang terdiri dari penjelasan pos-pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas, penjelasan tentang Laporan Operasional (LO) yang terdiri dari Pendapatan-LO dan



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban, serta penjelasan tentang Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas.

Bab VI Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB II

GAMBARAN UMUM, PEREKONOMIAN MAKRO DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM

2.1.1 Sejarah Berdirinya Kabupaten Pulang Pisau

Pembentukan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dimulai dari terbitnya keputusan DPRD Kabupaten Kapuas Nomor 33/SK/DPRD-KPS/1999 tentang Peningkatan Status Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau dan Gunung Mas menjadi Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Gunung Mas. Bupati Kapuas kemudian menindaklanjuti keputusan DPRD Kabupaten Kapuas tersebut melalui surat Nomor 135/3477/Tapem/1999 perihal usul peningkatan status Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau dan Gunung Mas menjadi Kabupaten Pulang Pisau dan Gunung Mas kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

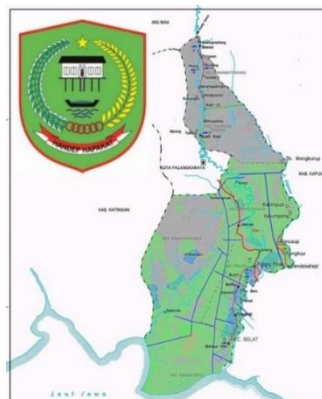
Tanggal 30 Desember 1999 Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan usul kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Otonomi Daerah I melalui surat Nomor 1356/II.Pem. perihal Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disusul dengan surat tanggal 4 September 2000 Nomor 135/17/Pem. Perihal Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota ke alamat yang sama seperti tersebut di atas.

Tanggal 11 Maret 2000 dilakukan Sidang Paripurna DPR-RI membahas Rancangan Undang-undang pembentukan 19 kabupaten dan tiga kota baru pada 10 provinsi di Indonesia, yang kemudian disusul dengan pengesahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan 8 Kabupaten Baru di Provinsi Kalimantan Tengah dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002.

Pada 16 Mei 2002, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 131.42-187 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Pulang Pisau atas nama Drs. Andris P. Nadjan. Pada 8 Juli 2002, Menteri Dalam Negeri melakukan peresmian atas pembentukan 19 kabupaten dan tiga kota di 10 provinsi di Indonesia termasuk delapan kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Pejabat Bupati di delapan kabupaten baru di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dilantik secara kolektif oleh Gubernur.

2.1.2 Kondisi Geografi, Demografi

Peta Wilayah Kabupaten Pulang Pisau





Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Kabupaten Pulang Pisau mempunyai wilayah dengan luas 9.650,86 km² atau 6,29% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah. Penggunaan lahan Kabupaten Pulang Pisau mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002.

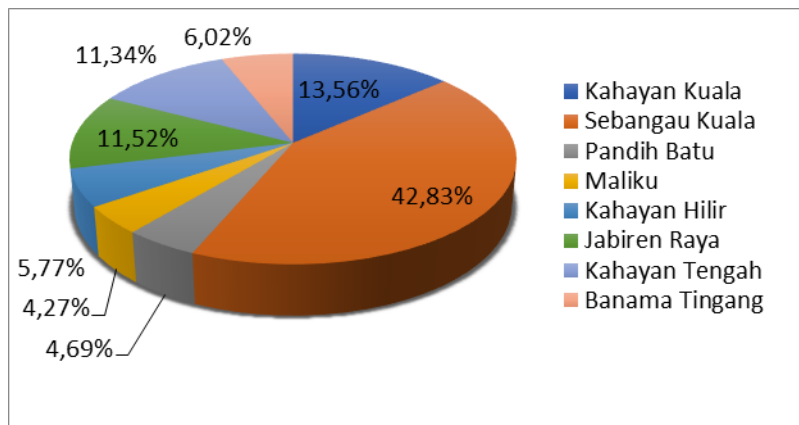
Kabupaten Pulang Pisau berada di bagian tengah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara astronomis terletak antara 113°30'00" - 114°15'00" Bujur Timur dan 1°32'00" - 3°28'00" Lintang Selatan. Kabupaten Pulang Pisau berbatasan langsung dengan Kota Palangka Raya dan Kabupaten Katingan di sebelah barat, Kabupaten Kapuas di sebelah timur dan Kabupaten Gunung Mas di sebelah utara.

Kabupaten Pulang Pisau terdiri atas delapan kecamatan yaitu Kecamatan Kahayan Hilir, Kecamatan Jabiren Raya, Kecamatan Maliku, Kecamatan Pandih Batu, Kecamatan Kahayan Kuala, Kecamatan Sebangau Kuala, Kecamatan Kahayan Tengah dan Kecamatan Banama Tingang. Kecamatan dengan luas wilayah paling luas adalah Kecamatan Sebangau Kuala dengan luas wilayah 4.133,46 km² atau 42,83% dari seluruh luas Kabupaten Pulang Pisau yaitu 9.650,86 km². Pada tabel dan gambar dibawah ini dapat dilihat luas daerah menurut kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau.

Tabel 1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1	Kahayan Kuala	1.308,83	13,56%
2	Sebangau Kuala	4.133,46	42,83%
3	Pandih Batu	452,76	4,69%
4	Maliku	411,59	4,27%
5	Kahayan Hilir	556,41	5,77%
6	Jabiren Raya	1.112,19	11,52%
7	Kahayan Tengah	1094,31	11,34%
8	Banama Tingang	581,31	6,02%
Pulang Pisau		9.650,86	100%

Proporsi Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau





Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

2.2 PEREKONOMIAN MAKRO DAERAH

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau yaitu.

- Tingkat Kemiskinan data Tahun 2023 sebesar 4,58%;
- Tingkat Pengangguran Terbuka data Tahun 2023 sebesar 2,07%;
- Gini Ratio* data Tahun 2023 sebesar 0,280%;
- Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023 sebesar 69,60%;
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2023 sebesar 4,84%;
- Tingkat Inflasi tidak terdata atau tidak ada penghitungan untuk Kab. Pulang pisau akan tetapi ada penghitungan inflasi gabungan dari Kota Palangka Raya dan Kota Sampit sebesar 0,23%; dan
- Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Tahun 2023 sebesar Rp6.995.005,64.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan, keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat persentase penduduk miskin pada Kabupaten Pulang Pisau dari Tahun 2022 s.d. 2023.

Tabel 2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pulang Pisau 2022 s.d 2023

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	4,70	4,58	(0,12)
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	6,04	5,92	(0,12)



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Naik/turun (%)
3	Provinsi (%)	5,22	5,11	(0,11)
4	Nasional (%)	9,57	9,36	(0,21)
5	Peringkat Provinsi	0,00	0,00	0,00
6	Peringkat Nasional	0,00	0,00	0,00

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pulang Pisau, BPS Provinsi Kal-Teng dan BPS Nasional (Berdasarkan Prosentase kemiskinan tertinggi)

Persentase penduduk miskin Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2022 sebesar 4,70% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin 4,58% dan diharapkan pada Tahun 2024 bisa menekan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Pulang Pisau masih di bawah provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan. Pada tabel-tabel dibawah ini dapat dilihat tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan pada Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 s.d. 2023.

Tabel 3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 s.d. 2023

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,76	0,53	(0,23)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,91	0,66	(0,25)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	0,00	0,00	0,00
4	Peringkat Provinsi	0,00	0,00	0,00
5	Peringkat Nasional	0,00	0,00	0,00

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pulang Pisau, BPS Provinsi Kal-Teng dan BPS Nasional (Berdasarkan Kedalaman Kemiskinan Terendah)

Tabel 4 Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 s.d. 2023

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kab/Kota	0,21	0,09	(0,12)
2	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi	0,27	0,14	(0,13)
3	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Nasional	0,00	0,00	0,00
4	Peringkat Provinsi	0,00	0,00	0,00
5	Peringkat Nasional	0,00	0,00	0,00

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pulang Pisau, BPS Provinsi Kal-Teng dan BPS Nasional (Berdasarkan Kedalaman Kemiskinan Terendah)

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari. (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 adalah sebesar 2,07%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 s.d. 2023

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	1,96	2,07	0,11
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,26	4,10	(0,16)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	0,00	0,00	0,00
4	Peringkat Provinsi	0,00	0,00	0,00
5	Peringkat Nasional	0,00	0,00	0,00

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pulang Pisau, BPS Prov Kal-Teng dan BPS Nasional

(Berdasarkan Pengangguran Terbuka Terendah)

TPT di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,07%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 1,96% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pulang Pisau masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 4,10%.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini (*Gini Ratio*) adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana.

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/ mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 dan 2022 sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 6 Gini Ratio Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022-2023

No	Tingkat Ketimpangan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,288	0,280	(0,008)
2	Tingkat Provinsi	0,319	0,317	(0,002)
3	Tingkat Nasional	0,381	0,388	0,007



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Tingkat Ketimpangan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
4	Peringkat Provinsi	0,00	0,00	0,00
5	Peringkat Nasional	0,00	0,00	0,00

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pulang Pisau, BPS Prov Kal-Teng dan BPS Nasional

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu.

- Rendah (< 60);
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 adalah sebesar 69,60 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 s.d. 2023

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	69,01	69,60	0,59
2	Provinsi	73,17	73,73	0,56
3	Indonesia/Nasional	73,77	74,39	0,62
4	Peringkat Provinsi	0,00	0,00	0,00
5	Peringkat Nasional	0,00	0,00	0,00

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pulang Pisau, BPS Prov Kal-Teng dan BPS Nasional

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 adalah sebesar 69,60 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 69,01 poin mengalami kenaikan sebesar 0,59 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur Harapan Hidup saat Lahir (AHH), atau dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 68,60 tahun pada Tahun 2023, lebih lama 0,24 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 8,27 tahun dengan harapan lama sekolah 12,51 tahun.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2010. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 s.d. 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 s.d. 2023

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional (triliun rupiah)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
1	PDRB harga konstan 2010 (juta rupiah)	3 596,8	3 765,0	3 947,2	113 611,5	0,00
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,24	4,68	4,84	4,14	5,05
3	Peringkat Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pulang Pisau, BPS Prov Kal-Teng dan BPS Nasional

Selama kurun waktu dari Tahun 2021 s.d. 2023 laju perekonomian Kabupaten Pulang Pisau paling rendah adalah 3,24% yang terjadi pada Tahun 2021. Pada Tahun 2023 pertumbuhan perkonomian Kabupaten Pulang Pisau meningkat menjadi sebesar 4,84% yang disebabkan bangkitnya kegiatan ekonomi di beberapa sektor lapangan usaha seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan perdagangan, jasa keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Prov/Kab/Kota dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi.

- Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*), yang ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- b. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan dengan lajunya berkisar antara 10% s.d. 30% setahun;
- c. Inflasi Berat (*High Inflation*), dalam kategori inflasi ini termasuk yang berat dengan mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- d. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau, diketahui bahwa tingkat inflasi pada Kabupaten Pulang Pisau tidak dilakukan penghitungan tersendiri. Penghitungan tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah hanya dilakukan di Kota Palangka Raya dan Kota Sampit.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Pulang Pisau

Struktur perekonomian Kabupaten Pulang Pisau dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(dalam Juta Rupiah) Tahun 2021 s.d. 2023

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.220,86	2.381,50	2.530,47
2	Pertambangan dan Penggalian	36,96	39,05	42,33
3	Industri Pengolahan	553,50	625,01	661,78
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,78	4,10	4,59
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,83	4,00	3,27
6	Konstruksi	887,62	984,37	1.053,50
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	607,08	664,88	727,86
8	Transportasi dan Pergudangan	229,68	253,98	323,50
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	179,99	196,60	218,69
10	Informasi dan Komunikasi	82,07	89,71	93,90
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	40,03	42,54	44,88
12	Real Estate	111,72	117,33	123,99
13	Jasa Perusahaan	3,82	4,08	4,62
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	335,33	339,40	379,70
15	Jasa Pendidikan	418,36	443,84	487,12
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	207,36	224,72	240,79
17	Jasa lainnya	46,70	49,54	54,10



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5.969,70	6.464,14	6.995,00
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	5.969,70	6.464,14	-
20	PDRB Provinsi	1.024,81	1.090,94	1.136,11
21	PDRB Provinsi tanpa Migas	1.015,92	1.082,21	1.127,80
22	PDRB Nasional (triliun rupiah)	1.697,00	1.757,88	1.844,80
23	Peringkat Provinsi	-	-	-
24	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pulang Pisau, BPS Prov Kal-Teng dan BPS Nasional

2.3 PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sejak Tahun 2020, dimana terbentuk 38 Perangkat Daerah dengan struktur uraian kerja sebagai berikut.

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Dinas Sosial; dan
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar terdiri atas:
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - g. Dinas Perhubungan;
 - h. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
 - i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - j. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- k. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- 3. Urusan Pilihan terdiri atas:
 - a. Dinas Perikanan;
 - b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. Dinas Pertanian; dan
 - d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 - f. Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau;
 - g. Kecamatan Kahayan Hilir;
 - h. Kecamatan Jabiren Raya;
 - i. Kecamatan Maluku;
 - j. Kecamatan Pandih Batu;
 - k. Kecamatan Kahayan Kuala;
 - l. Kecamatan Sebangau Kuala;
 - m. Kecamatan Kahayan Tengah;
 - n. Kecamatan Banama Tingang; dan
 - o. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pencapaian Kinerja Keuangan Daerah diukur berdasarkan beberapa komponen utama yaitu Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan. Pendapatan adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Sesuai Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Transfer Daerah merupakan pengurang kekayaan bersih daerah yang disebabkan karena adanya pengalihan kekayaan kepada pihak lain tanpa mengharapkan adanya imbalan maupun keuntungan dari pengalihan tersebut.

3.1. IKHTISAR REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.203.338.136.392,00 dan terealisasi sebesar Rp1.247.219.961.309,25 atau sebesar 103,65%. Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau terbagi dalam uraian berikut.

3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 dianggarkan sebesar Rp127.291.176.306,00 dan terealisasi sebesar Rp132.768.918.029,25 atau sebesar 104,30%.

3.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pada Tahun 2023, Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.024.766.433.000,00 dan terealisasi Rp1.114.451.043.280,00 atau sebesar 108,75%.

3.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan yang bersumber dari *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022. Pada Tahun 2023, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp51.280.527.086,00 dan tidak terjadi realisasi.

3.2. IKHTISAR REALISASI BELANJA DAERAH

Belanja Daerah dan Transfer Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.228.918.655.423,55 dan terealisasi sebesar Rp1.136.866.918.213,52 atau sebesar 92,51%. Belanja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 terdiri atas:



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

3.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 dianggarkan sebesar Rp823.858.894.089,55 dan terealisasi sebesar Rp758.440.948.456,27 atau sebesar 92,06%.

3.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 merupakan komponen terbesar kedua setelah Belanja Pegawai. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp401.967.949.872,00 dan terealisasi sebesar Rp376.894.517.460,25 atau sebesar 93,76%.

3.2.3. Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menganggarkan Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 sebesar Rp3.091.811.462,00 dan terealisasi sebesar Rp1.531.452.297,00 atau 49,53%, yang digunakan untuk kegiatan tanggap darurat bencana.

3.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer Kabupaten Pulang Pisau merupakan belanja yang dianggarkan dengan tujuan untuk menyalurkan dana kepada pemerintah desa. Tahun 2023 dianggarkan Rp154.482.306.300,00 dan terealisasi Rp157.266.734.900,00 atau sebesar 101,80%.

3.3. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG DITETAPKAN

Kendala dan permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam Tahun 2023 dalam pencapaian target pendapatan maupun belanja telah diuraikan sebagai berikut.

3.3.1. Hambatan dalam Pencapaian Pendapatan Asli Daerah

- Sulitnya pencapaian Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat terutama untuk membayar pajak;
- Belum terdatanya seluruh subyek, obyek, dan Wajib Pajak daerah yang ada;
- Masih terkendala dengan belum tersusunnya pedoman/sisdur *database* potensi dan tata cara merumuskan target pendapatan;
- Belum optimalnya kegiatan pendataan dan penagihan terhadap Obyek Pajak dan Wajib Pajak; dan
- Terbatasnya SDM, Sarana dan Prasarana Pemungutan, dan Jangkauan Wilayah kerja yang cukup luas serta sulit dijangkau sehingga memerlukan anggaran yang besar untuk menjangkaunya.

3.3.2. Hambatan dalam Pencapaian Target Belanja

- Realisasi Belanja Pegawai tidak tercapai, karena Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja belum bisa direalisasikan.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. PENDAHULUAN

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah menyajikan informasi yang valid dan relevan terkait posisi keuangan SKPKD, SKPD-UPTD, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang meliputi Aset dan Ekuitas dari seluruh transaksi serta kejadian (*events*) yang dilakukan dan terjadi pada entitas SKPKD dan SKPD selama satu tahun periode pelaporan. Periode akuntansi/pelaporan adalah satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 01 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.

4.1.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Pulang Pisau adalah:

1. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual;
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti Laporan Tahunan; dan
3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, tidak termasuk perusahaan daerah.

4.1.2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yaitu basis akrual.

4.2. KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah.

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari.

1. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi berupa.
 - Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
 - Neraca SKPD;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.
2. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi berupa.
 - Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
 - Neraca PPKD;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan PPKD.
3. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa.
 - Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan SAL/SAK;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Laporan Arus Kas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

1. Pendapatan LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
2. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
3. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran; dan
5. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman atau hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, atau penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

4.2.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.2.3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh Neraca terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar dan Non-Lancar. Suatu Aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai Aset Non-Lancar. Aset Non-Lancar mencakup Aset yang bersifat jangka panjang, dan Aset Tak Berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset Non-Lancar diklasifikasikan menjadi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi Jangka Panjang meliputi Investasi Non-Permanen dan Permanen. Investasi Non-Permanen antara lain Investasi dalam Surat Utang Negara, Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan, dan Investasi Non-Permanen Lainnya. Investasi Permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

Aset tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset Non-Lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Kerja Sama (kemitraan).

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas.

4.2.4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah Ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos-Pos Luar Biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-Laporan Operasional (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
2. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
3. Transfer Penerimaan atau Kewajiban Pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk Dana Perimbangan dan Bagi Hasil; dan
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

4.2.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan Kas selama satu periode akuntansi serta saldo Kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan Arus Kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama suatu periode akuntansi dan saldo Kas dan setara Kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran Kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran Kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah; dan
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran Kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

4.2.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.2.7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
7. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

4.3. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas sebagai berikut.

4.3.1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

4.3.2. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

4.3.3. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Dengan penerapan basis akrual, Aset dalam bentuk Piutang atau Beban Dibayar Dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

4.3.4. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

4.3.5. Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya Kas/Aset Non-Kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

4.3.6. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya Kewajiban atau terjadinya konsumsi Aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dilakukan bersamaan dengan pengeluaran Kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran Belanja Modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan klasifikasi Belanja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan klasifikasi belanja menurut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, maka dilakukan *mapping*/konversi dari klasifikasi belanja menurut penyusunan APBD dengan klasifikasi belanja menurut Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yang akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

4.4. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran Kas dan Setara Kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh Aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.5. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas.

4.5.1. Kemandirian Entitas

Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan Aset dan sumber daya di luar Neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan Aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

4.5.2. Kesiambungan Entitas

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

4.5.3. Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.6. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

1. Basis akuntansi;
2. Prinsip nilai perolehan;
3. Prinsip realisasi;
4. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
5. Prinsip periodisitas;
6. Prinsip konsistensi;
7. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
8. Prinsip penyajian wajar.

4.6.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan Beban dalam Laporan Operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

4.6.2. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

4.6.3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai Belanja Daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar Utang. Prinsip layak temu Biaya-Pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

4.6.4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.6.5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.

4.6.6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

4.6.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.6.8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.7. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu.

4.7.1. Materialitas

Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

4.7.2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

4.7.3. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan.

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 terbagi menjadi tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi pendapatan TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 10 Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Daerah	1.203.338.136.392,00	1.247.219.961.309,25	103,65	1.073.025.872.774,18
Jumlah	1.203.338.136.392,00	1.247.219.961.309,25	103,65	1.073.025.872.774,18

Rincian realisasi pendapatan TA 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut.

Tabel 11 Rincian Realisasi Pendapatan TA 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	127.291.176.306,00	132.768.918.029,25	104,30	128.313.204.639,10
Pendapatan Transfer	1.024.766.433.000,00	1.114.451.043.280,00	108,75	944.712.668.135,08
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	51.280.527.086,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.203.338.136.392,00	1.247.219.961.309,25	103,65	1.073.025.872.774,18

Realisasi pendapatan TA 2023 naik sebesar 16,23% atau Rp174.194.088.535,07 dari TA 2022. Peningkatan realisasi pendapatan TA 2023 disebabkan oleh:

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah terdapat peningkatan terutama pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
- Pendapatan Transfer terdapat peningkatan terutama pada Dana Insentif Daerah dan Pendapatan Bagi Hasil.

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas akun Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 12 Realisasi PAD TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	127.291.176.306,00	132.768.918.029,25	104,30	128.313.204.639,10
Jumlah	127.291.176.306,00	132.768.918.029,25	104,30	128.313.204.639,10



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp132.768.918.029,25 dan Rp128.313.204.639,10, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 13 Rincian Realisasi PAD TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pajak Daerah	104.183.453.240,00	91.320.674.278,00	87,65	85.181.880.484,10
Retribusi Daerah	3.698.087.000,00	3.905.676.024,00	105,61	2.798.277.761,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	942.536.465,00	27.049.142,65	2,87	7.017.720.761,00
Lain-lain PAD yang Sah	18.467.099.601,00	37.515.518.584,60	203,15	33.315.325.633,00
Jumlah	127.291.176.306,00	132.768.918.029,25	104,30	128.313.204.639,10

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022 berdasarkan SKPD disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 14 Rincian PAD TA 2023 dan 2022 per SKPD

No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	18.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	6.725.887.000,00	6.113.602.221,00	4.744.783.033,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	9.467.099.601,00	22.724.422.501,00	22.977.996.328,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.145.000.000,00	1.078.041.088,00	31.000.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	35.000.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	43.000.000,00	6.900.000,00	3.000.000,00
7	Dinas Perhubungan	905.500.000,00	1.009.770.020,00	929.853.500,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	200.000.000,00	376.457.216,00	607.607.168,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	48.480.000,00
10	Dinas Perikanan	38.000.000,00	33.200.000,00	1.200.000,00
11	Dinas Pertanian	17.500.000,00	10.000.000,00	6.375.000,00
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	57.500.000,00	95.361.000,00	70.744.000,00
13	Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	190.000.000,00	262.364.500,00	164.100.000,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	60.000.000,00	114.000.000,00	60.000.000,00
15	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	108.279.189.705,00	100.849.274.483,25	98.553.514.810,10
16	Sekretariat DPRD	20.000.000,00	18.000.000,00	20.100.000,00
17	Kecamatan Kahayan Hilir	35.730.000,00	29.573.000,00	36.383.000,00
18	Kecamatan Jabiren Raya	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
19	Kecamatan Maliku	10.500.000,00	4.340.000,00	14.922.800,00
20	Kecamatan Pandih Batu	10.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
21	Kecamatan Kahayan Kuala	18.270.000,00	18.262.000,00	16.220.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
22	Kecamatan Sebangau Kuala	2.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
23	Kecamatan Kahayan Tengah	3.000.000,00	1.050.000,00	875.000,00
24	Kecamatan Banama tingang	6.000.000,00	0,00	7.750.000,00
Jumlah		127.291.176.306,00	132.768.918.029,25	128.313.204.639,10

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan dengan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang menetapkan terdapat 11 jenis pajak daerah antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp91.320.674.278,00 dan Rp85.181.880.484,10 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 15 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pajak Hotel	7.000.000,00	4.200.000,00	60,00	2.400.000,00
Pajak Restoran	905.000.000,00	1.254.360.086,00	198,60	1.075.693.330,90
Pajak Hiburan	6.750.000,00	3.230.000,00	47,85	800.000,00
Pajak Reklame	45.000.000,00	43.935.084,00	97,63	42.458.510,00
Pajak Penerangan Jalan	3.700.000.000,00	4.172.317.248,00	112,77	3.852.384.124,00
Pajak Parkir	10.000.000,00	6.250.000,00	62,50	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	60.961.123,00	121,92	53.680.500,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.089.703.240,00	6.265.959.744,00	31,19	2.703.881.522,20
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.500.000.000,00	1.152.928.067,00	76,86	1.166.876.010,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	77.870.000.000,00	78.356.532.926,00	100,62	76.283.706.487,00
Jumlah	104.183.453.240,00	91.320.674.278,00	87,65	85.181.880.484,10

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 meningkat sebesar 7,21% dibandingkan TA 2022. Peningkatan terbesar terdapat pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 131,74% atau sebesar Rp3.562.078.221,80 dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.703.881.522,20.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau diatur berdasarkan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Jasa Umum terdiri



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

atas Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi Jasa Usaha mencakup retribusi atas Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah, Pemakaian Bangunan/ Gedung/ Rumah/ Dinas/ GOR/ Stadion/ Toko/ Pertokoan, Pemakaian Alat Berat, Penyiaran Radio, Pemakaian Jasa Pelayanan, dan Pemakaian Kekayaan Daerah Lainnya; dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.905.676.024,00 dan Rp2.798.277.761,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 16 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	686.887.000,00	646.702.200,00	94,15	531.743.900,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	32.000.000,00	5.400.000,00	16,88	48.480.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	45.500.000,00	85.698.520,00	188,35	48.902.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	67.500.000,00	45.525.000,00	67,44	66.333.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	50.000.000,00	90.361.000,00	180,72	61.744.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.000.000,00	326.457.216,00	163,23	557.607.168,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	264.500.000,00	308.449.500,00	116,62	410.287.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	163.200.000,00	164.400.000,00	100,74	0,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Vila	156.000.000,00	193.620.000,00	124,12	110.200.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	17.500.000,00	10.000.000,00	57,14	6.375.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	75.000.000,00	21.304.000,00	28,41	93.507.500,00
Retribusi Penyeberangan di Air	750.000.000,00	835.477.500,00	111,40	750.750.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.000.000,00	33.200.000,00	110,67	1.200.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	68.711.393,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	25.000.000,00	61.040.000,00	244,16	36.694.000,00
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan	0,00	0,00	0,00	5.742.800,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.100.000.000,00	1.078.041.088,00	98,00	0,00
Jumlah	3.698.087.000,00	3.905.676.024,00	105,61	2.798.277.761,00

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 39,57% dibandingkan TA 2022.

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari bagi laba Penyertaan Modal untuk BUMD antara lain Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, PDAM, dan Jamkrida. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA 2023 sebesar Rp27.049.142,65, dengan rincian deviden dari Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebesar Rp27.049.142,65. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada TA 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut.

Tabel 17 Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	942.536.465,00	27.049.142,65	2,87	7.017.720.761,00
Jumlah	942.536.465,00	27.049.142,65	2,87	7.017.720.761,00

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk dalam Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp37.515.518.584,60 dan Rp33.315.325.633,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 18 Rincian Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	718.058.223,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	178.737.507,00	0,00	0,00
Jasa Giro	3.000.000.000,00	3.658.533.203,75	121,95	2.429.298.888,65
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	2.066.500.327,77	0,00	1.434.194.022,87
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	1.551.433.702,08	0,00	314.676.325,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	37.597.675,00	0,00	56.616.494,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	20.400,00	0,00	61.200,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	760.866.833,00	0,00	1.169.889.451,48
Pendapatan BLUD	9.467.099.601,00	22.724.422.501,00	240,04	22.977.996.328,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	6.000.000.000,00	5.218.957.514,00	86,98	4.164.534.700,00
Remunerasi	0,00	1.268.448.921,00	0,00	0,00
Jumlah	18.467.099.601,00	37.515.518.584,60	203,15	33.315.325.633,00

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 19 Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	984.766.433.000,00	1.055.819.725.878,00	107,22	897.586.211.735,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.000.000.000,00	58.631.317.402,00	146,58	47.126.456.400,08
Jumlah	1.024.766.433.000,00	1.114.451.043.280,00	108,75	944.712.668.135,08

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 20 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Perimbangan	895.116.204.000,00	943.738.110.878,00	105,43	791.268.335.735,00
Dana Insentif Daerah (DID)	11.102.627.000,00	30.741.173.000,00	276,88	26.803.680.000,00
Dana Desa	78.547.602.000,00	81.340.442.000,00	103,56	79.514.196.000,00
Jumlah	984.766.433.000,00	1.055.819.725.878,00	107,22	897.586.211.735,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp943.738.110.878,00 dan Rp791.268.335.735,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 21 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH)	161.495.704.000,00	236.652.431.329,00	155,41	92.746.070.977,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	12.780.476.000,00	53.675.393.263,00	419,98	19.410.917.902,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	3.839.765.000,00	27.003.895.816,00	703,27	4.732.636.148,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	27.759.000,00	27.759.000,00	100,00	204.030.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	4.240.280,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	137.791.262.000,00	138.784.095.450,00	111,12	61.013.264.647,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	5.085.159.000,00	1.525.547.700,00	30,00	5.422.671.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	0,00	14.255.842.000,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.971.283.000,00	1.379.898.100,00	70,00	1.958.311.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	533.869.227.000,00	533.749.099.842,00	99,98	515.284.162.032,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	533.869.227.000,00	533.749.099.842,00	99,98	515.284.162.032,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	97.722.691.000,00	84.090.064.909,00	86,05	96.772.954.708,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	574.852.000,00	571.373.900,00	99,39	2.062.965.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.291.656.000,00	1.604.854.200,00	70,03	10.913.934.864,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.032.738.000,00	8.357.345.800,00	75,75	4.189.691.939,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	668.256.000,00	655.890.333,00	98,15	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan	0,00	0,00	0,00	3.462.763.494,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Kefarmasian				
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	15.896.846.754,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	131.542.800,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	653.545.000,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	15.686.367.000,00	15.461.383.300,00	98,57	7.284.020.200,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	21.800.821.000,00	14.493.039.750,00	66,48	10.503.800.000,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan				4.956.592.750,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	32.206.755.000,00	29.616.188.750,00	91,96	11.654.300.000,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	5.736.799.000,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	4.012.416.000,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	10.035.962.000,00	9.933.840.000,00	98,98	7.838.830.000,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	2.595.812.700,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	4.304.797.032,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	574.297.175,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	2.030.094.000,00	2.010.648.876,00	99,04	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian	927.167.000,00	921.000.000,00	99,33	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Penyakit				
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	468.023.000,00	464.500.000,00	99,25	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	102.028.582.000,00	89.246.514.798,00	87,47	86.465.148.018,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	19.953.990.000,00	18.992.941.816,00	95,18	17.813.906.693,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	925.000.000,00	922.500.000,00	99,73	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	48.374.175.000,00	48.043.590.880,00	99,32	45.726.670.420,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.633.500.000,00	866.750.000,00	53,06	980.250.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.880.277.000,00	3.584.600.400,00	92,38	3.677.994.300,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.673.850.000,00	0,00	0,00	225.700.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	290.240.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	20.405.207.000,00	14.050.114.622,00	68,86	14.602.470.755,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	400.800.000,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	438.200.000,00	294.672.600,00	67,25	191.632.050,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.592.048.000,00	2.149.190.000,00	82,91	2.017.355.800,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	451.800.000,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	543.725.000,00	183.695.280,00	33,78	376.568.000,00
DAK Non Fisik-PK2UMK	318.370.000,00	158.459.200,00	49,77	0,00
Jumlah	895.116.204.000,00	943.738.110.878,00	105,43	791.268.335.735,00

Pendapatan Dana BOS berubah menjadi bagian dari Pendapatan DAK Non Fisik dimana sebelumnya dicatat dalam pendapatan Lainnya berdasarkan pada PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, sehingga Kabupaten Pulang Pisau tidak lagi mencatat pendapatan Dana BOS pada Pendapatan Lainnya.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. DAU terbagi menjadi dua bagian yaitu DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAU Umum. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya berdasarkan PMK Nomor 212/PMK.07/2022 terdiri atas penggalan formasi PPPK, Pendanaan Kelurahan, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pekerjaan Umum. Realisasi DAU pada TA 2023 adalah sebagai berikut :



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jenis DAU yang ditentukan penggunaannya	Nilai Transfer TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Sisa (Rp)
Penggajian formasi PPPK	1.178.154.000,00	1.178.154.000,00	0,00
Pendanaan Kelurahan	800.000.000,00	789.408.600,00	10.591.400,00
Bidang Pendidikan	51.610.429.000,00	51.448.220.189,00	162.208.811,00
Bidang Kesehatan	44.385.441.000,00	43.875.389.966,00	510.051.034,00
Bidang Pekerjaan Umum	59.698.040.000,00	59.616.630.749,00	81.409.251,00
Jumlah	157.672.064.000,00	156.907.803.504,00	764.260.496,00

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 22 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Insentif Daerah (DID)	11.102.627.000,00	30.741.173.000,00	276,88	26.803.680.000,00
Dana Desa	78.547.602.000,00	81.340.442.000,00	103,56	79.514.196.000,00
Jumlah	89.650.229.000,00	112.081.615.000,00	125,02	106.317.876.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 23 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah
TA 2023 dan 2022**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Insentif Daerah (DID)	11.102.627.000,00	30.741.173.000,00	276,88	26.803.680.000,00
Jumlah	11.102.627.000,00	30.741.173.000,00	276,88	26.803.680.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Desa

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Desa TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 24 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Desa TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Desa	78.547.602.000,00	81.340.442.000,00	103,56	79.514.196.000,00
Jumlah	78.547.602.000,00	81.340.442.000,00	103,56	79.514.196.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Tengah. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 25 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil	40.000.000.000,00	58.631.317.402,00	146,58	47.126.456.400,08
Jumlah	40.000.000.000,00	58.631.317.402,00	146,58	47.126.456.400,08

Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022 masing-masing terinci sebagai berikut.

Tabel 26 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.187.002.010,00	6.881.758.103,68	132,67	5.244.045.927,98
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.622.072.819,00	8.538.018.780,21	151,87	5.893.946.202,08
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.434.727.885,00	34.948.823.717,20	163,05	26.362.355.846,73
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	33.875.665,00	146.260.485,91	431,76	31.374.870,29
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.722.321.621,00	8.116.456.315,00	105,10	9.594.733.553,00
Jumlah	40.000.000.000,00	58.631.317.402,00	146,58	47.126.456.400,08

5.1.1.2.3. Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk TA 2023 dan 2022 tidak ada target dan realisasi Bantuan Keuangan.

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk TA 2022 tidak ada realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Tahun 2023 terdapat Anggaran sebesar Rp51.280.527.086,00 yang berasal dari *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022. Realisasi Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut.

Tabel 27 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	51.280.527.086,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	51.280.527.086,00	0,00	0,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.1.2. Belanja

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dibagi menjadi tiga komponen yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 28 Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja	1.228.918.655.423,55	1.136.866.918.213,52	92,51	897.140.629.798,82
Jumlah	1.228.918.655.423,55	1.136.866.918.213,52	92,51	897.140.629.798,82

Rincian Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut.

Tabel 29 Rincian Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Operasi	823.858.894.089,55	758.440.948.456,27	92,06	676.105.646.057,18
Belanja Modal	401.967.949.872,00	376.894.517.460,25	93,76	220.244.673.498,64
Belanja Tidak Terduga	3.091.811.462,00	1.531.452.297,00	49,53	790.310.243,00
Jumlah	1.228.918.655.423,55	1.136.866.918.213,52	92,51	897.140.629.798,82

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi baik berupa uang ataupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp350.406.413.663,34 dan Rp329.683.273.923,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 30 Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023(Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	222.375.030.573,27	215.969.295.743,00	97,12	216.415.342.657,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	43.841.036.007,39	37.519.731.281,34	85,58	31.435.898.276,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	79.451.945.883,57	75.550.986.979,00	95,09	68.774.996.057,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.373.659.233,22	10.191.991.103,00	89,61	10.125.655.349,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	91.301.920,00	68.779.252,00	75,33	81.923.995,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	802.666.968,12	582.880.000,00	72,62	610.880.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran 2023(Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Pegawai BOS	0,00	7.823.513.918,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai BLUD	3.000.000.000,00	2.699.235.387,00	89,97	2.238.577.589,00
Jumlah	360.935.640.585,57	350.406.413.663,34	97,08	329.683.273.923,00

Pada Belanja Pegawai Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 terdapat Belanja Pegawai BLUD RSUD Kabupaten Pulang Pisau yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.699.235.387,00 dan pada tahun 2023 Kabupaten Pulang Pisau hanya menganggarkan Belanja Dana BOS pada akun Belanja Barang dan Jasa, akan tetapi setelah dilakukan pemilahan pada realisasi Belanja Dana BOS terdapat Belanja Pegawai yang masuk ke komponen belanja barang dan jasa, sehingga dilakukan reklasifikasi atas belanja barang dan jasa sebesar Rp7.823.513.918,00 ke kelompok akun belanja pegawai, kedepannya pemerintah Kabupaten Pulang Pisau akan menganggarkan belanja pegawai dana BOS.

Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 berdasarkan Perangkat Daerah disajikan pada **Lampiran 1**.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp378.662.524.636,93 dan Rp333.194.564.335,18 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 31 Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	155.066.465.255,62	147.944.239.689,68	95,41	104.062.418.574,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	38.820.000,00
Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	57.123.631.925,28	49.412.594.122,33	86,50	51.664.219.421,67
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.020.956.183,40	1.904.706.655,00	94,25	2.474.399.792,00
Belanja Sewa Tanah	10.500.000,00	5.100.000,00	48,57	163.880.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	623.130.000,00	427.765.000,00	68,65	413.634.134,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	191.958.000,00	122.450.000,00	63,79	129.850.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	343.688.344,00	342.287.064,00	99,59	3.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	36.194.845.630,00	34.945.978.192,48	96,55	21.291.826.780,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.200.000.000,00	957.270.000,00	79,77	229.536.700,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	17.940.000,00	17.940.000,00	100,00	8.600.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.743.153.948,00	8.038.532.951,00	91,94	4.434.115.965,00
Belanja Jasa Insentif	0,00	0,00	0,00	121.786.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah				
Belanja Pemeliharaan Tanah	3.225.000,00	0,00	0,00	465.424.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.857.885.266,00	6.020.715.838,00	87,79	5.081.220.118,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.643.107.282,00	14.415.902.480,06	98,45	4.255.142.570,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.369.902.750,00	11.339.396.863,01	99,73	29.090.279.795,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	71.754.198.022,00	57.335.285.834,00	79,91	57.253.386.121,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	160.022.200,00	147.756.000,00	92,33	1.267.000.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.869.111.321,20	1.833.485.860,00	98,09	4.995.461.540,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	20.878.990.000,00	9.527.216.467,37	45,63	16.277.700.008,51
Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Baran dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	11.066.543.903,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	38.812.227.376,48	22.857.357.717,00	58,89	29.472.862.816,00
Jumlah	427.884.938.503,98	378.662.524.636,93	88,50	333.194.564.335,18

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2023 berdasarkan SKPD dilihat pada **Lampiran 2**.

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah. Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 32 Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Hibah	35.038.315.000,00	29.372.010.156,00	83,83	12.811.867.799,00
Jumlah	35.038.315.000,00	29.372.010.156,00	83,83	12.811.867.799,00

Rincian Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 33 Rincian Rincian Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	224.000.000,00	9.330.000.000,00	4165,18	0,00
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	11.330.000.000,00	0,00	0,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.359.990.000,00	17.140.703.127,00	98,74	11.597.500.770,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.919.090.000,00	780.000.000,00	19,90	295.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	715.000.000,00	715.000.000,00	100,00	400.000.000,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	950.000.000,00	886.940.000,00	93,36	0,00
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	540.235.000,00	519.367.029,00	96,14	519.367.029,00
Jumlah	35.038.315.000,00	29.372.010.156,00	83,83	12.811.867.799,00

Daftar penerima realisasi Belanja Hibah tersaji pada **Lampiran 3**.

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 34 Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal	401.967.949.872,00	376.894.517.460,25	93,76	220.244.673.498,64
Jumlah	401.967.949.872,00	376.894.517.460,25	93,76	220.244.673.498,64

Rincian Belanja Modal TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 35 Rincian Belanja Modal TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Tanah	558.765.000,00	199.500.000,00	35,70	646.810.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.799.798.997,50	33.351.898.507,56	101,68	28.676.649.006,19
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.886.366.566,00	108.424.624.137,36	96,05	73.112.943.643,72
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	255.678.809.308,50	234.881.455.815,33	91,87	117.448.436.859,73
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	44.210.000,00	37.039.000,00	83,78	359.833.989,00
Jumlah	401.967.949.872,00	376.894.517.460,25	93,76	220.244.673.498,64

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 36 Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Tanah	558.765.000,00	199.500.000,00	35,70	646.810.000,00
Jumlah	558.765.000,00	199.500.000,00	35,70	646.810.000,00

Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 37 Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Tanah Persil	550.000.000,00	199.500.000,00	36,27	0,00
Belanja Modal Lapangan	8.765.000,00	0,00	0,00	646.810.000,00
Jumlah	558.765.000,00	199.500.000,00	35,70	646.810.000,00

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022 berdasarkan Perangkat Daerah masing-masing sebagai berikut.

Tabel 38 Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022 per SKPD

No	Perangkat Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	350.000.000,00	0,00	0,00	646.810.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	200.000.000,00	199.500.000,00	99,75	0,00
3	Sekretariat Daerah	8.765.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		558.765.000,00	199.500.000,00	35,70	646.810.000,00

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 39 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.799.798.997,50	33.351.898.507,56	101,68	28.676.649.006,19
Jumlah	32.799.798.997,50	33.351.898.507,56	101,68	28.676.649.006,19

Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 40 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Alat Bantu	728.153.400,00	723.138.700,00	99,31	73.993.200,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7.572.491.790,40	7.342.075.523,00	96,96	4.813.141.012,75
Belanja Modal Alat Angkutan	41.537.200,00	41.514.000,00	99,94	179.709.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Apung Bermotor				
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	29.213.360,00	28.105.200,00	96,21	9.261.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur	66.436.937,00	62.910.000,00	94,69	87.253.320,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	503.973.900,00	499.718.300,00	99,16	108.140.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	1.398.568.692,00	4.026.685.717,00	287,91	2.346.612.104,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.788.629.165,00	7.500.826.908,56	96,30	4.187.253.305,44
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	329.149.300,00	298.346.718,00	90,64	510.998.430,00
Belanja Modal Alat Studio	672.458.100,00	661.101.970,00	98,31	357.950.518,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	228.700.350,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	3.468.231.308,00	2.403.136.533,00	69,29	8.578.735.607,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.542.979.565,00	2.494.995.999,00	98,11	50.555.000,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	322.829.700,00	313.672.800,00	97,16	1.510.380.928,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	212.080.600,00	208.733.400,00	98,42	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	83.360.000,00	83.205.000,00	99,81	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	1.625.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	150.000.000,00	149.406.000,00	99,60	499.278.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	5.132.678.920,10	4.885.242.819,00	95,18	2.640.735.431,00
Belanja Modal Peralatan	1.205.188.860,00	1.083.940.820,00	89,94	563.460.950,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Komputer				
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	17.358.200,00	11.419.000,00	65,78	179.210.450,00
Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00
Belanja Modal Sumur	400.000.000,00	399.650.000,00	99,91	0,00
Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	14.440.400,00
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	79.980.000,00	79.880.000,00	99,87	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	54.500.000,00	54.193.100,00	99,44	14.940.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	80.400.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	32.799.798.997,50	33.351.898.507,56	101,68	28.676.649.006,19

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022 berdasarkan SKPD disajikan di **Lampiran 4**

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut.

Tabel 41 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.886.366.566,00	108.424.624.137,36	96,05	73.112.943.643,72
Jumlah	112.886.366.566,00	108.424.624.137,36	96,05	73.112.943.643,72

Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 42 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	103.471.241.566,00	99.024.546.137,36	95,70	66.268.389.207,72
Belanja Modal Bangunan Gedung	2.130.125.000,00	2.127.428.000,00	99,87	3.727.263.046,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Tempat Tinggal				
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	7.285.000.000,00	7.272.650.000,00	99,83	3.117.291.390,00
Jumlah	112.886.366.566,00	108.424.624.137,36	96,05	73.112.943.643,72

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022 berdasarkan SKPD disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 43 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022 per SKPD

No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	8.470.248.937,00	8.405.805.000,00	14.560.650.000,00
2	Dinas Kesehatan	2.432.406.895,00	2.403.483.000,00	6.647.286.620,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	34.330.000.000,00	34.259.900.600,00	27.398.690.053,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59.739.660.000,00	55.511.090.561,60	15.534.865.480,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	500.000.000,00	493.500.000,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	228.696.614,00	228.347.332,00	0,00
7	Dinas Sosial	175.009.760,00	174.553.507,00	0,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	795.000.000,00	792.906.000,00	799.569.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	499.845.360,00	497.600.000,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	171.322.100,00	170.500.000,00	1.599.099.700,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	485.700.000,00	484.699.604,91	159.694.000,00
13	Dinas Perhubungan	2.490.000,00	0,00	152.587.000,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	41.922.000,00
16	Dinas Perikanan	0,00	0,00	510.420.000,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	51.051.000,00	50.750.000,00	131.300.000,00
18	Dinas Pertanian	3.485.754.000,00	3.468.274.000,00	582.298.000,00
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	79.945.600,00	79.488.934,00	791.216.044,72
20	Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	161.220.000,00	159.548.000,00	1.734.704.046,00
21	Inspektorat	1.000.800.000,00	990.061.097,85	1.444.808.500,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	0,00	0,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	Pengembangan			
23	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22.700.000,00	0,00	163.850.000,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	112.000.000,00	111.766.500,00	0,00
25	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	450.550.000,00
26	Kecamatan Banama Tingang	48.042.700,00	48.000.000,00	0,00
27	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	94.473.600,00	94.350.000,00	409.433.200,00
Jumlah		112.886.366.566,00	108.424.624.137,36	73.112.943.643,72

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut.

Tabel 44 Realisasi Belanja Modal Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	255.678.809.308,50	234.881.455.815,33	91,87	117.448.436.859,73
Jumlah	255.678.809.308,50	234.881.455.815,33	91,87	117.448.436.859,73

Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 45 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Jalan	160.051.212.450,50	141.075.089.684,79	88,14	82.185.159.897,73
Belanja Modal Jembatan	13.540.500.000,00	12.793.683.380,54	94,48	941.800.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.000.000.000,00	997.967.000,00	99,80	0,00
Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	73.552.712.000,00	72.535.569.000,00	98,62	29.684.923.412,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	472.500.000,00	471.250.000,00	99,74	0,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	360.000.000,00	359.418.000,00	99,84	235.600.000,00
Belanja Modal Bangunan Air	200.000.000,00	199.578.000,00	99,79	1.035.686.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Kotor				
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	16.650.108,00	16.645.000,00	99,97	0,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	127.762.500,00	120.800.000,00	94,55	0,00
Belanja Modal Instalasi Gas	400.000.000,00	398.379.000,00	99,59	0,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	5.832.472.250,00	5.788.312.750,00	99,24	3.365.267.550,00
Belanja Modal Jaringan Telepon	125.000.000,00	124.764.000,00	99,81	0,00
Jumlah	255.678.809.308,50	234.881.455.815,33	91,87	117.448.436.859,73

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022 berdasarkan SKPD disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 46 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022

No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	7.700.000,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	3.865.000.000,00	3.853.011.850,00	1.187.539.800,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	221.135.696.700,50	202.180.000.571,00	111.559.224.909,73
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	30.654.700.000,00	28.831.798.394,33	3.908.195.000,00
7	Dinas Perikanan	0,00	0,00	597.088.150,00
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pertanian	16.650.108,00	16.645.000,00	188.689.000,00
10	Sekretariat Daerah	6.762.500,00	0,00	0,00
Jumlah		255.678.809.308,50	234.881.455.815,33	117.448.436.859,73

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 47 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	44.210.000,00	37.039.000,00	83,78	359.833.989,00
Jumlah	44.210.000,00	37.039.000,00	83,78	359.833.989,00

Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut.

Tabel 48 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	32.000.000,00	26.639.000,00	83,25	359.833.989,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	12.210.000,00	10.400.000,00	85,18	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Olah Raga Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	44.210.000,00	37.039.000,00	83,78	359.833.989,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022 berdasarkan SKPD disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 49 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD TA 2023 dan 2022

No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	-	-	331.973.989,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32.000.000,00	26.639.000,00	27.860.000,00
4	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12.210.000,00	10.400.000,00	-
Jumlah		44.210.000,00	37.039.000,00	115.842.100,00

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 merupakan belanja yang digunakan untuk penanganan dan penanggulangan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut.

Tabel 50 Realisasi Tidak Terduga TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Tidak Terduga	3.091.811.462,00	1.531.452.297,00	49,53	790.310.243,00
Jumlah	3.091.811.462,00	1.531.452.297,00	49,53	790.310.243,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rincian Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

5.1.3. Transfer

Transfer Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau meliputi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Transfer Bantuan Keuangan Lainnya. Realisasi Transfer TA 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut.

Tabel 51 Realisasi Belanja Transfer TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Transfer	154.482.306.300,00	157.266.734.900,00	101,80	141.053.546.800,00
Jumlah	154.482.306.300,00	157.266.734.900,00	101,80	141.053.546.800,00

Rincian Realisasi Transfer TA 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut.

Tabel 52 Rincian Realisasi Transfer TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Bagi Hasil	638.000.000,00	638.000.000,00	100,00	638.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	153.844.306.300,00	156.628.734.900,00	101,81	140.415.546.800,00
Jumlah	154.482.306.300,00	157.266.734.900,00	101,80	141.053.546.800,00

5.1.3.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebagai berikut.

Tabel 53 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Bagi Hasil	638.000.000,00	638.000.000,00	100,00	638.000.000,00
Jumlah	638.000.000,00	638.000.000,00	100,00	638.000.000,00

5.1.3.2. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut.

Tabel 54 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan	153.844.306.300,00	156.628.734.900,00	101,81	140.415.546.800,00
Jumlah	153.844.306.300,00	156.628.734.900,00	101,81	140.415.546.800,00

Rincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut.

Tabel 55 Realisasi Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023(Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	730.000.000,00	730.000.000,00	100,00	245.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	5.030.211.400,00	5.021.800.000,00	99,83	2.935.738.400,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran 2023(Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi				
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	148.084.094.900,00	150.876.934.900,00	101,89	137.234.808.400,00
Jumlah	153.844.306.300,00	156.628.734.900,00	101,81	140.415.546.800,00

5.1.3.2.1. Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi TA 2023 terealisasi sebesar Rp730.000.000,00 berupa Pendanaan Bersama Penyewaan Transponder Satelit Tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp490.000.000,00 serta Pembayaran Rejuvenasi/Revitalisasi/Renovasi Anjungan Prov. Kalteng di TMII Tahun 2022 sebesar Rp240.000.000,00, sedangkan untuk Tahun 2022 Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi terealisasi sebesar Rp245.000.000,00.

5.1.3.2.2. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya TA 2023 terealisasi sebesar Rp5.021.800.000,00 dan Rp2.935.738.400,00 untuk TA 2022 berupa premi askes untuk masyarakat.

5.1.3.2.3. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2023 terealisasi sebesar Rp150.876.934.900,00 dan Rp137.234.808.400,00 untuk TA 2022. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terdiri dari yaitu.

Tabel 56 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten kepada Desa (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa)	148.084.094.900,00	150.876.934.900,00	0,00
Bantuan Keuangan Kepada Desa (insentif Damang, Martir, Tunjangan Kehormatan LPMK, dll)	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	25.789.108.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	111.445.700.400,00
Jumlah	148.084.094.900,00	150.876.934.900,00	137.234.808.400,00

5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 57 Realisasi Pembiayaan TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	186.062.825.331,55	186.042.825.331,55	99,99	153.231.129.156,19



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00	83,33	2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	180.062.825.331,55	181.042.825.331,55	100,54	151.231.129.156,19

Penerimaan Pembiayaan merupakan SiLPA Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 yang dianggarkan pada TA 2023 sebesar Rp186.062.825.331,55 dan terealisasi sebesar Rp186.042.825.331,55 yang terdiri atas:

- Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp150.735.724.490,07;
- Kas Bendahara BLUD 2022 sebesar Rp35.208.672.851,46;
- Kas Bendahara JKN sebesar Rp2.675.062,65; dan
- Kas Bendahara BOS sebesar Rp95.752.927,37.

Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 berupa penanaman modal BUMD pada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp4.000.000.000,00.

5.1.5. SILPA

SiLPA Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 sebesar Rp134.129.133.527,28 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 58 Realisasi SILPA TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah (Bank Pembangunan Kalteng Cabang Pulang Pisau)	56.516.034.966,17	85.409.654.649,06
Kas di Kas Daerah (Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Pulang Pisau)	35.102.900.424,31	59.576.221.573,94
Kas di Kas Daerah (PT Bank Mandiri Persero Cabang Kuala Kapuas)	8.419.717.150,00	287.974.013,07
Kas di Kas Daerah (BNI Capem Pulang Pisau)	360.929.888,02	5.461.874.254,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	46.675.091,00	20.000.000
Kas JKN	60.211.155,32	2.675.062,65
Kas BOS	938.303,00	95.752.927,37
Kas BLUD	32.194.425.645,46	35.208.672.851,46
Kas Prolanis	15.863.807,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	1.411.437.097,00	0,00
Total	134.129.133.527,28	186.062.825.331,55

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Periode tanggal 31 Desember 2023 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 59 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	186.062.825.331,55	153.231.129.156,20
Penggunaan SAL	186.062.825.331,55	153.231.129.156,20
Sub Total	0,00	0,00
Sisa Lebih/(kurang) Pembiayaan Anggaran	134.129.133.527,28	186.062.825.331,55
Saldo Anggaran Lebih Akhir	134.129.133.527,28	186.062.825.331,55

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih (Awal)

Saldo Anggaran Lebih (awal) merupakan SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu. Saldo Anggaran Lebih (awal) untuk periode tahun sebelumnya yang berakhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp186.062.825.331,55.

5.2.2. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)

Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan selisih antara Surplus/Defisit anggaran dengan pembiayaan netto. SiLPA untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2023 dan tanggal 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp134.129.133.527,28 dan Rp186.062.825.331,55 turun sebesar Rp51.933.691.804,27.

5.2.3. Saldo Anggaran Lebih (Akhir)

Saldo Anggaran Lebih (akhir) merupakan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. SiLPA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp134.129.133.527,28 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 60 Rincian Saldo Anggaran Lebih (Akhir) TA 2023

Uraian	TA 2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah – Bank BPK	56.516.034.966,17
Kas di Kas Daerah – Bank BRI	35.102.900.424,31
Kas di Kas Daerah - Bank Mandiri	360.929.888,02
Kas di Kas Daerah – BNI	8.419.717.150,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	46.675.091,00
Kas JKN	60.211.155,32
Kas BOS	938.303,00
Kas BLUD	32.194.425.645,46
Kas Dana BOK Puskesmas	1.411.437.097,00
Kas Dana Prolanis	15.863.807,00
Total	134.129.133.527,28

Terdapat selisih pengujian Prosedur Analitis sebesar Rp20.000.000,00 dimana itu terjadi karena adanya Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2022 pada Puskesmas



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Sebangau yang kemudian disetorkan tahun 2023 yang dicatat pada Lain-lain PAD yang sah, sehingga tidak lagi dicatat ke SILPA pada akun pembiayaan sebagaimana ditunjukkan pada hasil berikut.

Uraian	Audited
Penggunaan SILPA (LRA) = SAL Awal (LP SAL) – Koreksi SILPA atau SIKPA (LP SAL) - Lain-Lain (LP SAL)	
Penggunaan SILPA - Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (LRA)	186.042.825.331,55
SAL Awal Tahun Berjalan (LP SAL)	186.062.825.331,55
Koreksi SILPA atau SIKPA Tahun Berjalan (LP SAL)	-
Lain-Lain Tahun Berjalan (LP SAL)	-
Selisih	(20.000.000,00)

5.3. NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada tanggal 31 Desember 2023 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2022. Neraca Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 terdiri atas komponen Aset sebesar Rp2.272.970.477.372,86 kemudian Kewajiban sebesar Rp14.518.712.285,90 serta Ekuitas sebesar Rp2.258.451.765.086,96.

Tabel 61 Aset, Kewajiban dan Ekuitas TA 2022 dan 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Aset	2.272.970.477.372,86	2.321.494.831.352,80	(2,09)	(48.524.353.979,94)
Kewajiban	14.518.712.285,90	10.049.069.017,24	44,48	4.469.643.268,66
Ekuitas	2.258.451.765.086,96	2.311.445.762.335,56	(2,29)	(52.993.997.248,60)

5.3.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2023 memiliki aset sebesar Rp2.272.970.477.372,86 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.321.494.831.352,80.

Tabel 62 Rincian Aset TA 2022 dan 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Aset Lancar	158.546.572.725,38	326.996.453.095,04	(51,51)	(168.449.880.369,66)
Investasi Jangka Panjang	41.358.358.789,21	38.728.667.471,21	6,79	2.629.691.318,00
Aset Tetap	1.847.787.533.967,26	1.887.960.047.315,87	(2,13)	(40.172.513.348,61)
Aset Lainnya	225.278.011.891,01	67.809.663.470,68	232,22	157.468.348.420,33
Jumlah	2.272.970.477.372,86	2.321.494.831.352,80	(2,09)	(48.524.353.979,94)



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah Aset yang diklasifikasikan diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal pelaporan serta berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari Kas, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan.

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mencatat Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp158.546.572.725,38 turun sebesar Rp168.449.880.369,66 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp326.996.453.095,04 yang disebabkan oleh kenaikan nilai kas dan Persediaan.

Tabel 63 Rincian Aset Lancar TA 2022 dan 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Kas	134.199.484.428,28	186.137.740.178,55	(27,90)	(51.938.255.750,27)
Piutang	21.141.062.902,88	82.791.975.702,77	(74,46)	(61.650.912.799,89)
Penyisihan piutang	(8.064.543.050,55)	(14.002.947.787,25)	(42,41)	(5.938.404.736,70)
Persediaan	11.270.568.444,77	72.069.685.000,97	(84,36)	(60.799.116.556,20)
Jumlah	158.546.572.725,38	326.996.453.095,04	(51,51)	(168.449.880.369,66)

5.3.1.1.1. Kas

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), Bendahara Pengeluaran pada SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Dana BOS di sekolah-sekolah dan Bendahara Dana JKN, baik berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank, yang seluruhnya merupakan Kas Daerah.

Tabel 64 Rincian Kas TA 2022 dan 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Kas di Kas Daerah	100.399.582.428,50	150.735.724.490,07	(33,39)	(50.336.142.061,57)
Kas di Bendaharan Pengeluaran	46.675.091,00	20.000.000,00	133,38	26.675.091,00
Kas di BLUD	32.194.425.645,46	35.208.672.851,46	(8,56)	(3.014.247.206,00)
Kas Dana JKN	60.211.155,32	2.675.062,65	2.150,83	57.536.092,67
Kas Dana BOS	938.303,00	95.752.927,37	(99,02)	(94.814.624,37)
Kas Lainnya	70.350.901,00	74.914.847,00	(6,09)	(4.563.946,00)
Kas Dana BOK	1.411.437.097,00			1.411.437.097,00
Kas Dana Prolanis	15.863.807,00			15.863.807,00
Jumlah	134.199.484.428,28	186.137.740.178,55	(27,90)	(51.938.255.750,27)



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Tabel 65 Kas Daerah TA 2022 dan 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Kas di Kas Daerah	100.399.582.428,50	150.735.724.490,07	(33,39)	(50.336.142.061,57)

Saldo Kas Daerah merupakan Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp100.399.582.428,50 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp150.735.724.490,07 yang disimpan pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, Bank Rakyat Indonesia cabang Pulang Pisau, Bank Mandiri cabang Kapuas, dan Bank BNI cabang Pulang Pisau dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 66 Rincian Kas Daerah TA 2022 dan 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Bank Pembangunan Kalimantan Tengah No. Rekening 601-001-000000003-3	56.516.034.966,17	85.409.654.649,06	(33,83)	(28.893.619.682,89)
Rekening Bank Nasional Indonesia	8.419.717.150,00	59.576.221.573,94	(85,87)	(51.156.504.423,94)
Rekening Bank Mandiri Cabang Kuala Kapuas Nomor Rekening 159-00-0182496-9	360.929.888,02	287.974.013,07	25,33	72.955.874,95
Rekening Bank Rakyat Indonesia Cabang Pulang Pisau Nomor rek. 360501000265304	35.102.900.424,31	5.461.874.254,00	542,69	29.641.026.170,31
Jumlah	100.399.582.428,50	150.735.724.490,07	(33,39)	(50.336.142.061,57)

Terdapat perbedaan dalam rekening koran pada Kas Daerah yang tersimpan dalam Bank Rakyat Indonesia, dimana saldo Kas Rekening Koran pada Bank Rakyat Indonesia adalah sebesar Rp35.104.373.985,31 sedangkan saldo Kas Daerah yang seharusnya adalah sebesar Rp35.102.900.424,31 dimana terdapat selisih sebesar Rp1.473.561,00 yang dirinci sebagai berikut.

**Tabel 67 Rincian Selisih Kas Daerah di Bank BRI dan RKUD
per 31 Desember 2023**

No.	Tanggal	Uraian	Nomor	FMIS/SP2D	Rek. Koran	Selisih	Catatan
1	24/11/2023		06568/SP2D/2023	-	2,00	2,00	Bank BRI kelebihan pencairan senilai Rp.2 (terdebet 2 kali SP2D Nomor 06568/SP2D/2023)



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Tanggal	Uraian	Nomor	FMIS/SP2D	Rek. Koran	Selisih	Catatan
2	19/12/2023	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Ub Oktober s/d Desember Desa Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 sesuai dengan SK Bupati Pulang Pisau Nomor 176 Tahun 2023	07627/SP2D/2023	145.827.086,00	145.627.086,00	(200.000,00)	Kekurangan Pencairan
3	19/12/2023	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Ub. Oktober s/d Desember Desa Wono Agung Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau TA. 2023 sesuai dengan SK Bupati Pulang Pisau Nomor 176 Tahun 2023	07596/SP2D/2023	155.411.086,00	155.411.088,00	2,00	Kelebihan Pencairan
4	30/12/2023	Pembayaran LS. 100 % Pekerjaan Pengawasan Rehab Bangunan PSC 119 sesuai SPK No. 102/Kontrak/Dinkes-PP/X/2023 tgl. 23 Oktober 2023, Berita Acara Pembayaran No.104/BAP/Keu-Kes/XII.2023 tgl.13 Desember 2023 (Dana : DAU 2023)	09037/SP2D/2023	8.941.464,00	8.941.864,00	400,00	Kelebihan Pencairan
			PPh	324.302,00	324.302,00		
			PPN	1.019.234,00	1.019.234,00		
			JUMLAH	10.285.000,00	10.285.400,00		
5	30/12/2023	Pembayaran Termin 90% Atas Lanjutan Rehabilitasi Saluran/Handel Sei Juran Kec. Jabiren Raya, Kontrak No. 600/184/DPUPR-SDA/SPK/X/2023 Tgl. 20 Oktober 2023, BA. Pembayaran No. 900/587/DPUPR-SDA/XII/2023 Tgl. 27 Desember 2023	09136/SP2D/2023	714.649.256,00	714.649.255,00	(1,00)	Kekurangan Pencairan
			PPh	12.729.122,00	12.729.122,00		
			PPN	80.011.622,00	80.011.622,00		
			JUMLAH	807.390.000,00	807.389.999,00		
6	31/12/2023	Pembayaran 100% Pekerjaan Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan menuju Sambo Desa Hanjak Maju, Kontrak No. 600/562/DPUPR-BM/PL/SPK/XI/2023 tgl. 01 Nopember 2023, BA. Pembayaran No. 900/367/DPUPR-BM/XII/2023 Tgl. 14 Desember 2023	09149/SP2D/2023	2.603.761,00	2.603.761,00	(296.802,00)	Kekurangan Pencairan, karena terdapat potongan yang tidak dicairkan
			PPh	94.437,00	94.437,00		
			PPN	296.802,00	-		
			JUMLAH	2.995.000,00	2.698.198,00		
7	31/12/2023	Pembayaran 100% atas pekerjaan Pengawasan Teknis Lanjutan Pembangunan TPA Al Khair Desa Dandang Kec Pandih Batu berdasarkan kontrak no 600/179/SPK-	09166/SP2D/2023	8.624.144,00	8.624.144,00	(983.063,00)	Kekurangan Pencairan, karena terdapat potongan yang tidak dicairkan
			PPh	312.793,00	312.793,00		



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Tanggal	Uraian	Nomor	FMIS/SP2D	Rek. Koran	Selisih	Catatan
		KONS/WAS-DPUPR.CK/IX/2023 tgl 04 September 2023, BA Pembayaran no 900/911/DPUPR-CK/XII/2023 tgl 13 Dese	PPN	983.063,00	-		
			JUMLAH	9.920.000,00	8.936.937,00		
8	31/12/2023	Pembayaran Tahap III 100% Pekerjaan Pembangunan JPP (DAK) di Desa Kantan Dalam, Kec. Pandih Batu, Berdasarkan Kontrak No:520/137/Swakelola-DAKF/Distan/VII/2023, tgl 17/07/2023, BA. Pembayaran. No:901/406/BAP-Distan/XII/2023 tgl 19/12/2023.	09002/SP2D/2023	86.756.756,00	86.759.756,00	3.000,00	Kelebihan Pencairan
			PPh	3.243.244,00	3.243.244,00		
			JUMLAH	90.000.000,00	90.003.000,00		
9	31/12/2023	Pembayaran 100% atas Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sumur Bor Desa Bukit Liti Kec.Kahayan Hilir, SPK No:600/101/KTR-FSK/PSU/DISPERKIMTAN/XI/2023 Tgl:1 Nov 2023, BAP No:900/208/BAP-FSK/DISPERKIMTAN/XII/2023 Tgl:19 Des 2023	09207/SP2D/2023	80.812.768,03	80.815.668,03	2.900,00	Kelebihan Pencairan
			PPh	1.439.413,00	1.439.413,00		
			PPN	9.047.740,00	9.047.740,00		
			JUMLAH	91.299.921,03	91.302.821,03		
10	31/12/2023	Pembay.100% Pening.Jl.Ling. Cor Beton Jl.Jalur 5 Karya Bakti Desa Talio Hulu Kec.Pandih Batu, SPK No:600/72/KTR-FSK/PSU/DISPERKIMTAN/IX/2023 Tgl:06 Sept 2023, BA No:900/211/BAP-FSK/DISPERKIMTAN/XII/2023 Tgl: 18 Des 2023	09045/SP2D/2023	112.697.758,25	112.697.759,25	1,00	Kelebihan Pencairan
			PPh	2.007.339,00	2.007.339,00		
			PPN	12.617.561,00	12.617.561,00		
			JUMLAH	127.322.658,25	127.322.659,25		
Jumlah Kelebihan Pencairan						6.305,00	
Jumlah Kekurangan Pencairan						-	
Jumlah Akhir Selisih per 31 Desember 2023						(1.473.561,00)	Total Kekurangan Pencairan oleh Bank BRI sebesar -Rp1.473.561,00

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Bendahara Umum daerah dalam melakukan penertipan selisih kas diatas yaitu dengan menegur secara tertulis Bank Rakyat Indonesia, dan juga mengkoordinir pengembalian atas kelebihan pencairan dan melakukan transfer untuk kekurangan pencairan.

Dalam upaya untuk melakukan transparansi pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 berikut ini tersaji rincian SILPA Kabupaten Pisau:



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 68 Rincian SILPA per 31 Desember 2023

Uraian	JUMLAH	
SILPA KAS Daerah		100.399.582.428,50
Dana Bagi Hasil Sawit 2023		14.255.842.000,00
DAK FISIK		
DAK Pendidikan	11.994.533,00	
DAK Kesehatan	-	
DAK Jalan	3.895.178.500,00	
DAK Irigasi	90.385.500,00	
DAK Kelautan Perikanan	134.436.300,00	
DAK Air Minum	50.239.000,00	
DAK Sanitasi	55.334.000,00	
DAK Pangan	69.000.000,00	
DAK Pertanian	2.913.699.230,00	
Total SILPA DAK Fisik		7.220.267.063,00
DAK NON FISIK		
SISA Profesi 2023	1.800.913.200,00	
Sisa tunjangan khusus guru 2023	64.156.486,00	
SILPA Tambahan Penghasilan Guru	67.250.000,00	
SILPA DAK BOP PAUD 2022		
SILPA DAK KEPENDUDUKAN	21.923.032,00	
SILPA DAK BOK KB	329.645.700,00	
SILPA DAK BOK (Kesehatan)	-	
SILPA DAK BOK Pariwisata	430.000,00	
PK2UKM	3.118.800,00	
PPA	-	
FPM	-	
KPP *	436.320,00	
BOP-Kesetaraan		
TOTAL SILPA DAK NON FISIK		2.287.873.538,00
Hutang 2023		14.518.712.285,90
Hutang Non Kapitasi		651.870.000,00
Sisa SILPA		61.465.017.541,60

5.3.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan Pada per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

5.3.1.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas Bendahara Pengeluaran tahun 2023 terdapat pada Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp46.675.091,00. Atas sisa kas di bendahara pengeluaran tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat telah melakukan penyetoran ke rekening Kas Daerah pada tanggal 7 Mei 2024 senilai Rp46.675.091,00.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Terdapat kejadian yang terkait dengan Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dimana terdapat SP2D LS Nomor 08734/SP2D/2023 “Pembayaran Jasa Penetapan TIM Perencanaan, Pengawasan administrasi dan Teknis Swakelola Pembangunan Jln Produksi Perkebunan dan Pembangunan UPH Komoditi Perkebunan (DAK Fisik), No:525/211/SK/Distan/III/2023, tgl 31/03/2023, An. Septianto Afandy, S.T, dkk” sebesar Rp67.500.000,00 yang dikirim ke rekening Bendahara Pengeluaran, kemudian bendahara pengeluaran mentransfer ke rekening penerima, akan tetapi terjadi kegagalan dalam proses transfer tersebut sehingga uang tersebut kembali lagi ke rekening Kas Bendahara Pengeluaran tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp30.141.000,00 yang kemudian pada tanggal 4 Januari 2024 ditransfer lagi oleh Bendahara Pengeluaran ke rekening penerima.

5.3.1.1.4. Kas BLUD

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau membentuk BLUD berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 334 Tahun 2017 tentang Penerapan Pola Pengelolaan BUD pada RSUD Pulang Pisau yang berlaku efektif sejak Januari 2017. Kas BLUD RSUD Kab. Pulang Pisau TA 2023 sebesar Rp32.194.425.645,46, sedangkan TA 2022 sebesar Rp35.208.672.851,46 yang tersimpan dalam rekening nomor 6010102000879 an Bendahara Penerimaan BLUD.

Tabel 69 Kas BLUD TA 2022 dan 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Kas di BLUD (rekening Bank Kalimantan Tengah Nomor 6010102000879)	32.194.425.645,46	35.208.672.851,46	(8,56)	(3.014.247.206,00)

Dari tabel di atas mutasi saldo kas BLUD tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 70 Perhitungan Kas BLUD per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)
Saldo Awal Kas BLUD	35.208.672.851,46
Pendapatan BLUD	22.724.422.501,00
Belanja BLUD	25.738.669.707,00
Saldo Akhir Kas BLUD	32.194.425.645,46

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

5.3.1.1.5. Kas Dana JKN

Kas di Bendahara Kapitasi JKN per 31 Desember 2023 sebesar Rp60.211.155,32 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.675.062,65. Saldo Kas di Bendahara Kapitasi JKN terdapat pada 12 Puskesmas di seluruh Kabupaten Pulang Pisau, dengan rincian sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 71 Kas JKN di Puskesmas TA 2022 dan 2023

Uraian	No Rekening (Bank Kalteng)	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Puskesmas Bahaur Hilir	601012000702	19.228.208,40	172.171,40
Puskesmas Bahaur Tengah	601012000717	1.878.378,40	3.562,40
Puskesmas Pangkoh	601012000706	9.014,50	1075,5
Puskesmas Maluku	601012000715	44.534,00	1.821,00
Puskesmas Sebangau	601012000714	523,00	1.962,00
Puskesmas Pulang Pisau	601012000706	29,67	
Puskesmas Bereng	601012000704	33.636.018,60	889.758,60
Puskesmas Jabiren	601012000720	51.127,70	2.703,70
Puskesmas Bukit Rawi	601012000712	200.128,65	50.507,65
Puskesmas Bawan	601012000710	120,60	8.399,60
Puskesmas Tangkahan	601012000699	5.085.448,80	31.548,80
Puskesmas Tahai	601012001188	77.623,00	1.511.552,00
Saldo Kas JKN		60.211.155,32	2.675.062,65

Rincian Kas Dana JKN dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

5.3.1.1.1.6. Kas Dana Bos

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk membantu sekolah-sekolah agar dapat melaksanakan kegiatan belajar yang lebih baik bagi siswa dalam bentuk Hibah. Kas Dana Bos direalisasikan pada Tahun 2022 sebesar Rp95.752.927,37 yang terdiri dari.

Tabel 72 Perhitungan Kas Dana BOS TA 2022 dan 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo Awal Kas Dana BOS	95.752.927,37	875.125.580,88
Penerimaan Dana BOS	19.915.441.816,00	17.813.906.693,00
Belanja Dana BOS	20.010.256.440,37	18.593.279.346,51
Saldo Akhir Kas Dana BOS	938.303,00	95.752.927,37

Saldo kas dana BOS per 31 Desember 2023 terdiri dari saldo awal dana BOS sebesar Rp95.752.927,37, ditambah dengan pendapatan dana BOS pada tahun 2023 sebesar Rp19.915.441.816,00 dikurangi dengan belanja dana BOS tahun 2023 sebesar Rp20.010.256.440,37, sehingga saldo kas dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp938.303,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp95.752.927,37. Daftar saldo Kas dana pada rekening sekolah dan rincian saldo Dana Bos tersaji pada **Lampiran 8.1 dan Lampiran 8.2**.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.3.1.1.1.7. Kas Lainnya

Tabel 73 Kas Lainnya TA 2022 dan 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Kas lainnya	70.350.901,00	74.914.847,00	(6,09)	(4.563.946)

Kas Lainnya Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2023 sebesar Rp70.350.901,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp74.914.847,00 merupakan Pajak Dana BOS yang belum disetorkan ke Kas Negara yang terinci berikut ini.

**Tabel 74 Kas Lainnya Berupa Pajak Dinas Pendidikan
Per 31 Desember 2023**

PPN	PPH 21	PPH 23	SSPD
22.774.742,00	16.165.495,00	5.781.324,00	6.693.300,00

Daftar sekolah yang masih memiliki kas lainnya di sajikan pada **Lampiran 17**.

Selain pajak dana BOS, Dinas Pertanian juga memiliki PPh Pasal 21 yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp1.849.305,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kecamatan Maluku memiliki Utang PPN Pusat yang belum disetor ke Kas Negara masing-masing sebesar Rp1.757.273,00 dan Rp20.450,00, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki Utang Jasa Giro masing-masing sebesar Rp24.640,00 dan Rp32.696,00 dan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp14.976.000,00.

5.3.1.1.1.8. Kas Dana BOK

Tabel 75 Kas Dana BOK Dinas Kesehatan TA 2022 dan 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Kas Dana BOK	1.411.437.097,00	0,00	0	1.411.437.097,00

Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan terdapat pada Dinas Kesehatan dimana Dana BOK semenjak tahun 2023 di transfer langsung ke puskesmas tanpa melalui APBD. Sesuai dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan BOK dianggarkan pada RKA SKPD yang melakukan pengelolaan keuangan daerah, sedangkan belanja BOK dianggarkan pada RKA SKPD yang melaksanakan tugas bidang kesehatan. Berikut ini ringkasan pendapatan dan belanja BOK.

Tabel 76 Rincian Kas Dana BOK di Puskesmas per 31 Desember 2023

NO	PUSKESMAS	PENERIMAAN DANA SALUR (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	SISA KAS (Rp)
1	JABIREN	1.027.874.000,00	852.461.509	175.412.491,00
2	BAWAN	1.027.874.000,00	966.048.575	61.825.425,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NO	PUSKESMAS	PENERIMAAN DANA SALUR (RP)	REALISASI BELANJA (RP)	SISA KAS (RP)
3	BUKIT RAWI	1.027.874.000,00	967.674.360	60.199.640,00
4	BAHAUR TENGAH	925.088.000,00	810.005.667	115.082.333,00
5	BERENG	925.088.000,00	831.783.420	93.304.580,00
6	MALIKU	1.233.450.000,00	1.171.845.819	61.604.181,00
7	TAHAI	1.027.881.000,00	871.609.742	156.271.258,00
8	PANGKOH	1.171.353.000,00	1.019.974.174	151.378.826,00
9	SEBANGAU	1.233.450.000,00	1.062.109.178	171.340.822,00
10	TANGKAHEN	770.905.000,00	603.760.962	167.144.038,00
11	BAHAUR HILIR	1.182.056.000,00	1.034.717.859	147.338.141,00
12	PULANG PISAU	925.088.000,00	874.552.638	50.535.362,00
TOTAL		12.477.981.000,00	11.066.543.903,00	1.411.437.097,00

5.3.1.1.1.9. Kas Prolanis

Tabel 77 Kas Dana Prolanis TA 2022 dan 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Kas Dana Prolanis	15.863.807,00	0,00	0,00	15.863.807,00

Prolanis atau Program Pengelolaan Penyakit Kronis merupakan program dari BPJS Kesehatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup para penderita penyakit kronis dan merupakan kegiatan terintegrasi yang membutuhkan kerja sama solid antara BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, dan pasien. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau juga menerima program ini. Besaran pendapatan dan belanja Prolanis tersaji berikut ini.

Tabel 78 Rincian Kas Dana Prolanis di Puskesmas per 31 Desember 2023

NO	PUSKESMAS	TOTAL PENDAPATAN	TOTAL BELANJA	SISA SALDO AKHIR
1	Puskesmas Pulang Pisau	9.919.374,00	9.778.700,00	140.674,00
2	Puskesmas Bereng	1.225.958,00	60.500	1.165.458,00
3	Puskesmas Jabiren	0,00	0,00	0,00
4	Puskesmas Bukit Rawi	0,00	0,00	0,00
5	Puskesmas Bawan	26.995.000,00	26.945.000,00	50.000,00
6	Puskesmas Tangkahan	0,00	0,00	0,00
7	Puskesmas Maluku	40.896.067,80	40.760.500,00	135.567,8
8	Puskesmas Pangkoh	38.985.934,00	26.407.500,00	12.578.434,00
9	Puskesmas Bahaur Hilir	0,00	0,00	0,00
10	Puskesmas Sebangau	20.354.171,00	20.295.000,00	59.171,00
11	Puskesmas Bahaur Tengah	26.672.861,20	25.066.000,00	1.606.861,20
12	Puskesmas Tahai	13.688.141,00	13.560.500,00	127.641,00
TOTAL		178.737.507,00	162.873.700,00	15.863.807,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Hasil Pengujian Prosedur Analitis Atas Kesesuaian SILPA/SIKPA dengan Kas dan Utang PFK

Laporan keuangan perlu untuk diuji dengan menggunakan Prosedur Analitis untuk menguji kesesuaian hubungan masing-masing akun. Berdasarkan pada pengujian Prosedur Analisis atas SILPA/SIKPA dan kas berikut ini.

Hasil Pengujian Prosedur Analitis

<p><i>SILPA/(SIKPA) (LRA) = Kas di Kasda (Neraca) + Kas di Bend. Penerimaan (Neraca) + Kas di Bend. Pengeluaran (Neraca) + Kas di Bend. BLUD (Neraca) + Kas di Bend. FKTP (Neraca) + Kas di Bend. BOS (Neraca) + Setara Kas di BUD (Neraca) + Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (Selain BUD) Terkait Utang PFK (Neraca) - Utang PFK (Neraca)</i></p>		
<p><i>SILPA/(SIKPA) (LRA) = Kas dan Setara Kas (Neraca) - Utang PFK (Neraca)</i></p>		
SILPA/SIKPA Tahun Berjalan (LRA)		134.129.133.527,28
Kas di Kasda Tahun Berjalan (Neraca)		100.399.582.428,50
Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Berjalan (Neraca)		-
Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan (Neraca)		46.675.091,00
Kas di Bendahara BLUD Tahun Berjalan (Neraca)		32.194.425.645,46
Kas di Bendahara FKTP Tahun Berjalan (Neraca)		1.471.648.252,32
Kas di Bendahara BOS Tahun Berjalan (Neraca)		938.303,00
Setara Kas di BUD Tahun Berjalan (Neraca)		-
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) Tahun Berjalan - Terkait Utang PFK (Neraca)		70.350.901,00
Utang PFK Tahun Berjalan (Neraca)		63.600.265,00
Selisih		9.113.171,00
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)		9.113.171,00

Terdapat selisih sebesar Rp9.113.171.00 yang terdiri atas :

1. Terdapat Kas Lainnya di bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Sebesar (Rp6.693.300,00) yang merupakan utang setoran Pajak Katering dan rumah makan yang belum disetorkan oleh bendahara Dinas Pendidikan.
2. Terdapat jasa giro yang tidak dilakukan autodebet ke kas daerah, sehingga masih mengendap di rekening bendahara pengeluaran dan saat dilakukan penihilan diakhir tahun ikut ditarik secara tunai oleh bendahara dan baru disetor tahun 2024 sebesar Rp57.336,00 yang terdapat pada SKPD DPMPSTP sebesar Rp32.696,00 dan Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp24.640,00
3. Kas dana Prolanis sebesar Rp15.683.807,00.

5.3.1.1.2. Piutang

Piutang adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 adalah sebesar Rp21.141.062.902,88 sedangkan piutang TA 2022 adalah sebesar Rp82.791.975.702,77, nilai Piutang tersebut merupakan nilai perolehan piutang dikurangi dengan pembayaran piutang. Terjadi penurunan Piutang dari TA 2022 ke TA 2023 hal itu disebabkan karena terealisasinya piutang BPHTB yang telah dibayar oleh wajib pajak pada tahun 2023.

Tabel 79 Piutang TA 2022 dan 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Piutang Pendapatan	20.518.539.179,74	82.565.674.032,77	(75,15)	(62.047.134.853,03)
Piutang Lainnya	166.103.900,00	172.203.900,00	(3,54)	(6.100.000,00)



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban Dibayar Dimuka	456.419.823,14	54.097.770,00	743,69	402.322.053,14
Jumlah	21.141.062.902,88	82.791.975.702,77	(74,46)	(61.650.912.799,89)

5.3.1.1.2.1. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.518.539.179,74 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp82.565.674.032,77 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 80 Piutang Pendapatan TA 2022 dan 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Piutang Pajak	9.857.943.748,00	69.320.452.829,00	(85,78)	(59.462.509.081,00)
Piutang Restribusi	497.974.113,00	497.804.533,00	0,03	169.580,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah	2.756.323.824,74	1.289.206.495,40	113,80	1.467.117.329,34
Piutang Transfer Dana Bagi Hasil	7.406.297.494,00	11.458.210.175,37	(35,36)	(4.051.912.681,37)
Jumlah	20.518.539.179,74	82.565.674.032,77	(75,15)	(62.047.134.853,03)

Rincian saldo piutang pendapatan dijelaskan sebagai berikut:

a. Piutang Pajak

Piutang Pajak terdiri dari Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Piutang Pajak Restoran dengan rincian sebagai berikut.

1. Piutang Pajak PBB

Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 merupakan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang dialihkan sebagai Pajak Daerah dari KPP Pratama Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor: BA-33/WPJ.29/KP.03/2014. Piutang PBB per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.851.250.448,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 81 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) TA 2022 dan 2023

Uraian Piutang	Saldo Piutang 2022 (Rp)	Ketetapan TA 2023 (Rp)	Realisasi pembayaran piutang tahun 2023	Saldo Piutang 2023 (Rp)
Tunggakan PBB tahun 2008	501.084.302,00	0,00	1.322.270,00	499.762.032,00
Tunggakan PBB tahun 2009	984.085.329,00	0,00	2.338.388,00	981.746.941,00
Tunggakan PBB tahun 2010	1.034.511.076,00	0,00	2.352.451,00	1.032.158.625,00
Tunggakan PBB tahun 2011	942.607.013,00	0,00	3.323.716,00	939.283.297,00
Tunggakan PBB tahun 2012	1.047.577.863,00	0,00	3.185.833,00	1.044.392.030,00
Tunggakan PBB tahun 2013	705.911.524,00	0,00	2.458.189,00	703.453.335,00
Tunggakan PBB tahun 2014	391.385.470,00	0,00	2.080.609,00	389.304.861,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian Piutang	Saldo Piutang 2022 (Rp)	Ketetapan TA 2023 (Rp)	Realisasi pembayaran piutang tahun 2023	Saldo Piutang 2023 (Rp)
Tunggakan Tahun 2015	603.501.529,00	0,00	2.683.317,00	600.818.212,00
Tunggakan Tahun 2016	301.851.724,00	0,00	2.108.192,00	299.743.532,00
Tunggakan Tahun 2017	427.670.259,00	0,00	2.709.653,00	424.960.606,00
Tunggakan TA 2018	450.766.076,00	0,00	7.532.268,00	443.233.808,00
Tunggakan TA 2019	483.212.309,00	0,00	16.721.123,00	466.491.186,00
Piutang Tahun 2020	469.491.914,00	0,00	10.721.590,00	458.770.324,00
Piutang Tahun 2021	489.048.267,00	0,00	16.559.172,00	472.489.095,00
Piutang Tahun 2022	565.131.930,00	0,00	42.052.711,00	523.079.219,00
Ketetapan Tahun 2023	0,00	1.606.341.930,00	1.034.778.585,00	571.563.345,00
Total Piutang	9.397.836.585,00	1.606.341.930,00	1.152.928.067,00	9.851.250.448,00

2. Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran merupakan Piutang Pajak Makan dan Minum dari Dinas Pendidikan sebesar Rp6.693.300,00.

b. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang Sah pada RSUD Pulang Pisau. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 82 Piutang Retribusi TA 2022 dan 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	460.304.533,00	460.304.533,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan	169.580,00	0,00	0,00	169.580,00
Jumlah	497.974.113,00	497.804.533,00	0,03	169.580,00

1) Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau merupakan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Piutang Retribusi IMB muncul sebagai akibat dari perizinan IMB untuk pendirian bangunan sarang burung walet. Piutang retribusi IMB per 31 Desember 2023 sama dengan piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp460.304.533,00 dimana tidak terdapat penambahan Piutang Retribusi baru TA 2023.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 83 Rincian Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

No	Tahun	Nilai Piutang	Pembayaran	Sisa Piutang
1	2016	638.951.896,00	73.877.000,00	565.074.896,00
2	2017	855.467.118,00	349.767.819,00	505.699.299,00
3	2018	502.699.299,00	33.094.766,00	469.604.533,00
4	2019	472.604.533,00	12.300.000,00	460.304.533,00
5	2020	460.304.533,00	0,00	460.304.533,00
6	2021	460.304.533,00	0,00	460.304.533,00

2) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang Sah

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang Sah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Tabel 84 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Yang Sah

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Piutang Sewa ATM Bank Kalteng	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang sah merupakan piutang yang muncul karena adanya kerja sama atas sewa ruang ATM di Rumah Sakit Umum Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 85 Rincian Perhitungan Piutang Retribusi Sewa ATM Bank Kalteng

No	Tahun	No PKS	Tarif Sewa ATM (Rp)	Penyetoran (Rp)	Piutang (Rp)	Tanggal Penyetoran (Rp)
1	2013	61/TU/RSUD-PP/UM/I-2013	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00
2	2014	61/TU/RSUD-PP/UM/I-2013				
3	2015	09/TU/RSUD-PP/UM/I/2015	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	16 January 2015
4	2016	09/TU/RSUD-PP/UM/I/2015				
5	2017	440/014/PKS/RSUD-PP/I-2017	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	08 May 2017
6	2018	440/ /PKS/RSUD-PP/I-2018	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	06 April 2018
7	2019	440/046/PKS/RSUD-PP/I-2019	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	13 February 2019
8	2020	440/004/PKS/RSUD-PP/I-2020	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	22 January 2020
9	2021	440/188/PKS/RSUD-PP/I-2021	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
Jumlah			137.500.000,00	100.000.000,00	37.500.000,00	0,00

Untuk tahun 2013 dan 2021, belum terdapat pembayaran sewa ruang ATM tersebut oleh Bank Kalteng masing-masing sebesar Rp17.500.000,00 dan Rp20.000.000,00. sehingga jumlah piutang sewa ruang ATM pada RSUD Pulang Pisau sebesar Rp37.500.000,00.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

3) Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Piutang Retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pungutan retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 86 Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	169.580,00	-	-	-
Jumlah	169.580,00	-	-	-

c. Piutang Lain-lain PAD yang sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 adalah sebesar Rp2.756.323.824,74 lebih kecil bila dibandingkan dengan Piutang TA 2022 sebesar Rp1.289.206.495,40, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 87 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Uraian	Saldo Piutang Tahun 2022	Koreksi Piutang	Pembayaran Piutang	Penambahan Piutang	Saldo Piutang Tahun 2023
Piutang Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	57.336,00	57.336,00
Piutang Bunga	15.658.168,93	0,00	15.658.168,93	0,00	0,00
Piutang Denda Restribusi	706.900.254,47	0,00	0,00	110.517.454,27	817.417.708,74
Piutang pelayanan BLUD RSUD Pulang Pisau	566.648.072,00	0,00	566.648.072,00	1.938.848.780,00	1.938.848.780,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah	1.289.206.495,40	0,00	582.306.240,93	2.049.423.570,27	2.756.323.824,74

Penjelasannya terinci sebagai berikut

1) Piutang Denda Retribusi IMB

Piutang Denda Retribusi IMB muncul sebagai akibat dari tidak terbayarnya retribusi IMB selama satu tahun anggaran oleh pengusaha sarang burung walet. Saldo Piutang Denda IMB tahun 2022 adalah sebesar Rp706.900.254,47 terdapat penambahan Piutang Denda Retribusi IMB pada TA 2022 sebesar Rp110.517.454,27, sehingga total Piutang Denda Retribusi IMB adalah Rp 817.417.708,74.

Tabel 88 Rincian Daftar Piutang Denda Rtribusi IMB TA 2016-2023

No	Tahun	Penambahan Denda (Rp)	Piutang Denda (Rp)
1	2016	14.056.077,00	14.056.077,00
2	2017	137.227.223,09	151.283.300,09
3	2018	113.301.137,29	264.584.437,38
4	2019	110.763.454,27	375.347.891,65
5	2020	110.517.454,27	485.865.345,93
6	2021	110.517.454,27	596.382.800,20
7	2022	110.517.454,27	706.900.254,47



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Tahun	Penambahan Denda (Rp)	Piutang Denda (Rp)
8	2023	110.517.454,27	817.417.708,74

2) Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Pulang Pisau

Piutang pelayanan kesehatan BLUD RSUD Pulang Pisau muncul disebabkan karena keterlambatan pembayaran klaim yang diajukan oleh BLUD RSUD Pulang Pisau ke BPJS, Perusahaan dan jasa asuransi lainnya. Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD masuk dalam kategori Piutang Lain-lain PAD yang sah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 334 Tahun 2017 tentang Penerapan Pola Pengelolaan BUD pada RSUD Pulang Pisau yang berlaku efektif sejak Januari 2017. Piutang BLUD RSUD Pulang Pisau terinci sebagai berikut.

Tabel 89 Rincian Perhitungan Piutang BLUD TA 2022-2023

Uraian	Saldo Piutang Tahun 2022	Koreksi Piutang	Pembayaran Piutang	Penambahan Piutang	Saldo Piutang Tahun 2023
Piutang pelayanan BLUD RSUD Pulang Pisau	566.648.072,00	0,00	566.648.072,00	1.938.848.780,00	1.938.848.780,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah	566.648.072,00	0,00	566.648.072,00	1.938.848.780,00	1.938.848.780,00

d. Piutang Transfer Dana Bagi Hasil

Tabel 90 Rincian Piutang Transfer Dana Bagi Hasil TA 2022 dan 2023

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	640.571.179,00	1.337.232.588,43	(62,78)	(1.018.439.470,57)
Piutang Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	603.906.190,00	1.622.345.660,57	(60,59)	(23.232.768,99)
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	15.114.106,00	38.346.874,99	(27,35)	(2.313.579.032,38)
Piutang Dana Bagi Hasil Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.146.706.019,00	8.460.285.051,38	(35,36)	(4.051.912.681,37)
Jumlah	7.406.297.494,00	11.458.210.175,37	(52,10)	(696.661.409,43)

Berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/128/2022 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap IV Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 yang Disalurkan pada Tahun Anggaran 2023 dimana Dana Bagi Hasil yang masih belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kabupaten Pulang Pisau adalah sebesar Rp11.458.210.175,37.

Piutang TA 2022 tersebut telah dibayar pada tahun 2023 dengan bukti pembayaran berikut.

Tabel 91 Nomor Bukti Pembayaran Piutang Transfer Dana Bagi Hasil TA 2022

Tanggal	No Bukti	Uraian	Jumlah (Rp)
12-Apr-23	0022.a/PPKD/STS/IV/2023	Transfer DBH Pajak Daerah Tahap IV Tahun 2022 Yang Disalurkan Pada TA 2023	11.458.210.175,00
Jumlah			11.458.210.175,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Piutang TA 2023 berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/123/2024 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap V Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 yang Disalurkan pada Tahun Anggaran 2024 dan Dana Bagi Hasil yang masih belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kabupaten Pulang Pisau adalah sebesar Rp7.406.297.294,00.

5.3.1.1.2.2. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2023 sebesar Rp166.103.900,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp172.203.900,00. Piutang lain-lain Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari rekening Piutang Tuntutan Ganti Rugi Perbendaharaan Dinas Pendidikan, Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Perbendaharaan BPPKAD dan, piutang TASPEN. Penjelasan rincian sebagai berikut.

Tabel 92 Rincian Piutang Lainnya TA 2022 dan 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Tuntutan Ganti Kerugian Perbendaharaan Dinas Pendidikan	83.750.000,00	68.750.000,00	21,82	15.000.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian BPPKAD	13.527.000,00	14.527.000,00	(6,88)	(1.000.000,00)
Piutang Taspen	68.826.900,00	88.926.900,00	(22,60)	(20.100.000,00)
Jumlah	166.103.900,00	172.203.900,00	(3,54)	(6.100.000,00)

1) Tuntutan Ganti Kerugian Perbendaharaan Dinas Pendidikan

Tuntutan Ganti Kerugian Perbendaharaan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2023 sebesar Rp83.750.000,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp68.750.000,00. Tuntutan Ganti Kerugian Perbendaharaan merupakan piutang yang muncul akibat adanya kas di brankas Dinas Pendidikan yang hilang Tahun 2011 dan ditetapkan sebagai tagihan jangka panjang dengan ketentuan bahwa mantan Bendahara Dinas Pendidikan membayar sebesar Rp1.250.000,00 setiap bulannya (Rp15.000.000,00/tahun) sampai dengan tagihan tersebut terlunasi. Berikut ini jumlah perhitungan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan.

Tabel 93 Rincian Perhitungan Tuntutan Ganti Kerugian Perbendaharaan Dinas Pendidikan

Debitur	Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Perbendaharaan TA 2022 (Rp)	Realisasi pembayaran Tuntutan Ganti Kerugian Perbendaharaan TA 2023 (Rp)	Sisa Tuntutan Ganti Kerugian Perbendaharaan tahun 2022(Rp)	Reklasifikasi ke Tuntutan Ganti Kerugian Perbendaharaan per 31 desember 2023 (Rp)	Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Perbendaharaan TA 2022 (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian Perbendaharaan	68.750.000,00	0,00	68.750.000,00	15.000.000,00	83.750.000,00

2) Tuntutan Ganti Kerugian BPPKAD

Tuntutan Ganti Kerugian BPPKAD berdasarkan atas LHP Inspektorat atas Penyetoran Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan Bangunan tahun 2021



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

berdasarkan LHP Nomor 700/01/LHP-K/ITKAB-PP/XII/2021 tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp30.027.000,00, telah dibayar sebagian sebesar Rp16.500.000,00 sehingga Piutang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13.527.000,00

3) Piutang PT TASPEN

Piutang PT Taspen merupakan piutang yang muncul sejak Tahun 2012, dimana piutang ini muncul disebabkan oleh beberapa hal :

- (1) SKPD terlambat dalam memberikan informasi tentang status pegawai yang pensiun;
- (2) SK Pensiun untuk pejabat Esselon II ditandatangani oleh presiden, dimana prosedur antara pengajuan SK dengan turunnya SK bisa memakan waktu hingga 12 bulan sehingga selama SK tersebut belum di terima oleh Bidang Perbendaharaan, maka gaji pegawai yang bersangkutan masih dibayar secara penuh; dan
- (3) Munculnya SOP PT Taspen yang menyebutkan bahwa maksimal gaji pegawai yang digantikan oleh PT Taspen untuk dibayarkan ke Pemerintah Daerah maksimal hanya 30% dari gaji pokok.

Dari berbagai permasalahan tersebut menyebabkan Piutang PT Taspen tersaji dengan rincian berikut.

Tabel 94 Rincian Perhitungan Piutang TASPEN dari TA 2022-2023

Uraian Piutang	Piutang per 31 Desember 2022 (Rp)	Koreksi Pengurangan Piutang TA 2023(Rp)	Realisasi Pembayaran Piutang TA 2023 (Rp)	Saldo (Rp)
Piutang TASPEN	88.926.900,00	0	20.100.000,00	68.826.900,00

5.3.1.1.2.3. Penyisihan Piutang

Saldo Akumulasi Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.064.543.050,55 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.002.947.787,25. Penyisihan Piutang dihitung didasarkan pada umur Piutang dan mengacu pada kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Sesuai dengan kebijakan akuntansi Kabupaten Pulang Pisau Penyisihan Piutang di kategorikan menjadi empat klasifikasi yaitu sebagai berikut.

- (a) 0-1 Tahun (Lancar);
- (b) 1-3 Tahun (kurang Lancar);
- (c) 3-5 Tahun (Diragukan); dan
- (d) 5 Tahun < (Macet).

Dari dasar tersebut maka diperoleh Akumulasi Penyisihan Piutang Kabupaten Pulang Pisau dengan rincian sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 95 Rincian Penyisihan Piutang TA 2022 dan 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Penyisihan Piutang PBB	(7.331.037.024,30)	(7.300.204.159,60)	0,42	(30.832.864,70)
Penyisihan Piutang BPHTB	0,00	(5.991.626.451,40)	(100,00)	5.991.626.451,40
Penyisihan Pendapatan Lain-lain (Taspen)	(58.984.850,00)	(58.984.850,00)	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Perbendaharaan	(41.716.550,00)	(19.327.700,00)	115,84	(22.388.850,00)
Penyisihan Piutang IMB	(460.304.532,80)	(460.304.532,80)	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Denda IMB	(172.500.093,45)	(172.500.093,45)	0,00	0,00
Akumulasi Penyisihan Piutang	(8.064.543.050,55)	(14.002.947.787,25)	(42,41)	5.938.404.736,70

5.3.1.1.2.4. Beban dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah beban yang sudah dibayarkan namun belum dicatat sebagai beban pada periode tersebut. Beban Dibayar Dimuka Kabupaten Pulang Pisau berupa Beban Pajak Kendaraan Bermotor yang dibayar TA 2023 namun memiliki jangka pembebanan selama 12 bulan berikutnya. Beban Dibayar Dimuka TA 2023 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau adalah sebesar Rp456.419.823,14, dimana sebesar Rp289.284.916,14 merupakan beban barang dibayar dimuka pekerjaan pembangunan Jembatan Manen Kaleka pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sedangkan Beban dibayar dimuka sebesar Rp167.134.907,00 adalah beban pajak kendaraan bermotor. Adapun rincian keduanya tersaji berikut ini:

Tabel 96 Beban Barang dibayar Dimuka Pembangunan Dermaga Manen Kaleka DPUPR

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	289.284.916,14

Tabel 97 Beban Barang dibayar Dimuka Pajak Kendaraan Bermotor

No	SKPD	Jumlah
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.242.920,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	986.150,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.628.116,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.972.180,00
5	Dinas Perhubungan	27.202.396,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	3.012.350,00
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	461.642,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.769.213,00
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.523.108,00
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.093.875,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.054.122,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.391.702,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	SKPD	Jumlah
13	Dinas Ketahanan Pangan	1.854.751,00
14	Dinas Perikanan	6.482.335,00
15	Dinas Pertanian	15.524.954,00
16	Sekretariat Daerah	22.603.691,00
17	Sekretariat DPRD	34.488.561,00
18	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16.200.283,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	670.425,00
20	Inspektorat	2.842.129,00
21	Kecamatan Kahayan Hilir	3.681.334,00
22	Kecamatan Maliku	468.750,00
23	Kecamatan Kahayan Kuala	598.200,00
24	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	381.720,00
Jumlah		167.134.907,00

5.3.1.1.3. Persediaan

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mencatat persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.270.568.444,77 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp72.069.685.000,97. Nilai persediaan pada akhir tahun meliputi persediaan barang habis pakai, barang cetakan dan benda berharga, alat listrik dan elektronik, alat kebersihan, obat, oksigen, alat kesehatan, obat pertanian dan peternakan, laboratorium, radiologi, makanan, tanaman dan barang lain-lain dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 98 Daftar Rincian Jenis Persediaan TA 2022 dan 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Persediaan Alat Tulis Kantor	193.556.159,25	205.281.112,50	(5,71)	(11.724.953,25)
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	49.599.694,00	29.411.763,00	68,64	20.187.931,00
Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	5.822.000,00	6.532.000,00	(10,87)	(710.000,00)
Persediaan Perabot Kantor	330.980.358,00	78.445.739,50	321,92	252.534.618,50
Kertas dan Cover	494.800,00	0,00	0,00	494.800,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	111.048.790,20	32.816.250,00	238,40	78.232.540,20
Persediaan Isi tabung gas	300.000,00	550.000,00	(45,45)	(250.000,00)
Persediaan Bahan obat-obatan	7.350.138.366,83	3.745.230.229,73	96,25	3.604.908.137,10



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
Persediaan Bahan kimia	31.965.950,94	151.384.139,00	(78,88)	(119.418.188,06)
Persediaan Bahan Komputer	16.671.600,00	0,00	0,00	16.671.600,00
Bahan Lainnya	24.513.462,00	0,00	0,00	24.513.462,00
Komponen Lainnya	41.815.000,00	0,00	0,00	41.815.000,00
Persediaan Bahan Makanan Pokok	24.991.125,55	41.813.778,61	(40,23)	(16.822.653,06)
Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga	3.051.382.138,00	67.673.491.863,63	(95,49)	(64.622.109.725,63)
Persediaan Barang Cetakan Lainnya	37.289.000,00	104.728.125,00	(64,39)	(67.439.125,00)
Jumlah	11.270.568.444,77	72.069.685.000,97	(84,36)	(60.799.116.556,20)

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menggunakan metode periodik dalam menghitung persediaan yaitu persediaan dicatat berdasarkan perhitungan/inventarisasi fisik persediaan yang dilakukan pada akhir periode. Sejak tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau sudah menggunakan pelaporan persediaan dengan periode triwulan. Persediaan disajikan sebesar harga akhir apabila diperoleh dengan pembelian dan persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO). Adapun data persediaan terdapat pada SKPD sebagai berikut.

Tabel 99 Daftar Persediaan per SKPD TA 2022 dan 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	15.014.900,00	38.366.050,00
Dinas Kesehatan	6.068.710.520,90	2.754.087.065,38
Rumah Sakit Umum Daerah	1.846.096.693,07	1.284.900.055,50
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.874.330.240,00	67.147.445.765,63
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	18.800.000,00	18.800.000,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	583.900,00	856.000,00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	530.000,00
Dinas Sosial	2.000.000,00	1.925.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	532.000,00	1.087.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22.499.176,00	1.566.400,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.260.622,00	3.346.710,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	23.327.100,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.199.000,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	47.732.458,00	45.808.383,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	599.700,00	855.700,00
Dinas Perhubungan	10.363.200,00	2.230.500,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	3.797.500,00	2.865.200,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	42.130.000,00	3.941.600,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30.346.000,00	8.648.000,00
Dinas Perikanan	11.258.231,55	33.282.271,96
Dinas Pertanian	445.300,00	360.667.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	325.500,00	215.000,00
Sekretariat Daerah	6.286.600,00	15.300.900,00
Sekretariat DPRD	1.450.000,00	362.500,00
Kecamatan Kahayan Hilir	11.394.100,00	8.098.400,00
Kecamatan Jabiren Raya	1.074.000,00	2.547.500,00
Kecamatan Maluku	210.000,00	794.000,00
Kecamatan Pandih Batu	880.000,00	790.000,00
Kecamatan Kahayan Kuala	754.000,00	1.818.000,00
Kecamatan Sebangau Kuala	207.000,00	222.000,00
Kecamatan Kahayan Tengah	720.000,00	621.200,00
Kecamatan Banama Tingang	1.077.500,00	2.507.000,00
Inspektorat Daerah	7.589.250,00	6.069.800,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	4.331.882,00	5.268.313,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	231.190.271,25	286.174.386,50
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.378.900,00	4.360.200,00
Jumlah	11.270.568.444,77	72.069.685.000,97

1) Persediaan Alat Tulis Kantor

Persediaan Alat Tulis kantor per 31 Desember 2023 sebesar Rp193.556.159,25. Uraian persediaan masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut.

Tabel 100 Daftar Persediaan Alat tulis Kantor per SKPD TA 2022 dan 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	13.421.000,00	7.684.500,00
Dinas Kesehatan	25.441.300,00	27.889.100,00
Rumah Sakit Umum Daerah	36.810.375,00	14.001.152,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.742.800,00	6.071.900,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	530.000,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	583.900,00	711.000,00
Dinas Sosial	2.000.000,00	1.925.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	110.000,00	791.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	899.200,00	1.566.400,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	711.800,00	2.957.250,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	21.456.600,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.023.745,00	30.996.528,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	231.700,00	279.700,00
Dinas Perhubungan	1.255.000,00	1.435.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	3.225.000,00	2.365.200,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	315.000,00	3.941.600,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.046.000,00	3.451.000,00
Dinas Perikanan	1.530.000,00	117.493,50
Dinas Pertanian	30.000,00	391.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	208.500,00	215.000,00
Sekretariat Daerah	780.000,00	12.433.500,00
Sekretariat DPRD	1.450.000,00	362.500,00
Kecamatan Kahayan Hilir	4.594.500,00	3.959.900,00
Kecamatan Jabiren Raya	1.074.000,00	2.547.500,00
Kecamatan Maliku	190.000,00	564.000,00
Kecamatan Pandih Batu	674.000,00	622.000,00
Kecamatan Kahayan Kuala	645.000,00	1.290.000,00
Kecamatan Sebangau Kuala	207.000,00	222.000,00
Kecamatan Kahayan Tengah	720.000,00	621.200,00
Kecamatan Banama Tingang	887.500,00	2.397.000,00
Inspektorat Daerah	5.458.700,00	2.860.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.737.900,00	4.105.400,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	42.173.339,25	41.053.989,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.378.900,00	3.465.200,00
Jumlah	193.556.159,25	205.281.112,50

2) Persediaan Alat Listrik dan Elektronik

Uraian Persediaan alat listrik dan elektronik ini terdapat pada SKPD sebagai berikut.

Tabel 101 Daftar Persediaan Alat Listrik dan Elektronik per SKPD TA 2022 dan 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Kesehatan	1.135.000,00	2.847.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	17.722.000,00	6.077.583,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	283.922,00	220.460,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Lingkungan Hidup	2.557.000,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	575.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	149.850,00	2.010.780,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	90.000,00	65.000,00
Dinas Perhubungan	635.000,00	242.500,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	717.000,00	95.000,00
Dinas Perikanan	0,00	184.000,00
Sekretariat Daerah	1.787.000,00	1.669.400,00
Kecamatan Kahayan Hilir	4.024.000,00	1.465.000,00
Kecamatan Kahayan Kuala	70.000,00	200.000,00
Kecamatan Maluku	0,00	130.000,00
Kecamatan Banama Tingan	120.000,00	0,00
Inspektorat Daerah	385.950,00	131.500,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	194.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	432.572,00	193.940,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Aset Daerah	19.490.400,00	13.035.600,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00	75.000,00
Jumlah	49.599.694,00	29.411.763,00

3) Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Uraian persediaan perangko, materai dan benda pos Lainnya tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 102 Daftar Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya per SKPD TA 2022 dan 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Kesehatan	2.200.000,00	300.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	60.000,00	100.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	1.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30.000,00	100.000,00
Dinas Perhubungan	350.000,00	350.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	120.000,00	500.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	200.000,00	500.000,00
Dinas Perikanan	0,00	600.000,00
Kecamatan Kahayan Hilir	30.000,00	400.000,00
Kecamatan Maluku	20.000,00	100.000,00
Kecamatan Pandih Batu	120.000,00	140.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Kecamatan Banama Tingang	70.000,00	110.000,00
Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	900.000,00	1.000.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	62.000,00	82.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	250.000,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.660.000,00	1.000.000,00
Jumlah	5.822.000,00	6.532.000,00

4) Persediaan Alat Pembersih dan Bahan Pembersih (Perabot Kantor)

Persediaan Alat Pembersih dan Bahan Pembersih TA 2022 terbagi pada SKPD sebagai berikut.

Tabel 103 Daftar Persediaan Alat Pembersih dan Bahan Pembersih Lainnya per SKPD TA 2022 dan 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	1.593.900,00	0,00
Dinas Kesehatan	2.549.400,00	5.471.800,00
Rumah Sakit Umum Daerah	260.767.485,00	31.722.690,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.599.976,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00	70.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	642.000,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	295.500,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	498.100,00	69.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.672.763,00	3.488.175,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	222.000,00	411.000,00
Dinas Perhubungan	170.500,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	452.500,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.383.000,00	4.602.000,00
Dinas Perikanan	1.065.000,00	1.092.100,00
Kecamatan Kahayan Hilir	2.745.600,00	2.273.500,00
Kecamatan Pandih Batu	86.000,00	28.000,00
Kecamatan Kahayan Kuala	39.000,00	328.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	451.000,00
Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	844.600,00	1.110.300,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.648.534,00	27.032.674,50
Jumlah	330.980.358,00	78.445.739,50



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5) Persediaan Isi Tabung Gas

Persediaan Isi Tabung Gas pada TA 2023 dan TA 2022 terdapat di SKPD Rumah Sakit Umum Daerah, Persediaan TA 2023 sebesar Rp300.000,00 dan TA 2022 sebesar Rp550.000,00.

6) Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Persediaan Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya terdapat pada SKPD berikut ini.

Tabel 104 Daftar Persediaan Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per SKPD TA 2022 dan 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	0,00	30.681.550,00
Dinas Kesehatan	0,00	280.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	107.822.980,20	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	422.000,00	296.000,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	26.000,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	203.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	178.800,00	0,00
Sekretariat Daerah	1.499.600,00	1.198.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.099.410,00	157.700,00
Jumlah	111.048.790,20	32.816.250,00

7) Persediaan Obat

Persediaan Obat terdapat pada SKPD tersaji sebagai berikut.

Tabel 105 Daftar Persediaan Obat per SKPD TA 2022 dan 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Kesehatan	6.000.271.820,90	2.663.934.665,38
Rumah Sakit Umum Daerah	1.349.866.545,93	1.069.389.391,35
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	9.312.900,00
Dinas Perikanan	0,00	1.000.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	729.273,00
Inspektorat	0,00	864.000,00
Jumlah	7.350.138.366,83	3.745.230.229,73

Terdapat persediaan Obat yang sudah *expired date* dimana berdasarkan pada PSAP 05 menyatakan bahwa barang persediaan dalam kondisi rusak tidak lagi dilaporkan dalam neraca, akan tetapi tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Dimana terdapat obat expired tahun 2022 sebesar Rp 409.901.339,80 dan 146.520.907,87 yang telah di reklasifikasi ke Aset Lain-lain, sedangkan untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp110.284.039,64.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Persediaan Obat-Obatan lainnya berupa ABHP medis Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 sebesar Rp752.048.104,70 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah.

8) Persediaan Bahan Kimia

Pada TA 2023 terdapat saldo persediaan bahan kimia sebesar Rp31.965.950,94 terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp30.827.090,94 untuk Bahan Kimia dan Bahan Kimia Nuklir sebesar Rp 1.138.860,00 sedangkan Pada TA 2022 sebesar Rp151.384.139,00.

9) Persediaan Bahan Komputer

Persediaan Bahan komputer Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 sebesar Rp16.671.600,00 yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp13.886.100,00, DP3AP2KB sebesar Rp370.200, Sekretariat Daerah sebesar Rp2.220.000,00 dan Dinas Pertanian Rp195.300,00.

10) Bahan Lainnya

Persediaan Bahan Lainnya terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp24.513.462,00. Persediaan Bahan Lainnya berupa perlengkapan dapur yang digunakan untuk mempersiapkan makanan bagi pasien.

11) Persediaan Komponen Lainnya

Persediaan Komponen Lainnya merupakan Persediaan Barang Tak habis pakai yang terdapat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga berupa Kustom Drumband senilai Rp41.815.000,00.

12) Persediaan Bahan Makanan Pokok

Persediaan bahan makanan pokok Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp24.991.125,55 dimana sebagian merupakan persediaan berupa bahan makanan mentah untuk diolah pada instalasi gizi sebagai makanan pasien di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dimana pada TA 2023 masih terdapat saldo persediaan sebesar Rp16.327.894,00 sedangkan untuk TA 2022 sebesar Rp11.775.100,15 di Rumah Sakit Umum Daerah. Sedangkan sisanya sebesar Rp8.663.231,55. Merupakan pakan ternak pada Dinas pertanian.

13) Persediaan Barang yang akan diserahkan pada Pihak Ketiga

Persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga muncul karena masih terdapat saldo barang yang belum selesai atau siap untuk diserahkan kepada masyarakat atau berita acara penghibahan belum selesai diproses dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 106 Daftar Barang yang akan diserahkan pada Pihak Ketiga per SKPD
TA 2022 dan 2023**

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.871.587.440,00	67.141.373.865,63
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	18.800.000,00	18.800.000,00
Dinas Pertanian	-	360.276.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Perhubungan	7.952.700,00	-
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	153.041.998,00	153.041.998,00
Jumlah	3.051.382.138,00	67.673.491.863,63

Persediaan barang diserahkan pada pihak ketiga terdapat pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum merupakan bangunan tempat ibadah dan bangunan lain yang dibangun dengan tujuan diperuntukan untuk masyarakat, sedangkan untuk Dinas Perhubungan merupakan Tanah Dermaga yang direncanakan untuk dihibahkan.

14) Bahan Lainnya

Persediaan Bahan Lainnya terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp24.513.462,00.

15) Bahan Cetak dan Kertas Cover

Persediaan Cetak Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 adalah sebesar Rp37.289.000,00, sedangkan Persediaan Kertas cover sebesar Rp494.800,00. Persediaan ini berupa blanko, brosur kesehatan dan KB yang terdapat pada beberapa SKPD berikut ini.

Tabel 107 Daftar Persediaan Cetak per SKPD TA 2022 dan 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Persediaan Barang Cetak	37.289.000,00	
Dinas Kesehatan	37.113.000,00	53.364.500,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	176.000,00	51.010.125,00
Dinas Perikanan	0,00	250.000,00
Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	0,00	103.500,00
Persediaan Kertas dan Cover	494.800,00	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	117.000,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	157.800,00	0,00
Dinas Pertanian	220.000,00	
Jumlah	37.783.800,00	104.728.125,00

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu Investasi Permanen dan Investasi Non-Permanen. Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non-Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus tanpa ada niat untuk menjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan tidak berkelanjutan adalah



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat memperjualbelikan atau menarik kembali.

Tabel 108 Investasi Jangka Panjang TA 2022 dan 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Jumlah Investasi Permanen	41.358.358.789,21	38.728.667.471,21	6,79	2.629.691.318,00
Jumlah	41.358.358.789,21	38.728.667.471,21	6,79	2.629.691.318,00

5.3.1.2.1. Investasi Permanen

Investasi Permanen Kabupaten Pulang Pisau diberikan kepada beberapa Perusahaan Daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum, PT JAMKRIDA dan PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah. Investasi Permanen Kabupaten Pulang Pisau pada TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp41.358.358.789,21 dan Rp38.728.667.471,21 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 109 Rincian Investasi Permanen TA 2022 dan 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Penyertaan Modal PDAM	3.358.358.789,21	4.728.667.471,21	(28,98)	(1.370.308.682,00)
Penyertaan Modal Bank Kalteng	37.000.000.000,00	33.000.000.000,00	12,12	4.000.000.000,00
Penyertaan Modal JAMKRIDA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	41.358.358.789,21	38.728.667.471,21	6,79	2.629.691.318,00

5.3.1.2.1.1. Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum

Nilai penyertaan modal Perusahaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau pada Perusahaan Air Minum Daerah pada TA 2023 sebesar Rp3.358.358.789,21. Nilai tersebut adalah besaran nilai investasi yang telah disesuaikan dengan pencatatan neraca berdasarkan metode ekuitas dengan kepemilikan modal 100%. Besaran nilai investasi tersebut disesuaikan atas perhitungan laporan keuangan dari PDAM mulai tahun 2014 sampai dengan 2021 yang telah dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 110 Rincian Perhitungan Penyertaan Modal PDAM TA 2013 - 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Penanaman Modal dalam bentuk uang	14.250.000.000,00
	s/d 2013	2.250.000.000,00
	2014	1.000.000.000,00
	2015	1.000.000.000,00
	2016	1.000.000.000,00
	2017	1.000.000.000,00
	2018	1.000.000.000,00
	2019	3.000.000.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah
	2020	1.000.000.000,00
	2021	1.000.000.000,00
	2022	1.000.000.000,00
	2023	1.000.000.000,00
2	Penanaman Modal Dalam Bentuk Barang	14.543.958.294,00
	Hibah dari Kabupaten Induk	3.061.878.294,00
	2014	175.180.000,00
	2015	293.060.000,00
	2016	1.226.240.000,00
	2017	4.402.650.000,00
	2018	5.384.950.000,00
3	Penanaman Modal dalam bentuk Bahan Kimia	342.848.900,00
	s/d 2013	115.449.000,00
	2014	84.730.000,00
	2015	44.869.900,00
	2016	47.900.000,00
	2017	49.900.000,00
4	Jumlah Penanaman Modal	29.136.807.194,00
	Jumlah Laba/Rugi PDAM	-25.778.448.404,79
	s/d 2013	-5.194.622.505,00
	2014	-655.932.425,00
	2015	-1.431.486.370,80
	2016	-788.904.821,17
	2017	-1.310.987.611,77
	2018	-1.209.207.226,00
	2019	-1.553.432.214,05
	2020	-1.705.317.783,00
	2021	-6.882.461.466,00
	2022	-2.675.787.300,00
	2023	-2.370.308.682,00
	Jumlah Penanaman Modal (Bersih)	3.358.358.789,21

5.3.1.2.1.2. Penyertaan Modal Perusahaan Patungan

a) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah

Investasi Permanen Bank Pembangunan Kalimantan Tengah disajikan dengan perhitungan sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 111 Rincian Perhitungan Penyertaan Modal Kalimantan Tengah TA 2002 - 2023

Tahun Penyertaan	Jumlah Penyertaan Modal (Rp)	Jumlah Modal Yang Diterima Tahun Ini (Rp)	Jumlah Sisa Modal S/D Tahun Ini (Rp)
2002	100.000.000,00	-	100.000.000,00
2003	100.000.000,00	-	200.000.000,00
2004	150.000.000,00	-	350.000.000,00
2005	-	-	350.000.000,00
2006	1.000.000.000,00	-	1.350.000.000,00
2007	250.000.000,00	-	1.600.000.000,00
2008	750.000.000,00	-	2.350.000.000,00
2009	-	-	2.350.000.000,00
2010	1.250.000.000,00	-	3.600.000.000,00
2011	800.000.000,00	-	4.400.000.000,00
2012	1.000.000.000,00	-	5.400.000.000,00
2013	1.500.000.000,00	-	6.900.000.000,00
2014	3.000.000.000,00	-	9.900.000.000,00
2015	2.000.000.000,00	-	11.900.000.000,00
2016	10.000.000.000,00	-	21.900.000.000,00
2017	3.000.000.000,00	-	24.900.000.000,00
2018	-	-	24.900.000.000,00
2020	6.100.000.000,00	-	31.000.000.000,00
2021	1.000.000.000,00	-	32.000.000.000,00
2022	1.000.000.000,00	-	33.000.000.000,00
2023	4.000.000.000,00	-	37.000.000.000,00

Jadi total Investasi Permanen TA 2023 adalah sebesar Rp37.000.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau memiliki 3,30% saham atau sebesar 2.490 lembar saham Bank Pembangunan Kalimantan Tengah. Investasi pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dicatat dengan menggunakan metode biaya, dimana investasi dicatat sebesar penanaman modal, tidak dipengaruhi oleh hasil investasi.

b) PT Jamkrida

Investasi pada PT Jamkrida adalah sebesar Rp1.000.000.000,00, karena Kabupaten Pulang Pisau baru melakukan investasi pada tahun 2015 dan tidak ada investasi untuk TA 2022 ke PT Jamkrida. Kabupaten Pulang Pisau memiliki 100 lembar saham pada PT Jamkrida dimana sama seperti pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah investasi dicatat dengan menggunakan metode biaya.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pengujian Prosedur Analitis atas kesesuaian Penyertaan Modal Pengeluaran Pembiayaan (LRA) -Investasi (Neraca)

Hasil Pengujian Prosedur Analitis

Uraian	Audited
Penyertaan Modal pada Pengeluaran Pembiayaan (LRA) = Investasi Permanen Penyertaan Modal (Neraca) - Investasi Permanen Penyertaan Modal Tahun 20NN-1 (Neraca)	
Penyertaan Modal - Pengeluaran Pembiayaan Tahun Berjalan (LRA)	5.000.000.000,00
Investasi Permanen Penyertaan Modal Tahun Berjalan (Neraca)	41.358.358.789,21
Investasi Permanen Penyertaan Modal Tahun 20NN-1 (Neraca)	38.728.667.471,21
Selisih	2.370.308.682,00
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	2.370.308.682,00

Pada Pengujian Analitis atas kesesuaian antara Penyertaan Modal Pengeluaran Pembiayaan (LRA) - Investasi (Neraca) terdapat selisih sebesar Rp2.370.308.862,00 yang merupakan kerugian PDAM. Kerugian itu harus diakui sebagai pengurang investasi permanen karena Kabupaten Pulang Pisau menganut metode ekuitas untuk penilaian investasi permanen dan juga karena kepemilikan PDAM yang 100% sahamnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

5.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 112 Rincian Aset Tetap TA 2022 dan 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Tanah	117.405.340.049,57	116.697.951.642,58	0,61	707.388.406,99
Peralatan dan Mesin	415.280.394.249,14	377.099.341.764,80	10,12	38.181.052.484,34
Gedung dan Bangunan	1.283.770.035.221,23	1.139.238.295.676,28	12,69	144.531.739.544,95
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.430.730.296.145,46	3.181.449.638.509,63	7,84	249.280.657.635,83
Aset Tetap Lainnya	37.639.371.321,00	36.689.023.791,00	2,59	950.347.530,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	40.087.453.623,86	21.722.577.850,00	84,54	18.364.875.773,86
Akumulasi Penyusutan	(3.477.125.356.643,00)	(2.984.936.781.918,42)	16,49	(492.188.574.724,58)
Aset Tetap	1.847.787.533.967,26	1.887.960.047.315,87	(2,13)	(40.172.513.348,61)

Aset Tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 Bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Saldo aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.847.787.533.967,26 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp40.172.513.348,61. Berdasarkan data Aset Tetap di atas, rincian mutasi aset pada masing-masing jenis aset tetap tersaji pada **Lampiran 9.1 s.d. 9.6**

5.3.1.3.1. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, termasuk yang dipakai/dikelola entitas lainnya dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp117.405.340.049,57 dan Rp116.697.951.642,58 Perhitungan tambah kurang Aset Tetap Tanah disajikan dalam tabel berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 113 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Tanah TA 2022 dan 2023

Saldo awal Aset Tetap Tanah	116.697.951.642,58
Penambahan Aset Tetap Tanah:	838.588.406,99
Pengadaan Belanja Modal Tahun Berjalan	199.500.000,00
Mutasi antar SKPD	291.072.250,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap	276.246.157,00
Reklasifikasi Barang dan Jasa	71.769.999,99
Pengurangan Aset Tetap Tanah	131.200.000,00
Mutasi antar SKPD	41.600.000,00
Hibah Tanah	89.600.000,00
Saldo Akhir Aset Tetap Tanah	117.405.340.049,57

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa terdapat penambahan Aset Tetap Tanah dengan rincian berikut ini.

- 1) Belanja Modal Tanah sebesar Rp199.500.000,00 pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan;
- 2) Mutasi Tanah sebesar Rp291.072.250,00 dimana merupakan mutasi dari DPUPR ke Dinas Pendidikan sebesar Rp249.472.250,00 berupa tanah urug yang berasal dari belanja modal gedung dan bangunan, mutasi dari dinas pertanian ke satpol PP sebesar Rp18.720.000,00, dan ke Dinas Perpustakaan dan kearsipan sebesar Rp22.880.000,00
- 3) Reklasifikasi Aset Tetap sebesar Rp276.246.157,00 merupakan reklasifikasi yang terdapat pada SKPD Badan Kesbangpolinmas dari aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp94.350.000,00 dan Dinas Sosial berupa penimbunan sebesar Rp181.896.157,00.
- 4) Reklasifikasi dari Barang dan Jasa ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp71.769.999,99 di Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan berupa perencanaan dan pengawasan.

Pengurangan Aset Tetap Tanah terjadi karena beberapa hal berikut ini :

- 1) Hibah tanah dari BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau ke kantor Samsat dan UPT KPHP sebesar Rp89.600.000,00; dan
- 2) Mutasi tanah dari Dinas Pertanian ke Satpol PP dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp 41.600.000,00.

Rincian nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

Tabel 114 Rincian Aset Tetap Tanah per SKPD TA 2022 dan 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	15.592.933.620,00	15.343.461.370,00
Dinas Kesehatan	2.567.963.242,25	2.567.963.242,25



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Rumah Sakit Umum Daerah	434.199.250,00	434.199.250,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.946.996.083,33	65.946.996.083,33
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	389.030.499,99	117.760.500,00
Satuan Polisi Pamong Praja	118.374.000,00	
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	18.720.000,00	24.024.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	231.123.907,00	53.958.571,00
Dinas Sosial	53.958.571,00	49.227.750,00
Dinas Ketahanan Pangan	142.742.000,00	142.742.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	117.782.500,00	117.782.500,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	69.382.750,00	69.382.750,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	55.317.800,00	55.317.800,00
Dinas Perhubungan	688.900.550,00	688.900.550,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.910.900,00	10.910.900,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	26.150.000,00	26.150.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22.880.000,00	
Dinas Perikanan	142.379.650,00	142.379.650,00
Dinas Pertanian	2.240.995.700,00	2.282.595.700,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	119.703.475,00	119.703.475,00
Sekretariat Daerah	8.653.110.830,00	8.653.110.830,00
Sekretariat DPRD	713.300.000,00	713.300.000,00
Kecamatan Kahayan Hilir	748.200.000,00	748.200.000,00
Kecamatan Jabiren Raya	75.000.000,00	75.000.000,00
Kecamatan Maluku	71.625.000,00	71.625.000,00
Kecamatan Pandih Batu	132.500.000,00	132.500.000,00
Kecamatan Kahayan Kuala	780.000.000,00	780.000.000,00
Kecamatan Sebangau Kuala	41.250.000,00	41.250.000,00
Kecamatan Kahayan Tengah	160.800.000,00	160.800.000,00
Kecamatan Banama Tingang	44.500.000,00	44.500.000,00
Inspektorat Daerah	28.600.000,00	28.600.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	476.085.000,00	476.085.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16.489.924.721,00	16.579.524.721,00
Jumlah	117.405.340.049,57	116.697.951.642,58

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah berupaya mengamankan Aset Tetap serta memperkuat bukti kepemilikan sebagai dasar pencatatan dalam Neraca. Upaya sertifikasi tanah akan terus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan prioritas pembangunan di lingkungan Kabupaten Pulang Pisau. Sehingga nilai saldo akhir Aset Tetap Tanah yang tercatat pada Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp117.405.340.049,57.

Terdapat sengketa tanah yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan pihak keluarga dari Hj. Siti Aisyah, S.Pdi bertindak sebagai wakil dari ahli waris H.Jami'an, S.Ag. M.Si, dimana penggugat mengajukan gugatan atas tanah seluas 7,5 Ha yang berkedudukan di Handel Sosial RT.VIII Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Pada tanah tersebut telah dibangun gedung pemerintah yaitu kompleks Rumah Sakit Umum Daerah, Mushola Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Isi gugatan tersebut adalah penggugat meminta ganti kerugian sebesar Rp250.000,00 per meter persegi. Berdasarkan pada putusan Pengadilan Pulang Pisau Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pps dimana diputuskan untuk mengabulkan eksepsi tergugat dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau juga memperoleh hibah tanah dari masyarakat yang dibawah penguasaan Dinas Kesehatan berikut ini:

Tabel 115 Daftar Tanah Hibah Dinas Kesehatan TA 2023

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan
				Hak	Sertifikat		
					Tanggal	Nomor	
1	2	5	7	8	9	10	11
1	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	299,00	Desa Sei Baru Tewu	Hak Pakai	28/11/2017	15.09.04.11.00952 P 3	Pustu Sei Baru Tewu
2	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	618,00	Jl Lintas Kalimantan Desa Gohong	Hak Pakai	30/08/2019	15.09.03.070065 P 00020	Pustu Gohong
3	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	146,00	Desa Pangkoh Hulu	Hak Pakai	14/12/2020	15.09.05.10.00852 P 00012	Pustu Palambahen
4	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1.282,00	Desa Kantan Dalam	Hak Pakai	08/12/2020	15.09.05.13.00034 P 00010	Poskesdes Kantan Dalam
5	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1.042,00	Desa Goha	Hak Pakai	16/09/2019	15.09.01.10.00094 P 00003	Pustu Goha
6	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	288,00	Desa Kasali Baru		15/07/2023		Pustu Kasali Baru
7	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	297,00	Desa Lawang Uru		09/08/2021		Pustu Lawang Uru
8	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	600,00	Desa Ramang		20/07/2023		Pustu Ramang



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Kedelapan petak tanah ini masih belum dilakukan penilaian dan juga dari 8 petak tanah tersebut 5 diantaranya telah lakukan sertifikasi, sedangkan 3 petak tanah masih dalam proses sertifikasi. Tanah tersebut belum dilakukan penilaian, hal itu disebabkan karena keterbatasan personil dimana Kabupaten Pulang Pisau tidak memiliki Penilai Aset, sehingga harus menggunakan jasa pihak lain.

Pemerintah kabupaten pulang pisau juga mendapatkan hibah tanah pada dermaga yang telah di nilai berdasarkan NJOP sebesar Rp7.952.700,00. Tanah tersebut tidak dicatat dalam Aset Tetap tanah karena akan dihibahkan ke Kementerian Perhubungan, dan sementara dicatat sebagai persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga Dinas Perhubungan.

Berikut Pengujian Prosedur Analitis kesesuaian Belanja Modal Tanah (LRA) dan Aset Tetap Tanah

Hasil Pengujian Prosedur Analitis kesesuaian Belanja Modal Tanah (LRA) dan Aset Tetap Tanah

Belanja Modal Tanah (LRA) = Aset Tetap Tanah Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Tetap Tanah Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Berjalan (LRA)		199.500.000,00
Penambahan (Penurunan)		
Aset Tetap Tanah Tahun Berjalan (Neraca)		117.405.340.049,57
Aset Tetap Tanah 20NN - 1 (Neraca)		116.697.951.642,58
Selisih		507.888.406,99
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)		507.888.406,99

Rincian Selisih PA Belanja Modal Tanah (LRA)-Aset Tetap Tanah (Neraca)

Terdapat selisih sebesar Rp507.888.406,99 yang terdiri atas:

Penambahan Aset Tetap Tanah:	639.088.406,99
Mutasi antar SKPD	291.072.250,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap	276.246.157,00
Reklasifikasi Barang dan Jasa	71.769.999,99
Pengurangan Aset Tetap Tanah	131.200.000,00
Mutasi antar SKPD	41.600.000,00
Hibah Tanah	89.600.000,00
Total Selisih	507.888.406,99

Penjelasan atas Selisih PA Aset Tetap Tanah tersebut telah dijelaskan pada penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah selain belanja modal pada penjelasan mutasi Aset Tetap Tanah atau bisa dilihat pada **Lampiran 9.1**.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp300.000,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp415.280.394.249,14 dan Rp377.099.341.764,80. Perhitungan tambah kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 116 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2023

Saldo awal	377.099.341.764,80
Penambahan:	41.063.643.066,56
Belanja Modal Tahun Berjalan	33.351.898.507,56
Reklasifikasi dari barang dan jasa	310.372.150,00
Mutasi antar SKPD	256.790.000,00
Terima Hibah dari pihak lain/Masyarakat	5.642.640.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap yang lain	1.501.942.409,00
Pengurangan:	2.882.590.582,22
Ekstrakomtabel	124.185.521,22
Hibah barang	616.702.700,00
Mutasi antar SKPD	256.790.000,00
Penghapusan	51.431.500,00
Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa	487.922.331,00
Reklasifikasi antar belanja modal	1.345.558.530,00
Saldo Akhir	415.280.394.249,14

Sebagaimana tabel diatas penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 berasal dari:

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 terdapat pada SKPD berikut.

Tabel 117 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD TA 2023

No	Daftar SKPD	Belanja Modal 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	4.910.000.575,90
2	Dinas Kesehatan	5.474.678.630,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	8.352.815.302,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.552.940.900,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	344.293.900,00
6	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	64.900.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Daftar SKPD	Belanja Modal 2023 (Rp)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	256.500.000,00
8	Dinas Sosial	166.512.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	158.654.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	352.892.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	258.092.500,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	148.480.204,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	285.210.564,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	311.625.000,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	516.340.850,00
16	Dinas Perhubungan	121.298.100,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	126.925.500,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	540.337.610,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	20.450.000,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	420.630.700,00
21	Dinas Perikanan	381.173.000,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	326.885.000,00
23	Dinas Pertanian	1.803.207.514,00
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	283.881.242,00
25	Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	2.516.577.000,00
26	Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau	960.473.692,66
27	Kecamatan Kahayan Hilir	45.277.000,00
28	Kecamatan Jabiren Raya	92.300.000,00
29	Kecamatan Maliku	80.400.000,00
30	Kecamatan Pandih Batu	112.501.500,00
31	Kecamatan Kahayan Kuala	90.882.285,00
32	Kecamatan Sebangau Kuala	85.612.438,00
33	Kecamatan Kahayan Tengah	59.307.000,00
34	Kecamatan Banama Tingang	63.000.000,00
35	Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	245.698.500,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.850.000,00
37	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	156.224.000,00
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	662.070.000,00
	Jumlah	33.351.898.507,56



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 2) Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa sebesar Rp310.372.150,00 terdapat pada SKPD berikut.

Tabel 118 Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
Dinas Pendidikan	mencatat reklasifikasi dari belanja pemeliharaan gedung ke alat rumah tangga	51.982.500,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Reklasifikasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor ke Aset tetap peralatan dan mesin	199.766.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	reklas dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik ke aset tetap peralatan dan mesin berupa stafol	49.800.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	Reklas Belanja Printer dari belanja barang dan jasa	7.866.250,00
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Reklas Barang Jasa ke Belanja Modal	957.400,00
Jumlah		310.372.150,00

- 3) Mutasi antar SKPD Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp256.790.000,00 terdapat pada SKPD berikut.

Tabel 119 Rincian Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar SKPD TA 2023

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	mutasi aset tetap kendaraan roda IV berdasarkan Keputusan Pengelola Barang No. 30 Tahun 2023 Tagl 23 November 2023	239.750.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mutasi masuk aset tetap sepeda motor dari BPPKAD sesuai SK No. 28 Tahun 2023 Tanggal 2 Npvenber 2023	15.840.000,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Mutasi Aset dari BPPKAD ke Dispora atas Peralatan dan Mesin - Stopwatch	1.200.000,00
Jumlah		256.790.000,00

- 4) Terima hibah yang berasal dari instansi vertikal dan pihak swasta yang terdapat pada SKPD berikut.

Tabel 120 Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Hibah TA 2023

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
Rumah Sakit Umum Daerah	Diterima hibah dari Kemenkes berupa alat kesehatan anthropometri Kit berdasarkan NPH nomor KN.02.07/B.1/2023	821.600.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Hibah dari dari BMN berupa alat kesehatan berdasarkan NPH nomor KN.02.07/1.3/13254/2023	224.400.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
Rumah Sakit Umum Daerah	Hibah dari dari BMN berupa alat kesehatan berdasarkan NPH nomor KN.02.07/1.3/13254/2023	3.019.500.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Hibah barang berupa peralatan PUSDALOPS dari BNPB dengan nomor surat 12/BNPB/SU/RT.03.03/07/2022	114.405.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	terima hibah barang berupa peralatan PUSDALOPS dari BNPB dengan nomor surat 12/BNPB/SU/RT.03.03/07/2022	263.445.000,00
Dinas Perhubungan	Hibah berupa bus dari kementrian perhubungan berdasarkan BAST Nomor 550/220/DISHUB-PP/VIII/2022, PL.301/04/13/AJ/UM/2022	518.590.000,00
Dinas Perhubungan	Hibah berupa kendaraan mini bus dari Kemertrian perhubungan berdasarkan BAST Nomor 550/02/BAST-BMN/DISHUB-PP/X/2022, PL.301/07/13/AJ/X/2022	663.000.000,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hibah MTQ berupa laptop berdasarkan surat Nomor 032/453/setda.UM/XII/2020	17.700.000,00
Jumlah		5.642.640.000,00

- 5) Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.501.942.409,00 terdapat pada SKPD berikut.

Tabel 121 Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2023

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
Rumah Sakit Umum Daerah	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan mesin berupa peralatan dan perabot gedung manajemen RSUD Pulang Pisau	1.167.200.409,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Reklasifikasi Belanja modal Instalasi Air Kotor Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	199.578.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	reklasifikasi dari Aset Tetap JIJ berupa Pemasangan dan Penambahan Jaringan LAN/ Telepon 2023 ke KIB B	124.764.000,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	rekas Drone dari KIB E ke B	10.400.000,00
Jumlah		1.501.942.409,00

Sedangkan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin disebabkan oleh beberapa hal berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)
Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 1) Ekstrakomtabel sebesar Rp124.185.521,22 terdapat pada SKPD berikut.

Tabel 122 Rincian Ekstrakomtabel Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2023

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
Dinas Pendidikan	mencatat ekstrakomtabel	87.119.000,00
Dinas Kesehatan	mencatat ekstrakomtabel	19.251.354,00
Rumah Sakit Umum Daerah	mencatat ekstrakomtabel	15.540.000,00
Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau	mencatat ekstrakomtabel	2.025.167,22
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	mencatat ekstrakomtabel	250.000,00
Jumlah		124.185.521,22

- 2) Hibah sepeda motor pada SKPD Kecamatan Kahayan Tengah sebesar Rp616.702.700,00;

Tabel 123 Rincian Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2023

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
Dinas Pendidikan	mencatat hibah barang dari Dinas Pendidikan ke TK Swasta	64.060.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	hibah kendaraan bermotor ke POLRES Pulang Pisau 8 Unit dan ke Kodim sebanyak 4 Unit	418.642.200,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	hibah mobil ke Muhammadiyah berdasarkan SK nomor 21 Tahun 2023 tentang penghapusan BMD dari daftar barang pengguna	134.000.000,00
Jumlah		616.702.700,00

- 3) Mutasi antar SKPD Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 256.790.000,00 terdapat pada SKPD berikut.

Tabel 124 Rincian Mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar SKPD TA 2023

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Mutasi keluar aset tetap kendaraan bermotor penumpang ke Disnaker sesuai Keputusan No. 30 Tahun 2023 tgl 23 November 2023	239.750.000,00
BPPKAD	Mutasi kendaraan R2 Ke DPMD berdasarkan BA Mutasi Aset Nomor 28 Tahun 2023	15.840.000,00
BPPKAD	mutasi aset tetap berupa alat musik pengadaan MTQ ke DISPORA	1.200.000,00
Jumlah		256.790.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 4) Penghapusan aset sepeda motor sesuai SK No. 07 Tahun 2023 Tanggal 29 Mei 2023 terdapat pada SKPD Kesbangpol Linmas sebesar Rp24.781.500,00 dan dobel catat atas kendaraan bermotor yang ditemukan saat dilakukan absen kendaraan dimana kendaraan tersebut telah tercatat di Sekretariat Daerah sebesar Rp26.650.000,00
- 5) Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp487.922.331,00 terdapat pada SKPD berikut.

Tabel 125 Rincian Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Belanja Barang dan Jasa TA 2023

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
Dinas Pendidikan	reklasifikasi dari Aset Tetap peralatan dan mesin ke beban barang dan jasa	14.970.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	reklas dari B ke barang dan jasa Pengadaan Alat Kantor Lainnya - Pembuatan Papan Akrilik Informasi sesuai surat perintah kerja no. 521/SPK/RSUD-PP/XI/2023	169.119.600,00
Rumah Sakit Umum Daerah	reklas aset tetap peralatan dan mesin berupa tempat sampah ke akun persediaan	107.822.980,20
Rumah Sakit Umum Daerah	jurnal penyesuaian reklas aset tetap peralatan dan mesin berupa tempat sampah beban barang dan jasa	41.583.019,80
Rumah Sakit Umum Daerah	reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke beban obat-obatan berupa perlengkapan laboratorium	65.650.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	mencatat reklasifikasi barang pakai habis yang tercatat di aset tetap karena berasal dari belanja modal	18.892.255,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	reklasifikasi dari belanja modal ke barang dan jasa berupa bahan pakai habis beban pemeliharaan pengolahan tanaman	1.132.200,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	reklasifikasi dari belanja modal ke barang dan jasa berupa bahan pakai habis beban pemeliharaan pengolahan tanaman	9.852.800,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	reklasifikasi dari belanja modal ke barang dan jasa berupa bahan pakai habis beban pemeliharaan pengolahan tanaman	6.993.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	reklasifikasi dari belanja modal ke barang dan jasa berupa bahan pakai habis beban pemeliharaan pengolahan tanaman	3.352.500,00
Dinas Sosial	Mencatat reklas dari kib B ke lanja barang jasa berupa panci	150.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Reklas aset tetap alat rumah tangga alat dapur ke persediaan	21.293.976,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	reklas dari aset tetap alat peraga ke beban barang diserahkan ke masyarakat (peserta pelatihan)	13.980.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
Dinas Perhubungan	Mencatat reklas dari belanja modal ke belanja barang jasa berupa rambu-rambu lalu lintas	4.000.000,00
Kecamatan Kahayan Hilir	Reklas aset tetap KIB B Lampu hias/Lampu Hias Gantung (Lampu Taman) ke persediaan	1.530.000,00
Kecamatan Kahayan Tengah	Reklas persediaan bahan pembersih	7.600.000,00
Jumlah		487.922.331,00

- 6) Reklasifikasi antar Aset Tetap terdapat pada SOPD Sekretariat Daerah sebesar Rp1.345.558.530,00, yang merupakan reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya berupa lukisan.

Tabel 126 Rincian Reklasifikasi Antar Aset Tetap TA 2023

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
Dinas Pendidikan	reklasifikasi buku yang belanjanya melalui belanja modal peralatan dan mesin ke aset tetap lainnya	897.235.030,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Jalan Irigasi Jaringan berupa sumur bor desa Sei Bakau dan Sei Hambawang	399.650.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	reklasifikasi aset tetap Baliho ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	22.200.000,00
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	reklas dari peralatan dan mesin berupa dekorasi dinding lukisan	26.473.500,00
Jumlah		1.345.558.530,00

Rincian nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

Tabel 127 Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD TA 2022 dan 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	70.463.672.296,90	66.565.073.751,00
Dinas Kesehatan	63.391.494.537,01	57.114.467.261,01
Rumah Sakit Umum Daerah	69.634.810.827,44	56.715.594.971,44
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27.291.587.317,75	25.159.626.917,75
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.841.857.632,20	2.497.563.732,20
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.570.213.525,00	1.556.745.025,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.842.289.482,00	1.585.789.482,00
Dinas Sosial	2.383.988.401,67	2.217.626.401,67
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.039.214.841,00	10.921.353.041,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.684.360.261,33	1.126.992.237,33



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.755.054.359,00	4.496.961.859,00
Dinas Ketahanan Pangan	4.059.562.284,00	3.903.215.830,00
Dinas Lingkungan Hidup	7.038.348.988,00	6.775.338.424,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.588.565.393,20	4.276.940.393,20
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.886.514.424,00	2.354.333.574,00
Dinas Perhubungan	9.481.643.743,00	8.182.755.643,00
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	2.719.198.461,00	2.591.315.561,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.224.430.640,00	3.684.093.030,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.881.475.975,00	1.859.825.975,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.417.669.930,00	2.236.789.230,00
Dinas Perikanan	7.804.775.811,00	7.423.602.811,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.458.819.028,00	1.132.184.028,00
Dinas Pertanian	20.053.318.347,00	18.250.110.833,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.120.113.817,00	3.836.232.575,00
Sekretariat Daerah	41.294.677.888,44	38.804.574.388,44
Sekretariat DPRD	13.613.404.930,44	12.654.956.405,00
Kecamatan Kahayan Hilir	1.827.652.979,00	1.783.905.979,00
Kecamatan Jabiren Raya	704.785.150,00	612.485.150,00
Kecamatan Maluku	871.984.527,78	791.584.527,78
Kecamatan Pandih Batu	690.618.301,00	578.116.801,00
Kecamatan Kahayan Kuala	922.587.113,00	831.704.828,00
Kecamatan Sebangau Kuala	656.562.138,00	570.949.700,00
Kecamatan Kahayan Tengah	774.962.725,00	723.255.725,00
Kecamatan Banama Tingang	520.575.000,00	457.575.000,00
Inspektorat Daerah	2.587.571.141,00	2.341.872.641,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.132.259.688,00	5.129.409.688,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.258.238.844,98	13.224.954.844,98
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.791.533.500,00	2.129.463.500,00
Jumlah	415.280.394.249,14	377.099.341.764,80



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pengujian Prosedur Analitis atas Kesesuaian Belanja Modal Peralatan dan Mesin (LRA) dan Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Neraca)

Hasil Pengujian Prosedur Analitis

Uraian	Audited
<i>Belanja Modal Peralatan & Mesin (LRA) = Aset Tetap Peralatan & Mesin Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Tetap Peralatan & Mesin Tahun 20NN-1 (Neraca)</i>	
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LRA)	33.351.898.507,56
Penambahan/(Penurunan)	
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca)	415.280.394.249,14
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 20NN-1 (Neraca)	377.099.341.764,80
Selisih	4.829.153.976,78
<i>Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)</i>	4.829.153.976,78

Hasil pengujian PA Kesesuaian Belanja Modal Peralatan dan Mesin (LRA) dan Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Neraca) menunjukkan adanya selisih sebesar Rp4.829.153.976,78, yang terinci berikut ini.

Penambahan:	7.711.744.559,00
Reklasifikasi dari barang dan jasa	310.372.150,00
Mutasi antar SKPD	256.790.000,00
Terima Hibah dari pihak lain/Masyarakat	5.642.640.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap yang lain	1.501.942.409,00
Pengurangan:	2.882.590.582,22
Ekstrakomtabel	124.185.521,22
Hibah barang	616.702.700,00
Mutasi antar SKPD	256.790.000,00
Penghapusan	51.431.500,00
Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa	487.922.331,00
Reklasifikasi antar belanja modal	1.345.558.530,00
Saldo Akhir	4.829.153.976,78

Penjelasan atas Selisih PA Aset Tetap Peralatan dan Mesin tersebut telah dijelaskan pada penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan Mesin selain belanja modal pada penjelasan mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin atau bisa dilihat pada **Lampiran 9.2.**

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Batas kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp20.000.000,00 dengan masa manfaat selama 20 tahun dan disusutkan dengan metode penyusutan garis lurus. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.283.770.035.221,23 dan Rp1.139.238.295.676,28. Perhitungan tambah kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 128 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2023

Saldo awal	1.139.238.295.676,28
Penambahan:	188.519.253.400,55
Belanja Modal Tahun Berjalan	108.424.624.137,36
Reklasifikasi Barang dan Jasa ke Aset Tetap	12.077.242.093,96
Hibah	30.291.064.000,00
Mutasi antar SKPD	36.940.319.169,23
Reklasifikasi	786.004.000,00
Pengurangan:	43.987.513.855,60
Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa	3.442.874.481,00
Mutasi antar SKPD	31.479.463.343,60
Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	8.424.726.856,00
Ekstrakomtabel	640.449.175,00
Saldo Akhir	1.283.770.035.221,23

Sebagaimana tabel di atas penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan disebabkan oleh beberapa hal berikut.

- 1) Pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp108.424.624.137,36 yang terdapat pada SKPD berikut.

Tabel 129 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023

Daftar SKPD	Belanja Modal 2023 (Rp)
Dinas Pendidikan	8.405.805.000,00
Dinas Kesehatan	2.403.483.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	34.259.900.600,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55.511.090.561,60
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	493.500.000,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	94.350.000,00
Dinas Sosial	174.553.507,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	228.347.332,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	792.906.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	497.600.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	170.500.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	484.699.604,91
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	50.750.000,00
Dinas Pertanian	3.468.274.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	79.488.934,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Daftar SKPD	Belanja Modal 2023 (Rp)
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	159.548.000,00
Kecamatan Banama Tingang	48.000.000,00
Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	990.061.097,85
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	111.766.500,00
Jumlah	108.424.624.137,36

2) Reklasifikasi dari beban barang dan jasa.

Reklasifikasi dari beban Barang dan Jasa berupa jasa konsultasi konstruksi.

Tabel 130 Rincian Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Daftar SKPD	Belanja Jasa Konsultasi
Dinas Pendidikan	7.078.421.320,00
Dinas Kesehatan	241.157.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	2.820.843.100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.269.027.900,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	20.997.000,00
Dinas Sosial	103.068.221,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	93.500.487,98
Dinas Lingkungan Hidup	49.090.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.945.999,98
Dinas Pertanian	162.898.600,00
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	217.292.465,00
total	12.077.242.093,96

3) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari Hibah Dermaga Sungai Patanak sebesar Rp30.291.064.000,00 dari kementerian Perhubungan berdasarkan BA Nomor HK 201/26/12/DJPD/2023.

4) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari mutasi antar SKPD sebesar Rp36.940.319.169,23 terdapat pada SKPD berikut.

Tabel 131 Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari Mutasi antar SKPD

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
Dinas Pendidikan	Mutasi tambah Dinas Pendidikan dari DPUPR berupa gedung-gedung sekolah	26.173.962.841,60
Rumah Sakit Umum Daerah	Mutasi siring depan RSUD ke RSUD	497.091.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Mutasi belanja pemeliharaan dari sekretariat daerah ke DPUPR	2.949.743.095,63
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	mencatat mutasi dari BPBD ke DPUPR berupa rehabilitasi Rujab Kalaksa	138.647.332,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mutasi Aset Tetap dari PUPR berupa Penataan Halaman Kantor berdasarkan BAST Pengalihan/Mutasi Barang Milik Daerah Nomor 600/752/DPU-PR/XII/2023	294.753.000,00
Dinas Pertanian	Mutasi aset tetap gedung bangunan dari DPUPR berupa pemasangan paving kantor BPP Kec. Sebangau Kuala	99.945.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Mutasi Aset Masuk dari PUPR lanjutan pembangunan pasar Desa Maliku Baru Kec. Maliku	686.440.000,00
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	mutasi aset tetap berupa gedung dharma wanita dari PUPR ke Setda	110.710.000,00
Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau	mutasi aset tetap berupa bangunan gedung milik setwan yang digunakan oleh disbudpar	348.896.000,00
Kecamatan Kahayan Hilir	Mutasi aset gedung bangunan dari DPUPR ke Kec. Kahayan Hilir (penataan halaman kantor Kecamatan)	199.524.900,00
Kecamatan Pandih Batu	Mutasi Aset Tetap Bangunan Gedung dan Bangunan (Pembangunan Kantor dan Penataan Halaman Kantor) dari PUPR ke Kec. Pandih Batu sesuai BAST Mutasi BMD Nomor: 600/759/DPU-PR/XII/2023	4.941.944.000,00
Kecamatan Banama Tingang	Mutasi Aset dari PUPR berupa Pagar Kantor berdasarkan BAST Mutasi Barang Milik Daerah Nomor 600/757/DPU-PR/XII/2023	498.662.000,00
Jumlah		36.940.319.169,23

- 5) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari reklasifikasi terdapat pada SKPD berikut.

**Tabel 132 Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
berasal dari Mutasi antar SKPD**

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
Rumah Sakit Umum Daerah	Reklas dari Aset Tetap JIJ ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa drainase lingkungan RSUD	398.379.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Mencatat reklasifikasi dari Aset Tetap JIJ ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Pelabuhan Penyebrangan Bawan	188.125.000,00
Sekretariat DPRD	Reklasifikasi dari persediaan barang diserahkan ke masyarakat dari DPUPR ke Sekretariat DPRD berupa Pembangunan Ruang Sidang DPRD lama	199.500.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah	786.004.000,00
---------------	-----------------------

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:

- 1) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang disebabkan oleh reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa terdapat pada SKPD berikut ini.

Tabel 133 Rincian Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Beban Barang dan Jasa

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
Rumah Sakit Umum Daerah	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan bangunan ke Aset Tetap JIJ berupa reservoir dan saluran drainase (Bronjong)	1.350.914.497,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Mencatat reklas ke Beban Barang diserahkan ke Pihak Ketiga berupa pembangunan yang ditujukan untuk Desa.	1.961.721.050,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan berupa kamar mandi di Taman Sumbu Kurung	50.750.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Reklasifikasi menara air ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	79.488.934,00
Jumlah		3.442.874.481,00

- 2) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena adanya mutasi antar SKPD terdapat pada SKPD berikut ini.

Tabel 134 Rincian Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Beban Barang dan Jasa

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Mutasi Aset tetap Gedung dan Bangunan dari DPUPR ke Sekretariat Daerah	99.750.000,00
	Mutasi Aset tetap Gedung dan Bangunan dari DPUPR ke Dinas Pendidikan	24.174.357.011,60
	Mutasi Aset tetap Gedung dan Bangunan dari DPUPR ke BPBD	274.503.000,00
	Mutasi Aset tetap Gedung dan Bangunan dari DPUPR ke Kecamatan Pandih Batu	4.698.944.000,00
	Mutasi Aset tetap Gedung dan Bangunan dari DPUPR ke Kecamatan Kahayan Hilir	180.375.000,00
	Mutasi Aset tetap Gedung dan Bangunan dari DPUPR ke Kecamatan Banama Tingang	433.344.000,00
	Mutasi Aset tetap Gedung dan Bangunan dari DPUPR ke Sekretariat DPRD	308.247.000,00
	Mutasi Aset tetap Gedung dan Bangunan dari DPUPR ke DISPERINDAGKOP	612.700.000,00
	Mutasi Aset tetap Gedung dan Bangunan dari DPUPR ke Dinas Pertanian	88.955.000,00
	Mutasi Aset tetap Gedung dan Bangunan dari DPUPR ke RSUD	469.641.000,00
	Total Mutasi	Rp31.340.816.011,6
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mutasi aset tetap dari BPBD berupa rehab rumah dinas kepala Pelaksana BPBD ke DPUPR	138.647.332,00
Jumlah		31.479.463.343,60



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 3) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp8.424.726.856,00 pada SKPD berikut ini.

Tabel 135 Rincian Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Aset tetap disdik dari aset gedung ke Aset JIJ	1.134.948.440,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan Ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa peralatan dan Perabot gedung Manajemen RSUD	1.167.200.409,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Reklasifikasi dari dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Ke KDP	2.932.327.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	mencatat reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap JIJ	2.921.347.000,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Reklas Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Penataan Halaman Gedung Kantor ke Aset Tetap Tanah	94.350.000,00
Dinas Sosial	Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset tetap Tanah berupa penimbunan Tanah	174.553.507,00
Jumlah		8.424.726.856,00

- 4) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena masuk ke kategori Ekstrakomtabel terdapat pada SKPD berikut ini:

Tabel 136 Rincian Ekstrakomtabel Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
Dinas Pendidikan	Ekstrakomtabel	471.366.575,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Ekstrakomtabel	9.900.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ekstrakomtabel	4.800.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ekstrakomtabel	3.899.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ekstrakomtabel	8.750.000,00
Dinas Pertanian	Ekstrakomtabel	59.475.600,00
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	Ekstrakomtabel	82.258.000,00
Jumlah		640.449.175,00

Rincian nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

Tabel 137 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per SKPD TA 2023

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	346.922.899.763,60	306.871.025.617,00
2	Dinas Kesehatan	144.070.816.386,46	141.426.176.386,46
3	Rumah Sakit Umum Daerah	124.520.941.525,01	89.072.742.731,01
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	325.652.605.063,11	304.756.982.735,48



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.631.172.000,00	4.116.675.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2.321.715.200,00	2.321.715.200,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	1.217.261.459,00	1.217.261.459,00
8	Dinas Sosial	7.940.666.221,00	7.837.598.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.010.921.000,00	4.626.468.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.776.967.000,00	2.776.967.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.605.889.887,98	6.719.483.400,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	5.282.458.000,00	4.784.858.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	7.567.598.357,00	7.348.008.357,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.609.304.950,00	6.613.203.950,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.118.130.304,89	5.621.234.700,00
16	Dinas Perhubungan	42.784.549.830,00	12.493.485.830,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	917.606.501,00	917.606.501,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.040.559.670,00	5.040.559.670,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.966.138.000,00	1.966.138.000,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.797.590.000,00	5.797.590.000,00
21	Dinas Perikanan	13.555.593.714,00	13.555.593.714,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.643.495.804,00	2.643.495.804,00
23	Dinas Pertanian	30.062.157.756,70	26.390.515.756,70
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	36.389.073.464,49	35.702.633.464,49
25	Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	66.996.521.707,00	66.793.906.892,00
26	Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau	16.098.000.010,00	15.549.604.010,00
27	Kecamatan Kahayan Hilir	4.137.806.400,00	3.938.281.500,00
28	Kecamatan Jabiren Raya	1.381.263.000,00	1.381.263.000,00
29	Kecamatan Maluku	1.981.060.000,00	1.981.060.000,00
30	Kecamatan Pandih Batu	7.210.905.500,00	2.268.961.500,00
31	Kecamatan Kahayan Kuala	2.003.817.000,00	2.003.817.000,00
32	Kecamatan Sebangau Kuala	1.343.417.200,00	1.343.417.200,00
33	Kecamatan Kahayan Tengah	1.354.393.000,00	1.354.393.000,00
34	Kecamatan Banama Tingang	2.888.709.853,00	2.342.047.853,00
35	Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	5.427.111.327,85	4.234.372.580,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	16.080.363.599,00	16.080.363.599,00
37	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.912.237.016,14	14.912.237.016,14
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.548.317.750,00	4.436.551.250,00
	Jumlah	1.283.770.035.221,23	1.139.238.295.676,28



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Pembuatan Taman Wisata Rohani Desa Tangkahan Kec. Banama Tingang sesuai Kontrak Nomor : 600/20/DPUPR-TR/KTR/VII/2023 Tanggal 21 Juli 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.948.380.000,00 yang mana telah dilakukan pencairan dana sebesar Rp2.226.771.000,00 dan telah diakui utang sebesar Rp2.721.609.000,00, akan tetapi pada 31 Desember 2023 ternyata Taman Wisata Rohani Desa Tangkahan ini secara fisik belum mencapai 100%, sehingga masih dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Hasil Pengujian Prosedur Analitis atas Kesesuaian Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Hasil Pengujian Prosedur Analitis

Uraian	Audited
<i>Belanja Modal Gedung & Bangunan (LRA) = Aset Tetap Gedung & Bangunan Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Tetap Gedung & Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca)</i>	
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LRA)	108.424.624.137,36
Penambahan/(Penurunan)	
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca)	1.283.770.035.221,23
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca)	1.139.238.295.676,28
Selisih	36.107.115.407,59
<i>Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)</i>	
	36.107.115.407,59

Hasil pengujian PA Kesesuaian Belanja Modal Gedung dan Bangunan (LRA) dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Neraca) menunjukkan adanya selisih sebesar Rp36.107.115.407,59 yang terinci berikut ini.

Penambahan:	80.094.629.263,19
Reklasifikasi Barang dan Jasa ke Aset Tetap	12.077.242.093,96
Hibah	30.291.064.000,00
Mutasi antar SKPD	36.940.319.169,23
Reklasifikasi	786.004.000,00
Pengurangan:	43.987.513.855,60
Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa	3.442.874.481,00
Mutasi antar SKPD	31.479.463.343,60
Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	8.424.726.856,00
Ekstrakomtabel	640.449.175,00
Saldo Akhir	36.107.115.407,59

Penjelasan atas Selisih PA Aset Tetap Gedung dan Bangunan tersebut telah dijelaskan pada penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan selain Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada penjelasan mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan di atas atau bisa dilihat pada **Lampiran 9.3**.

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdiri dari nilai jalan dan



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

jembatan, bangunan dan irigasi (bangunan air irigasi, bangunan air pasang surut, bangunan pengamanan sungai dan penanggulangan bencana alam, bangunan pengembangan air dan air tanah, bangunan air bersih/baku, bangunan air kotor, dan bangunan air), instalasi (instalasi air minum/bersih, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah non organik, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, dan instalasi pengamanan), dan jaringan (jaringan listrik, jaringan telpon dan jaringan gas) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Tidak terdapat batas kapitalisasi atas Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp3.430.730.296.145,46 dan Rp3.181.449.638.509,63. Perhitungan tambah kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 138 Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2023

Saldo awal	3.181.449.638.509,63
Penambahan:	276.457.649.704,76
Belanja Modal	234.881.455.815,33
Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	23.797.806.643,54
Mutasi Aset tetap	11.979.805.986,83
Menerima Hibah	543.561.760,00
Utang tahun 2023	4.309.018.992,66
Koreksi perubahan parameter	946.000.506,40
Pengurangan:	27.176.992.068,93
Hutang	1.664.472.250,00
Mutasi Aset tetap	10.349.000.000,00
Reklasifikasi	15.163.519.818,93
Saldo Akhir	3.430.730.296.145,46

Penjelasan mengenai mutasi tambah Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan tersaji berikut ini.

- 1) Penambahan Aset Tetap yang berasal dari pengadaan Belanja Modal Tahun Berjalan yang terdapat pada SKPD berikut.

Tabel 139 Rincian Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan per SKPD

SKPD	Belanja Modal (Rp)
Rumah Sakit Umum Daerah	3.853.011.850,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	202.180.000.571,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	28.831.798.394,33
Dinas Pertanian	16.645.000,00
Jumlah	234.881.455.815,33

- 2) Penambahan Aset Tetap JII yang disebabkan karena adanya Reklasifikasi sebesar Rp23.797.806.643,54 dan terdapat pada SKPD berikut ini.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 140 Rincian Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per SKPD

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Aset Tetap dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi Jaringan	1.134.948.440,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Mencatat reklasifikasi dari belanja pemeliharaan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Pemeliharaan dan Penataan Saluran U-Ditch Belakang Gedung IPRS dan Sekitarnya	179.820.000,00
	Reklasifikasi pengawasan dan perencanaan ke Aset Tetap JIJ	239.086.450,00
	Reklasifikasi dari gedung dan bangunan ke Aset Tetap JIJ berupa reservoir dan saluran drainase	1.350.914.497,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Mencatat reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap JIJ berupa PJU dan jalan penghubung	3.099.956.000,00
	Reklasifikasi Perencanaan dan Pengawasan ke aset tetap JIJ	12.849.111.361,81
	Mencatat reklasifikasi dari aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap JIJ	2.921.347.000,00
	Reklasifikasi dari Aset tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap JIJ berupa sumur bor desa sei bakau dan sei hambawang	399.650.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Reklasifikasi Perencanaan dan Pengawasan ke Aset Tetap JIJ	604.962.731,70
	Reklasifikasi Perencanaan dan Pengawasan ke Aset Tetap JIJ	872.249.854,03
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung Dan Bangunan ke Aset Tetap JIJ berupa pembangunan toilet Taman Sumbu Kurung	55.850.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Reklasifikasi Perencanaan dan Pengawasan ke Aset Tetap JIJ	10.421.375,00
	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke JIJ	79.488.934,00
Jumlah		23.797.806.643,54

- 3) Penambahan Aset Tetap JIJ yang berasal dari adanya Mutasi Aset tetap antar SKPD, berikut ini adalah daftar barang yang dihibahkan.

Tabel 141 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan antar SKPD

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
Dinas Pendidikan	Mencatat Penambahan Nilai Aset Disdik Atas Kegiatan Jalan Jembatan Dan Jaringan Dari Dinas Pu 2023	1.251.094.550,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	mencatat mutasi perkim Mutasi dari Perkim (Pangkoh Hulu-Pangkoh Hilir)	10.728.711.436,83
Jumlah		11.979.805.986,83



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 4) Penambahan Aset Tetap JIJ yang berasal dari Hibah yang terdapat pada SKPD Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan.

Tabel 142 Daftar Hibah Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

ama SKPD	Keterangan	Jumlah
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Mencatat hibah masuk kib D dinas perkim jalan lingkungan cor beton berdasar nota hibah no.438/2022	543.561.760,00
Jumlah		543.561.760,00

- 5) Penambahan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.309.018.992,66 terdapat pada SKPD.

Tabel 143 Rincian Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Box Culvert Jalan Dandang - Bahaur, Rehabilitasi Saluran/Handel Sei Juran, Sekunder Kanan Sungkai	708.505.000,00
	mencatat hutang Rekonstruksi Jalan Raden Tahunjung dan Jalan Menuju TPU Desa Lawang Uru	2.067.500.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Mencatat hutang perkim atas penambahan nilai jalan jembatan 2023	1.406.300.847,51
	Mencatat hutang perkim dan penambahan kib d atas error uang muka pengadaan barang jasa	126.713.145,15
Jumlah		4.309.018.992,66

- 6) Penambahan akibat adanya koreksi perubahan parameter aplikasi SIMDA BMD terdapat pada SKPD berikut ini:

Tabel 144 Rincian Koreksi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per SKPD

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
Dinas Kesehatan	koreksi akibat perubahan parameter	34.340.300,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	aset tetap yang sebelumnya tercatat sebagai Ekstrakomtabel	911.660.206,40
Jumlah		946.000.506,40

Penjelasan mengenai mutasi kurang Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan tersaji berikut ini:

- 1) Pengurangan Aset Tetap yang disebabkan utang tahun 2022 yang dibayarkan tahun 2023 yang terdapat pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan pekerjaan Pemasangan PJU Pulang Pisau- Gohong dan Jalan Bawan – Goha sebesar Rp1.664.472.250,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 2) Pengurangan Aset Tetap JIJ karena Mutasi dari Disperkimtan berupa jala Pangkoh Hulu-Pangkoh Hilir sebesar Rp10.349.000.000,00.
- 3) Pengurangan Aset Tetap JIJ karena adanya reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.163.519.818,93 yang terdapat pada SKPD berikut ini;

Tabel 145 Rincian Koreksi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per SKPD

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
rumah sakit umum daerah	reklasifikasi belanja modal instalasi air kotor lainnya ke aset tetap peralatan dan mesin	199.578.000,00
	reklas dari Jalan Irigasi dan Jaringan ke gedung dan bangunan	398.379.000,00
	reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan berupa pemasangan dan penambahan jaringan lan/ telepon 2023 ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	124.764.000,00
dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Reklasifikasi aset tetap ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa jalan sanggang pantik	11.803.200.000,00
	Reklasifikasi dari Aset Tetap JIJ ke KDP berupa Dermaga Manen Kaleka dan Beban Dibayar Dimuka	2.077.095.000,00
	mencatat reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan ke Gedung dan Bangunan	188.125.000,00
dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan	mencatat pengurangan nilai konstruksi bangunan air ke belanja barang jasa perkim 2023	273.078.818,93
	mencatat pengurangan nilai jalan jembatan jaringan perkim ke belanja perencanaan psu 2023	99.300.000,00
Jumlah		15.163.519.818,93

Terdapat reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Pembangunan Dermaga Manen Kaleka berdasarkan kontrak Nomor 600/134/DPUPR-BM/SPK/VII/2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.914.000.000,00 dimana pada 31 Desember 2023 pekerjaan itu belum sepenuhnya selesai, dimana secara fisik baru selesai sebesar 84,89% atau sebesar Rp1.624.715.083,86 akan tetapi secara keuangan telah di realisasikan sebesar 100%, sehingga menyebabkan munculnya Beban di Bayar di Muka sebesar Rp289.284.916,14.

Pada tahun 2023 terdapat kerugian daerah sebesar Rp5.865.180.315,88 pada paket pekerjaan pembuatan jalan Sanggang -Pantik dengan nilai kontrak sebesar Rp24.590.000.000,00 berdasarkan nomor kontrak 600/004/DPUPR-BM/SPK/I/2023. Dimana dari nilai kerugian tersebut sebesar Rp4.865.180.315,00 ditetapkan sebagai Tuntutan Ganti Kerugian dengan jaminan berikut ini:



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

1. AMP BUKAKA model/type BAMP-800P produksi tahun ...;
2. Sertifikat tanah Nomor 15.12.02.08.1.00034 atas nama FJ. Toeweh dengan luas tanah 10.000 M2;
3. Sertifikat tanah Nomor 15.12.02.08.1.00037 atas nama Alex Oboes dengan luas tanah 10.000 M2; dan
4. Sertifikat tanah Nomor 15.12.02.08.1.00038 atas nama Paulin Gerson dengan luas tanah 10.000 M2

Berdasarkan pada penilaian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui tim penilai yang beranggotakan 3 OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Inspektorat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan SK Tim Penilai dan di putuskan nilai atas jaminan tersebut adalah sebesar Rp . Jaminan diatas juga telah dilengkapi dengan Surat Kuasa Jual Nomor , berdasarkan SKTJM Nomordisebutkan apabila dalam jangka waktu 24 Bulan tidak dilakukan penyetoran atas kerugian tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berhak untuk memiliki aset yang dijaminan. Berdasarkan pada hal tersebut maka terdapat koreksi sebesar nilai tersebut pada Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau salah satunya mengatur tentang batas kapitalisasi Aset Tetap, dimana pada Kebijakan Akuntansi 17 Akuntansi Aset Tetap pada nomor 64 huruf (b) menyebutkan bahwa “Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar atau dengan kata lain setiap penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap aset tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi” dan huruf (e) yang menyebutkan “Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesarRp 10.000.000,00 ke atas”. Hal itu menyebabkan munculnya pemahaman yang saling bertentangan atas aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan, dimana SIMDA BMD mengakui adanya batas kapitalisasi karena berpedoman pada huruf (e) sehingga terdapat selisih antara KIB Jalan Irigasi dan Jaringan karena adanya aset tetap Ekstrakomtabel sebesar Rp1.338.336.421,96.

Rincian nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 146 Rincian Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per SKPD

SKPD	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	7.893.638.334,00	5.507.595.344,00
Dinas Kesehatan	1.795.519.918,64	1.761.179.618,64
Rumah Sakit Umum Daerah	10.854.088.487,00	5.953.976.690,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.255.335.184.321,30	3.035.201.634.995,26
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	39.513.081.063,79	17.848.873.150,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	406.515.000,00	406.515.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

SKPD	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Dinas Sosial	340.765.144,00	340.765.144,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	85.584.000,00	85.584.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.616.379.800,00	50.616.379.800,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	53.500.000,00	53.500.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	288.768.000,00	288.768.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	281.990.000,00	281.990.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	541.841.302,00	541.841.302,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	339.524.000,00	339.524.000,00
Dinas Perhubungan	1.613.587.250,00	1.613.587.250,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	273.994.300,00	273.994.300,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	214.312.000,00	214.312.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	52.215.000,00	52.215.000,00
Dinas Perikanan	3.780.585.798,41	3.780.585.798,41
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.751.038.000,00	1.695.188.000,00
Dinas Pertanian	45.621.603.300,32	45.604.958.300,32
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	982.004.969,00	892.094.660,00
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	5.442.830.692,00	5.442.830.692,00
Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau	432.855.700,00	432.855.700,00
Kecamatan Pandih Batu	32.400.000,00	32.400.000,00
Kecamatan Banama Tingang	32.400.000,00	32.400.000,00
Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	891.662.000,00	891.662.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	888.367.800,00	888.367.800,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	209.059.965,00	209.059.965,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	165.000.000,00	165.000.000,00
Jumlah	3.430.730.296.145,46	3.181.449.638.509,63

Hasil Pengujian Prosedur Analitis atas kesesuaian Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

Hasil Pengujian Prosedur Analitis

Uraian	Audited
<i>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (LRA) = Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca)</i>	
<i>- Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 20NN-1 (Neraca)</i>	
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LRA)	234.881.455.815,33
Penambahan/(Penurunan)	
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca)	3.430.730.296.145,46
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 20NN-1 (Neraca)	3.181.449.638.509,63
Selisih	14.399.201.820,50
<i>Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)</i>	14.399.201.820,50



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Hasil pengujian PA Kesesuaian Belanja Modal JIJ (LRA) dan Aset Tetap JIJ (Neraca) menunjukkan adanya selisih sebesar Rp14.399.201.820,50 yang terinci berikut ini.

Penambahan:	41.576.193.889,43
Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	23.797.806.643,54
Mutasi Aset tetap	11.979.805.986,83
Menerima Hibah	543.561.760,00
Utang tahun 2023	4.309.018.992,66
Koreksi perubahan parameter	946.000.506,40
Pengurangan:	27.176.992.068,93
Hutang	1.664.472.250,00
Mutasi Aset tetap	10.349.000.000,00
Reklasifikasi	15.163.519.818,93
Saldo Akhir	14.399.201.820,50

Penjelasan atas Selisih PA Aset Tetap Gedung dan Bangunan tersebut telah dijelaskan pada penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap JIJ selain Belanja Modal JIJ pada penjelasan mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap JIJ di atas atau bisa dilihat pada **Lampiran 9.4**.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp37.639.371.321,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp36.689.023.791,00. Rincian penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya beserta penjelasan tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 147 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo awal	36.689.023.791,00
Penambahan:	960.747.530,00
Belanja Modal	37.039.000,00
Reklasifikasi Aset	923.708.530,00
Pengurangan:	10.400.000,00
Reklasifikasi Aset	10.400.000,00
Saldo Akhir	37.639.371.321,00

Perubahan Saldo Aset Tetap Lainnya TA 2023 yang disebabkan oleh:

- 1) Penambahan Aset Tetap dari pengadaan Belanja Modal tahun berjalan sebesar Rp37.039.000,00 yang terdapat pada SKPD berikut.

Tabel 148 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Nama SKPD	Jumlah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26.639.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Nama SKPD	Jumlah
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.400.000,00
Jumlah	37.039.000,00

- 2) Reklasifikasi Penambahan Aset Tetap Lainnya disebabkan karena beberapa sebab berikut ini, yaitu reklasifikasi Aset tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya berupa buku pada Dinas Pendidikan sebesar Rp897.235.030,00 dan Rp26.473.500,00 untuk reklasifikasi pada Sekretariat Daerah berupa lukisan.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya disebabkan oleh:

- 1) Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya berupa Drone ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada SKPD BPPKAD sebesar Rp10.400.000,00

Rincian nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 149 Rincian Aset Tetap Lainnya Per SKPD TA 2023

Daftar SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	23.975.302.207,00	23.078.067.177,00
Rumah Sakit Umum Daerah	4.628.323.978,00	4.628.323.978,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.921.973.000,00	6.921.973.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.147.600,00	9.147.600,00
Dinas Perhubungan	19.941.500,00	19.941.500,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	863.026.701,00	836.387.701,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	72.595.000,00	72.595.000,00
Dinas Pertanian	89.315.000,00	89.315.000,00
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	591.797.060,00	565.323.560,00
Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau	33.855.850,00	33.855.850,00
Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	15.049.950,00	15.049.950,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	49.986.475,00	49.986.475,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	369.057.000,00	369.057.000,00
Jumlah	37.639.371.321,00	36.689.023.791,00

Hasil Pengujian Prosedur Analitis atas Kesesuaian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Aset Tetap Aset tetap Lainnya

Hasil Pengujian Prosedur Analitis

Uraian	Audited
<i>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (LRA) = Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca)</i>	
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	37.039.000,00
Penambahan/(Penurunan)	
Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	37.639.371.321,00
Aset Tetap Lainnya Tahun 20NN - 1 (Neraca)	36.689.023.791,00
Selisih	913.308.530,00
<i>Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)</i>	913.308.530,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Hasil pengujian PA Kesesuaian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (LRA) dan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya (Neraca) menunjukkan adanya selisih sebesar Rp913.308.530,00 yang terinci berikut ini:

Rincian Selisih Prosedur Analitis

Penambahan:	923.708.530,00
Reklasifikasi Aset	923.708.530,00
Pengurangan:	10.400.000,00
Reklasifikasi Aset	10.400.000,00
Saldo Akhir	913.308.530,00

Penjelasan atas Selisih PA Aset Tetap Aset Tetap Lainnya tersebut telah dijelaskan pada penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya selain Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya di atas atau bisa dilihat pada **Lampiran 9.5**.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp40.087.453.623,86 mengalami peningkatan dibandingkan dengan KDP per 31 Desember 2022 yang nilainya sebesar Rp 21.722.577.850,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 150 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo awal	21.722.577.850,00
Penambahan:	21.464.831.773,86
Reklasifikasi dari Aset Tetap JIJ	21.464.831.773,86
Pengurangan:	3.099.956.000,00
Reklasifikasi berupa PJU dan jalan Bawan Goha	3.099.956.000,00
Saldo Akhir	40.087.453.623,86

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan disebabkan oleh hal-hal berikut ini:

1. Penambahan Aset Tetap karena reklasifikasi sebesar Rp21.464.831.773,86 terdapat pada SKPD berikut ini.

Tabel 151 Rincian Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
Dinas Pendidikan	Mencatat Perencanaan Aset Tetap	79.920.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan dan Pengawasan yang direklas ke Aset tetap	1.367.907.610,00
	reklasifikasi dari KIB C ke KDP	2.932.327.500,00
	reklasifikasi aset tetap ke KDP berupa jalan Sanggang Pantik	11.803.200.000,00
	mencatat hutang dan KDP	3.036.258.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Nama SKPD	Keterangan	Jumlah
	Mencatat reklasifikasi Dermaga Manen Kaleka karena aset JIJ	1.787.810.083,86
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Reklas Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur	24.686.400,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Reklas Jasa Konsultansi Perencanaan (Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota) ke KDP	4.167.500,00
	Reklas perencanaan pengembangan sumbu kurung ke KDP	14.557.000,00
Dinas Pertanian	Reklas jasa konsultasi perencanaan rehab gedung kantor Dinas Pertanian ke KDP	98.619.000,00
	Reklas jasa konsultasi perencanaan pembangunan tempat parkir ke KDP	8.334.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Reklas Perencanaan Teknis Rehabilitasi Gedung Kantor BKPSDM Kab Pulang Pisau	59.850.000,00
	Reklas Perencanaan Teknis Pekerjaan Penataan Halaman Kantor ke KDP	49.850.000,00
Bapperida	Reklas Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektu Jasa Desain Arsitektural ke KDP	197.344.680,00
Jumlah		21.464.831.773,86

Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan terjadi karena reklasifikasi ke Aset Tetap PJU Pulang Pisau Gohong dan Jalan Bawan sebesar Rp3.099.956.000,00 pada DPUPR.

Rincian nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

Rincian Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan pada masing SKPD tersaji sebagai berikut.

Tabel 152 Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD TA 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	176.670.000,00	96.750.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.151.193.043,86	8.323.645.850,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	32.700.000,00	32.700.000,00
Dinas Sosial	39.850.000,00	39.850.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.686.400,00	
Dinas Perhubungan	99.500.000,00	99.500.000,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	12.743.132.000,00	12.743.132.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18.724.500,00	
Dinas Pertanian	106.953.000,00	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	88.000.000,00	88.000.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	109.700.000,00	
BAPPEDA	197.344.680,00	
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	299.000.000,00	299.000.000,00
Jumlah	40.087.453.623,86	21.722.577.850,00

Penyajian atas rincian seluruh Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan pada setiap SKPD per dokumen disajikan pada **Lampiran 9.6**.

Pada tahun 2023 terdapat kerugian daerah sebesar Rp5.865.180.315,88 pada paket pekerjaan pembuatan jalan Sanggang -Pantik dengan nilai kontrak sebesar Rp24.590.000.000,00 berdasarkan nomor kontrak 600/004/DPUPR-BM/SPK/I/2023. Dimana dari nilai kerugian tersebut pihak penyedia membuat surat pernyataan kesanggupan memabayar kerugian daerah ditetapkan sebagai Tuntutan Ganti Kerugian dengan jaminan berikut ini:

1. AMP BUKAKA model/type BAMP-800P dengan invoice nomor 02-05-01253 Tanggal 20 Mei 2014 senilai 2.975.000.000,00
2. Sertifikat tanah Nomor 15.12.02.08.1.00034 atas nama FJ. Toeweh dengan luas tanah 10.000 M2 senilai Rp1.500.000.000,00;
3. Sertifikat tanah Nomor 15.12.02.08.1.00037 atas nama Alex Oboes dengan luas tanah 10.000 M2 senilai Rp500.000.000,00;
4. Sertifikat tanah Nomor 15.12.02.08.1.00038 atas nama Paulin Gerson dengan luas tanah 10.000 M2 senilai Rp500.000.000,00;
5. 1 Unit Used Tandem Roller, 1 Unit Used Tyre Roller, 1 Unit Used Asphalt Finisher, 1 Unit Used Fibrator Roller, 1 Unit Used Wheel Loader, 1 Unit Used Motor Grader dengan taksiran nilai sementara sebesar Rp1.750.000.000,00

Atas jaminan yang disampaikan oleh pihak penyedia, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat telah melakukan Perhitungan sementara atas nilai dari kelima point jaminan yang diserahkan dengan metode perhitungan harga pasar dan harga perolehan aset yaitu senilai Rp7.225.000.000,00. Dalam surat pernyataan kesanggupan yang dibuat oleh penyedia apabila dalam kurun waktu 40 hari penyedia jasa tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut maka pemerintah daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan diatas.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dihitung dengan menggunakan metode



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

garis lurus. Masa manfaat Aset Tetap diatur secara variatif tergantung jenis dari aset tetap tersebut. Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.477.125.356.643,00 sedangkan untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.984.936.781.918,42 Adapun rincian Akumulasi Aset Tetap per jenis tersaji berikut ini.

Tabel 153 Rincian Penghitungan Akumulasi Penyusutan TA 2023

Uraian	2022 (Rp)	Koreksi Saldo Awal Penyusutan	Beban Penyusutan	2023 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(295.586.079.248,06)	(207.844.177,01)	32.256.750.238,66	(327.634.985.309,71)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(493.142.708.737,00)	(3.962.878.871,00)	85.638.066.864,00	(574.817.896.730,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(2.196.207.993.933,36)	136.423.600.957,01	242.040.879.712,92	(2.574.672.474.603,29)
Jumlah	(2.984.936.781.918,42)	132.252.877.909,00	359.935.696.815,58	(3.477.125.356.643,00)

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin terdapat pada SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 10.1**;
2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan terdapat pada SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 10.2**; dan
3. Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan terdapat pada SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 10.3**.

Nilai akumulasi penyusutan pada masing-masing SKPD tersaji berikut ini.

Tabel 154 Rincian Akumulasi Penyusutan Per SKPD TA 2022 dan 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	(244.127.106.592,00)	(212.193.274.160,00)
Dinas Kesehatan	(133.901.937.645,01)	(120.875.879.993,05)
Rumah Sakit Umum Daerah	(83.256.665.902,24)	(64.871.851.640,24)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(2.575.252.541.512,99)	(2.190.330.174.572,64)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(16.282.603.459,57)	(12.063.029.014,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	(1.812.559.962,00)	(1.578.926.931,00)
Dinas Sosial	(6.120.221.062,67)	(5.600.028.174,68)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(11.012.220.969,00)	(10.074.379.447,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(47.257.295.417,33)	(45.797.038.830,33)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(6.316.956.925,00)	(5.534.075.834,00)
Dinas Ketahanan Pangan	(5.699.889.024,00)	(5.176.965.747,00)
Dinas Lingkungan Hidup	(7.756.661.323,00)	(6.937.413.672,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(7.812.972.461,70)	(7.210.955.225,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(4.957.845.121,00)	(4.481.273.021,00)
Dinas Perhubungan	(26.594.045.417,00)	(16.954.353.936,00)



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	(2.826.785.892,00)	(2.534.214.184,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(5.602.163.905,00)	(5.094.214.732,00)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(2.168.827.005,00)	(1.888.712.759,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(4.087.937.117,00)	(3.821.982.405,00)
Dinas Perikanan	(15.888.998.247,41)	(14.580.636.361,41)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(1.954.460.583,00)	(1.503.971.422,00)
Dinas Pertanian	(75.596.849.358,32)	(72.909.287.081,32)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(19.089.987.043,00)	(16.644.878.362,00)
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	(86.307.103.738,00)	(78.838.505.598,00)
Inspektorat	(4.619.668.274,00)	(4.107.001.889,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(14.283.616.631,00)	(12.869.758.880,00)
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(22.259.284.857,98)	(20.978.036.420,97)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(4.943.389.102,00)	(4.486.188.354,00)
Sekretariat DPRD	(19.465.718.689,00)	(17.453.987.772,00)
Kecamatan Kahayan Hilir	(4.288.274.361,00)	(3.831.421.770,00)
Kecamatan Jabiren Raya	(1.586.794.154,00)	(1.417.093.706,00)
Kecamatan Maliku	(2.701.581.127,78)	(2.611.860.434,78)
Kecamatan Pandih Batu	(2.049.129.687,00)	(1.535.405.068,00)
Kecamatan Kahayan Kuala	(1.985.712.091,00)	(1.673.165.345,00)
Kecamatan Sebangau Kuala	(1.559.786.837,00)	(1.381.016.549,00)
Kecamatan Kahayan Tengah	(1.134.556.652,00)	(979.451.560,00)
Kecamatan Banama Tingang	(1.722.008.748,00)	(1.488.186.867,00)
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	(2.841.199.748,00)	(2.628.184.200,00)
Jumlah	(3.477.125.356.643,00)	(2.984.936.781.918,42)

5.3.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah Aset pemerintah selain Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Piutang Jangka Panjang Aset Lainnya Kabupaten Pulang Pisau terdiri atas beberapa rekening. Berikut ini rincian rekening Aset Lainnya.

Tabel 155 Rincian Aset Lainnya TA 2022 dan 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	61.477.700,00	76.477.700,00	-19,61	(15.000.000,00)
Aset Tidak Berwujud	1.579.070.768,00	1.579.070.768,00	-	-



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
Aset Lain-lain	81.030.587.715,23	62.119.705.740,59	30,44	18.910.881.974,64
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(44.118.373.890,88)	(46.152.391.955,88)	-4,41	2.034.018.065,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.320.339.401,34)	(1.093.725.868,03)	20,72	(226.613.533,31)
Treasury Deposit Facility (TDF)	188.045.589.000,00	51.280.527.086,00	266,70	136.765.061.914,00
Jumlah	225.278.011.891,01	67.809.663.470,68	232,22	157.468.348.420,33

5.3.1.4.1. Tagihan Tuntutan

Tagihan tuntutan perbendaharaan ini merupakan tagihan yang muncul akibat adanya kas yang hilang pada tahun 2011 sebesar Rp286.327.700,00, dan ditetapkan sebagai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) Nomor 700/01/LHP-K/ITKAB-PP/II/2012. Dimana telah di proses menjadi tagihan lancar piutang Perbendaharaan sebesar Rp224.850.000,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan TA 2023 adalah sebesar Rp61.477.700,00 berkurang sebesar Rp15.000.000,00 pada tahun 2023 karena adanya reklasifikasi ke Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, sehingga saldo Tagihan Jangka Panjang lebih kecil bila dibandingkan dengan saldo tahun 2022 sebesar Rp76.477.700,00.

Pada tahun 2023 terdapat kerugian daerah sebesar Rp5.865.180.315,88 pada paket pekerjaan pembuatan jalan Sanggang -Pantik dengan nilai kontrak sebesar Rp24.590.000.000,00 berdasarkan nomor kontrak 600/004/DPUPR-BM/SPK/I/2023. Dimana dari nilai kerugian tersebut pihak penyedia membuat surat pernyataan kesanggupan membayar kerugian daerah ditetapkan sebagai Tuntutan Ganti Kerugian dengan jaminan berikut ini:

6. AMP BUKAKA model/type BAMP-800P dengan invoice nomor 02-05-01253 Tanggal 20 Mei 2014 senilai 2.975.000.000,00
7. Sertifikat tanah Nomor 15.12.02.08.1.00034 atas nama FJ. Toeweh dengan luas tanah 10.000 M2 senilai Rp1.500.000.000,00;
8. Sertifikat tanah Nomor 15.12.02.08.1.00037 atas nama Alex Oboes dengan luas tanah 10.000 M2 senilai Rp500.000.000,00;
9. Sertifikat tanah Nomor 15.12.02.08.1.00038 atas nama Paulin Gerson dengan luas tanah 10.000 M2 senilai Rp500.000.000,00;
10. 1 Unit Used Tandem Roller, 1 Unit Used Tyre Roller, 1 Unit Used Asphalt Finisher, 1 Unit Used Fibrator Roller, 1 Unit Used Wheel Loader, 1 Unit Used Motor Grader dengan taksiran nilai sementara sebesar Rp1.750.000.000,00

Atas jaminan yang disampaikan oleh pihak penyedia, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat telah melakukan Perhitungan sementara atas nilai dari kelima point jaminan yang diserahkan dengan metode perhitungan harga pasar dan harga perolehan aset yaitu senilai Rp7.225.000.000,00. Dalam surat pernyataan kesanggupan yang dibuat oleh penyedia apabila dalam kurun waktu 40 hari penyedia jasa tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut maka pemerintah daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan diatas.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.3.1.4.2. Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak berwujud Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.579.070.768,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 156 Rincian Aset Aset Tak Berwujud TA 2023

No	SKPD	Aset Tak Berwujud (Rp)
1	Dinas Pendidikan	206.770.000,00
	Aplikasi E-Content	196.900.000,00
	Aplikasi SIGUNADI	9.870.000,00
2	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	419.504.343,00
	Web Server 2008 R264 Bit 2013	21.882.608,00
	OS Windows 7ultimate 2013	3.230.128,00
	Microsoft Office 2010	3.876.147,00
	Software Database (Oracle)	51.681.960,00
	Aplikasi SIMRAL	40.000.000,00
	Upgrade SISMIOP PBB	49.750.000,00
	Aplikasi eBPHTB	99.400.000,00
	Aplikasi SIMPATDA	149.683.500,00
3	Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu	531.214.325,00
	Software pelayanan perijinan	165.000.825,00
	Software pelayanan perijinan	240.923.500,00
	software tanda tangan elektronik	55.660.000,00
	Software pelayanan perijinan	69.630.000,00
4	Sekretariat Daerah	237.270.000,00
	Aplikasi E-Anjab	149.490.000,00
	Pulang Pisau Mobile / Pulang Pisau Dalam Genngaman	87.780.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja	24.950.000,00
	Aplikasi Informasi Bursa Kerja On line	24.950.000,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	56.857.100,00
	Aplikasi E-Book	28.997.100,00
	Aplikasi E-Book	27.860.000,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.250.000,00
	Windows Server	14.250.000,00
8	Dinas Pertanian	19.855.000,00
	aplikasi SIMAKDAS Dinas Pertanian	19.855.000,00
9	Dinas Perikanan	68.400.000,00
	Paten Pembibitan Ikan	68.400.000,00
Jumlah		1.579.070.768,00

Nilai amortisasi ini merupakan perhitungan manual dengan menggunakan *Microsoft excel* dan belum bisa diakomodir pada Aplikasi SIMDA BMD, sehingga menyebabkan terdapat selisih nilai amortisasi antara SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD sebesar nilai amortisasi Aset Tak Berwujud. Selain aplikasi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau juga memiliki Aset tak berwujud berupa hak paten pembenihan ikan di Dinas Perikanan sebesar Rp68.400.000,00. Amortisasi atas paten ini sebesar Rp68.400.000,00.

5.3.1.4.3. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berupa *software* pengadaan TA 2006 sampai dengan TA 2023. Amortisasi aset tak berwujud dihitung dengan metode garis lurus dimana masa manfaat aset tak berwujud adalah 3 tahun dan mulai diperhitungkan amortisasinya pada tahun kedua setelah pengadaan aset tak berwujud tersebut. Berikut ini daftar aset tak berwujud.

Tabel 157 Rincian Aplikasi per SKPD TA 2023



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	SKPD	Aset Tak Berwujud (Rp)	Amortisasi per 31 Desember 2022 (Rp)	beban Amortisasi per 31 Desember 2023 (Rp)	Amortisasi per 31 Desember 2023 (Rp)	Nilai Buku Aset Tak berwujud (Rp)
1	Dinas Pendidikan	206.770.000,00	206.770.000,00	-	206.770.000,00	0,00
	Aplikasi E-Content	196.900.000,00	196.900.000,00	-	196.900.000,00	0,00
	Aplikasi SIGUNADI	9.870.000,00	9.870.000,00	-	9.870.000,00	0,00
2	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	419.504.343,00	236.687.509,69	83.027.833,31	319.715.343,00	99.789.000,00
	Web Server 2008 R264 Bit 2013	21.882.608,00	21.882.608,00		21.882.608,00	0,00
	OS Windows 7ultimate 2013	3.230.128,00	3.230.128,00		3.230.128,00	0,00
	Microsoft Office 2010	3.876.147,00	3.876.147,00		3.876.147,00	0,00
	Software Database (Oracle)	51.681.960,00	51.681.960,00		51.681.960,00	0,00
	Aplikasi SIMRAL	40.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00
	Upgrade SISMOP PBB	49.750.000,00	49.750.000,00		49.750.000,00	0,00
	Aplikasi eBPHTB	99.400.000,00	66.266.666,69	33.133.333,31	99.400.000,00	0,00
	Aplikasi SIMPATDA	149.683.500,00		49.894.500,00	49.894.500,00	99.789.000,00
3	Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu	531.214.325,00	489.450.991,67	41.763.333,34	531.214.325,00	0,00
	Software pelayanan perijinan	165.000.825,00	165.000.825,00	-	165.000.825,00	0,00
	Software pelayanan perijinan	240.923.500,00	240.923.500,00	-	240.923.500,00	0,00
	software tanda tangan elektronik	55.660.000,00	37.106.666,67	18.553.333,34	55.660.000,00	0,00
	Software pelayanan perijinan	69.630.000,00	46.420.000,00	23.210.000,00	69.630.000,00	0,00
4	Sekretariat Daerah	237.270.000,00	49.830.000,00	79.090.000,00	128.920.000,00	108.350.000,00
	Aplikasi E-Anjab	149.490.000,00	49.830.000,00	49.830.000,00	99.660.000,00	49.830.000,00
	Pulang Pisau Mobile / Pulang Pisau Dalam Genngaman	87.780.000,00	-	29.260.000,00	29.260.000,00	58.520.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja	24.950.000,00	8.316.666,67	8.316.666,67	16.633.333,34	8.316.666,66
	Aplikasi Informasi Bursa Kerja On line	24.950.000,00	8.316.666,67	8.316.666,67	16.633.333,34	8.316.666,66
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	56.857.100,00	9.665.700,00	9.665.700,00	19.331.400,00	37.525.700,00
	Aplikasi E-Book	28.997.100,00	9.665.700,00	9.665.700,00	19.331.400,00	9.665.700,00
	Aplikasi E-Book 2022	27.860.000,00				27.860.000,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.250.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	9.500.000,00	4.750.000,00
	Windows Server	14.250.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	9.500.000,00	4.750.000,00
8	Dinas Pertanian	19.855.000,00	19.855.000,00	0,00	19.855.000,00	0,00
	aplikasi SIMAKDAS Dinas Pertanian	19.855.000,00	19.855.000,00	-	19.855.000,00	0,00
9	Dinas Perikanan	68.400.000,00	68.400.000,00		68.400.000,00	
	Hak Paten	68.400.000,00	68.400.000,00		68.400.000,00	
Total		1.579.070.768,00	1.093.725.868,03	226.613.533,31	1.320.339.401,34	258.731.366,66

5.3.1.4.4. Aset Lain-lain

Aset lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing mempunyai saldo sebesar Rp36.912.213.824,35 dan Rp15.967.313.784,71 dengan rincian sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 158 Rincian Aset Lain-lain TA 2022 dan 2023

No	Aset Lain-lain	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Aset Rusak Berat	81.030.587.715,23	61.222.335.940,59
2	Barang Jasa yang direklas ke Aset Lain-lain	-	639.681.000,00
3	Piutang yang akan dihapuskan	-	257.688.800,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(44.118.373.890,88)	(46.152.391.955,88)
Jumlah		36.912.213.824,35	15.967.313.784,71

Aset Lain-Lain tersebut dalam Neraca per 31 Desember TA 2023 disajikan sebesar nilai buku. Nilai Aset Lain-Lain sebesar Rp81.030.587.715,23 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp44.118.373.890,88 sehingga nilai buku Aset Lain-Lain di Neraca sebesar Rp36.912.213.824,35, rincian perhitungan Aset Lain-Lain dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

5.3.1.4.5. *Treasury Deposit Facility (TDF)*

Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Berdasarkan Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor ND-70/PB.3/2024 tanggal 12 Januari 2024, saldo dana TDF Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau per 12 Januari 2024 adalah sebesar Rp188.045.589.000,00 pada Rek Lain BI TDF TKD Kab. Pulang Pisau dengan nomor Rekening 519.000.441.980.

5.3.2. **Kewajiban**

Tabel 159 Utang Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 dan 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Kewajiban	14.518.712.285,90	10.049.069.017,24	44,49	4.469.643.268,66
Jumlah	14.518.712.285,90	10.049.069.017,24	44,49	4.469.643.268,66

Saldo Kewajiban (Utang) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.518.712.285,90 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.049.069.017,24. Saldo Utang Kabupaten Pulang Pisau merupakan Utang Jangka Pendek. Rincian Utang Jangka Pendek Kabupaten Pulang Pisau tersaji sebagai berikut.

Tabel 160 Rincian Utang Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 dan 2023

Uraian	Jumlah (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	63.600.265,00
Utang Belanja Pegawai BLUD	219.935.260,00
Utang Belanja Barang	187.421.280,00
Utang Belanja Jasa	796.039.416,00
Utang Belanja Pemeliharaan	67.560.000,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.665.890.600,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah (Rp)
Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan	1.406.300.847,51
Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	397.230.400,00
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	6.693.300,00
Utang Pengadaan Aset Tetap	8.708.040.917,39
Jumlah	14.518.712.285,90

5.3.2.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Utang PFK Tahun 2023 sebesar Rp63.600.265,00 merupakan utang akibat adanya keterlambatan penyeteroran yang terdapat pada SKPD Dinas Pendidikan sebesar Rp 44.721.561,00 yang merupakan Pajak pusat pada sekolah-sekolah sebagaimana tersaji pada **lampiran 17**, dan Utang PPh Pasal 21 pada Dinas Pertanian sebesar Rp1.849.305,00 akibat adanya kesalahan perhitungan pajak atas Tambahan Penghasilan Pegawai pada 5 Pegawai. Utang BPJS SKPD Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp14.976.000,00. Kekurangan setoran kekurangan setoran PPN Dinas Perhubungan sebesar Rp275.676,00, Kecamatan Maluku sebesar Rp.20.450,00 dan PPN tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 1.757.273,00,.

Hasil Pengujian Prosedur Analitis atas Kesesuaian Utang PFK (Neraca) dengan Utang PFK Tahun 2022 dan Penerimaan dan Pengeluaran PFK

Hasil Pengujian Prosedur Analitis

Uraian	Audited
$\text{Utang PFK Tahun Berjalan (Neraca)} = \text{Utang PFK Tahun 20NN-1 (Neraca)} + \text{Penerimaan PFK (LAK)} - \text{Pengeluaran PFK (LAK)}$	
Utang PFK Tahun Berjalan (Neraca)	63.600.265,00
Utang PFK Tahun 20NN-1 (Neraca)	74.914.847,00
Penerimaan PFK Tahun Berjalan (LAK)	102.005.027.108,00
Pengeluaran PFK Tahun Berjalan (LAK)	102.005.027.108,00
Selisih	(11.314.582,00)
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	
PFK tahun 2022 pada dinas pendidikan yang telah dibayar	74.914.847,00
PFK tahun 2023 pada dinas pendidikan atas belanja dan BOS Utang PPh 21	16.165.495,00
PFK tahun 2023 pada dinas pendidikan atas belanja dan BOS Utang PPh 23	5.781.324,00
PFK tahun 2023 pada dinas pendidikan atas belanja dan BOS Utang PPN Pusat	22.774.742,00
Utang PPh 21 TPP ASN Dinas Pertanian Ub. Juni dan Juli 2023	1.849.305,00
Utang BPJS Satpol PP karena keterlambatan penyeteroran	14.976.000,00
Utang PPN Dinas PUPR	1.757.273,00
Utang PFK Dinas Perhubungan	275.676,00
Utang PFK Kecamatan Maluku	20.450,00
Total	11.314.582,00

5.3.2.2. Utang Beban

Tabel 161 Utang Beban TA 2022 dan 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Utang Beban	5.740.377.803,51	7.149.813.908,00	(19,71)	(1.409.436.104,49)
Jumlah	5.740.377.803,51	7.149.813.908,00	(19,71)	(1.409.436.104,49)



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Berikut rincian Utang Beban.

Tabel 162 Rincian Utang Beban TA 2023

Uraian	Jumlah (Rp)
Utang Belanja Pegawai BLUD	219.935.260,00
Utang Belanja Barang	187.421.280,00
Utang Belanja Jasa	796.039.416,00
Utang Belanja Pemeliharaan	67.560.000,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.665.890.600,00
Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan	1.406.300.847,51
Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi	397.230.400,00
Jumlah	5.740.377.803,51

5.3.2.2.1. Utang Belanja Pegawai BLUD

Utang Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp219.935.260,00 adalah kekurangan pembayaran pegawai honorer bulan Desember pada RSUD Kabupaten Pulang Pisau.

5.3.2.2.2. Utang Belanja Barang

Utang Belanja Barang per 31 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau adalah sebesar Rp187.421.280,00 merupakan utang pembangunan (JUT) Desa Sakakajang Kecamatan Jabiren Raya dan (JUT) Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu yang terdapat pada Dinas Pertanian sebesar Rp187.421.280,00.

5.3.2.2.3. Utang Belanja Jasa

Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp796.039.416,00 yang terdapat pada SKPD berikut ini.

Tabel 163 Rincian Utang Belanja Jasa TA 2023

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Kesehatan	272.116.684,00
Rumah Sakit Umum Daerah	482.500.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.177.600,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.278.450,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	51.300,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	390.250,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	476.950,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.717.712,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	57.800,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	212.950,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	142.300,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	916.900,00
Dinas Ketahanan Pangan	2.407.954,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Pertanian	7.809.370,00
Sekretariat DPRD	2.152.575,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	477.450,00
Inspektorat	7.258.402,00
Kecamatan Kahayan Hilir	1.894.769,00
Jumlah	796.039.416,00

5.3.2.2.4. Utang Belanja Pemeliharaan

Utang belanja Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau merupakan Utang pada Dinas Lingkungan Hidup atas pemeliharaan *Solar Cell* sebesar Rp67.560.000,00.

5.3.2.2.5. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD

Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD adalah sebesar Rp2.665.890.600,00 yang terdiri dari.

Tabel 164 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2023

Uraian	Jumlah (Rp)
Biaya Jasa Pelayanan BPJS, Jampersal, KB, COVID-19 dan lainnya	1.973.441.726,00
Biaya Cetak	13.551.491,00
Biaya Penggandaan (Fotocopy)	10.240.155,00
Biaya Pemeliharaan - Jaringan Internet	6.250.000,00
Biaya Jasa Pihak Ketiga/Tim Independen dll	2.800.000,00
Biaya Bahan Bakar Minyak / Gas Ambulance	7.600.000,00
Biaya Pemeliharaan - Kendaraan Dinas / Operasional	6.820.000,00
Biaya Pemeliharaan - Peralatan Kantor	3.850.000,00
Biaya Bahan dan Perlengkapan Makan Minum Pasien	127.276.215,00
Belanja Pengisian Tabung Oksigen	77.500.000,00
Biaya Gas Dapur	2.100.000,00
Biaya bahan dan obat-obatan	49.027.729,00
Biaya BHP Farmasi	22.557.542,00
Biaya Lain-lain	12.150.000,00
Biaya Air	17.459.900,00
Biaya Listrik	86.979.437,00
Biaya Jasa Pelayanan Pasien Umum	246.286.405,00
Jumlah	2.665.890.600,00

5.3.2.2.6. Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan

Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan merupakan utang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas penambahan nilai jalan dan jembatan Tahun 2023 sebesar Rp1.406.300.847,51.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.3.2.2.7. Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp397.230.400,00 merupakan utang PBI BPJS kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 397.230.000,00 dan koreksi utang BPJS PBI (selisih nilai Rp400 berdasarkan dari hasil konfirmasi ke BPJS Kesehatan).

5.3.2.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

Tabel 165 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya TA 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	11.369.998,74	(100,00)	(11.369.998,74)
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	6.693.300,00	-	-	-
Utang Pengadaan Aset Tetap	8.708.040.917,39	2.812.970.263,50	209,57	5.895.070.653,89
Jumlah	8.714.734.217,39	2.824.340.262,24	208,56	5.890.393.955,15

Utang Kelebihan Pembayaran PAD

Utang Kelebihan Pembayaran PAD sebesar Rp6.693.300,00 merupakan Utang yang muncul karena pajak Dana BOS Tahun 2023 di Dinas Pendidikan.

Utang Pengadaan Aset Tetap

Utang Pengadaan Aset Tetap TA 2023 sebesar Rp8.708.040.917,39. Utang Pengadaan Aset tetap tersebut merupakan utang kontrak kepada pihak ketiga adapun skema mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya tersaji sebagai berikut.

Tabel 166 Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap TA 2022 dan 2023

SKPD	Utang Tahun 2022 (Rp)	Pembayaran utang (Rp)	Penambahan utang (Rp)	Utang Tahun 2023 (Rp)
Dinas Pendidikan	17.746.500,00	0,00	3.750.000,00	21.496.500,00
Dinas Kesehatan	15.796.895,00	0,00	0,00	15.796.895,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.607.353.600,50	3.519.328.010,00	9.272.565.520,00	8.360.591.110,50
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	126.713.145,15	126.713.145,15
Dinas Perhubungan	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00
Dinas Pertanian	36.890.318,00	0,00	0,00	36.890.318,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	45.358.000,00	0,00	0,00	45.358.000,00
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	23.817.750,00	0,00	0,00	23.817.750,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	63.517.200,00	0,00	0,00	63.517.200,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	0,00	0,00	11.369.998,74	11.369.998,74
Jumlah	2.812.970.263,50	3.519.328.010,00	9.414.398.663,89	8.708.040.917,39



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang yang muncul karena adanya surat dari Asuransi Askrido dengan Nomor 0019/PLR/B/I/2022 perihal permohonan untuk mengembalikan klaim asuransi atas nama CV.Citra Utama Perkasa yang ditransfer dua kali ke RKUD pada tanggal 8 Desember 2022 sebesar Rp11.369.998,74.

5.3.3. Ekuitas

Tabel 167 Ekuitas Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 dan 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Ekuitas	2.258.451.765.086,96	2.311.445.762.335,56	(2,29)	(52.993.997.248,60)
Jumlah	2.258.451.765.086,96	2.311.445.762.335,56	(2,29)	(52.993.997.248,60)

Saldo Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten TA 2023 sebesar Rp2.258.451.765.086,96 sedangkan Ekuitas TA 2022 yang nilainya sebesar Rp2.375.247.245.723,54.

5.4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 dan 2022 terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut.

Tabel 168 Laporan Operasional TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Pendapatan	1.298.312.615.786,62	1.293.738.743.739,96	0,35	4.573.872.046,66
Beban	(1.222.853.376.202,90)	(1.069.134.858.171,82)	14,38	(153.718.518.031,08)
Surplus Defisit dari kegiatan Non Operasional	(2.370.308.682,00)	(2.834.980.893,12)	16,39	464.672.211,12
Surplus Defisit dari Pos Luar Biasa	(1.531.452.297,00)	(657.172.500,00)	(133,04)	(874.279.797,00)
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	71.557.478.604,72	221.111.732.175,02	(67,64)	(149.554.253.570,30)

5.4.1. Pendapatan - LO

Pendapatan - LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan LO Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 169 Pendapatan LO TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Pendapatan-LO	1.292.320.889.335,22	1.293.738.743.739,96	0,35	4.573.872.046,66
Jumlah	1.292.320.889.335,22	1.293.738.743.739,96	0,35	4.573.872.046,66



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rincian Pendapatan - LO TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 170 Rincian Pendapatan - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	69.210.844.348,52	48.862.083.390,30
Pendapatan Transfer-LO	1.165.808.092.343,70	914.712.073.769,66
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO	57.301.952.643,00	330.164.586.580,00
Jumlah	1.292.320.889.335,22	1.293.738.743.739,96

Penjelasan masing-masing akun Pendapatan LO TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 171 Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LO TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	69.210.844.348,52	48.862.083.390,30	41,65	20.348.760.958,22
Jumlah	69.210.844.348,52	48.862.083.390,30	41,65	20.348.760.958,22

Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 172 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LO TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pajak Daerah-LO	26.320.698.183,00	10.435.559.283,10
Retribusi Daerah-LO	3.905.845.604,00	2.798.277.761,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	27.049.142,65	7.017.720.761,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	38.957.251.418,87	28.610.525.585,20
Jumlah	69.210.844.348,52	48.862.083.390,30

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO TA 2023 dan 2022 terdapat pada SKPD sebagai berikut.

Tabel 173 Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LO TA 2023 dan 2022 per SKPD

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	12.000.000,00	6.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	6.113.602.221,00	4.743.990.600,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	24.096.623.209,00	19.467.301.680,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.078.041.088,00	31.000.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	6.900.000,00	3.000.000,00
6	Dinas Perhubungan	1.009.770.020,00	929.853.500,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	376.457.216,00	607.607.168,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	110.517.454,27	158.997.454,27
8	Dinas Perikanan	33.200.000,00	1.200.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
9	Dinas Pertanian	10.000.000,00	6.375.000,00
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	95.361.000,00	70.744.000,00
11	Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	262.364.500,00	164.100.000,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	114.000.000,00	60.000.000,00
13	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	35.808.482.640,25	22.503.363.188,03
14	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	0,00	0,00
15	Sekretariat DPRD	18.000.000,00	20.100.000,00
16	Kecamatan Kahayan Hilir	29.573.000,00	36.383.000,00
17	Kecamatan Jabiren Raya	3.500.000,00	3.500.000,00
18	Kecamatan Maliku	4.340.000,00	14.922.800,00
19	Kecamatan Pandih Batu	7.200.000,00	7.200.000,00
20	Kecamatan Kahayan Kuala	18.262.000,00	16.220.000,00
21	Kecamatan Sebangau Kuala	1.600.000,00	1.600.000,00
22	Kecamatan Kahayan Tengah	1.050.000,00	875.000,00
23	Kecamatan Banama Tingang	0,00	7.750.000,00
Jumlah		69.210.844.348,52	48.862.083.390,30

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp26.320.698.183,00 dan sebesar Rp10.435.559.283,10, naik sebesar Rp15.885.138.899,90, sebagai berikut.

Tabel 174 Pendapatan Pajak Daerah - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pajak Daerah-LO	26.320.698.183,00	10.435.559.283,10
Jumlah	26.320.698.183,00	10.435.559.283,10

Rincian Pendapatan Pajak Daerah LO pada TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 175 Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	4.200.000,00	2.400.000,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	34.817.800,00	31.905.930,00
Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	45.280.000,00	38.602.000,00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	1.174.603.856,00	1.011.537.130,90
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	0,00	800.000,00
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	3.230.000,00	0,00
Pertandingan Olahraga - LO	0,00	0,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	19.782.084,00	26.855.510,00
Pajak Reklame Kain-LO	24.153.000,00	15.603.000,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	4.172.317.248,00	3.852.384.124,00
Pajak Parkir-LO	6.250.000,00	-
Pajak Sarang Burung Walet-LO	60.961.123,00	53.680.500,00
Pajak Granit/Andesit-LO	1.390.332.594,00	470.957.402,20
Pajak Pasir dan Kerikil-LO	4.259.876.098,00	2.188.047.710,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*) Kabupaten Pulang Pisau Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO	615.751.052,00	44.876.410,00
PBBP2-LO	1.606.341.930,00	1.570.887.902,00
BPHTB-Pemindahan Hak-LO	907.685.251,00	816.845.720,00
BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	11.995.116.147,00	310.175.944,00
Jumlah	26.320.698.183,00	10.435.559.283,10

Hasil Pengujian Prosedur Analitis atas Kesesuaian Pendapatan Pajak (LRA-LO) Piutang Pajak N dan N-1, Pendapatan Pajak diterima dimuka N dan N-1

Hasil Pengujian Prosedur Analitis

Analisis Horizontal antara LO, LRA dan Neraca			
Uraian			Audited
Pendapatan Pajak (LO) = Pendapatan Pajak (LRA) + Piutang Pajak (Neraca) - Piutang Pajak Tahun 20NN-1 (Neraca) - Pendapatan Pajak Diterima Dimuka (Neraca) + Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)			
Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LO)			26.320.698.183,00
Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LRA)			91.320.674.278,00
Piutang Pajak Tahun Berjalan (Neraca)			9.857.943.748,00
Piutang Pajak Tahun 20NN-1 (Neraca)			69.320.452.829,00
Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)			-
Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)			-
Selisih			(5.537.467.014,00)
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)			
			(5.537.467.014,00)

Hasil pengujian Prosedur Analitis atas Kesesuaian Pendapatan Pajak (LRA-LO) Piutang Pajak N dan N-1, Pendapatan Pajak diterima dimuka N dan N-1 sebesar Rp5.537.467.014,00 berdasarkan SK Bupati Pulang Pisau Nomor 98 Tahun 2023 tentang Pembetulan SKPD-Kurang Bayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PT KLS Nomor 01/SKPD-BPHTB/IX/2021 Tanggal 23 September 2021.

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp3.905.845.604,00 dan Rp2.798.277.761,00, meningkat sebesar Rp1.107.567.843,00. Pendapatan Retribusi Daerah LO TA 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 176 Pendapatan Retribusi Daerah - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Retribusi Daerah-LO	3.905.845.604,00	2.798.277.761,00
Jumlah	3.905.845.604,00	2.798.277.761,00

Rincian Retribusi Daerah-LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut.

Tabel 177 Rincian Retribusi Daerah-LO TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas- LO		
Dinas Kesehatan	646.702.200,00	531.743.900,0
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO		
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.400.000,00	48.480.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO		
Dinas Perhubungan	85.698.520,00	48.902.000,00
Retribusi Pelataran-LO		
Kecamatan Kahayan Hilir	6.078.000,00	10.208.000,00
Kecamatan Kahayan Kuala	5.500.000,00	7.200.000,00
Retribusi Los-LO		
Kecamatan Kahayan Hilir	20.495.000,00	23.175.000,00
Kecamatan Maliku	1.840.000,00	6.830.000,00
Kecamatan Pandih Batu	4.700.000,00	5.200.000,00
Kecamatan Kahayan Kuala	6.912.000,00	6.720.000,00
Kecamatan Banama Tingang	0,00	7.000.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LO		
Kecamatan Kahayan Kuala	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO		
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	90.361.000,00	61.744.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO		
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	326.457.216,00	557.607.168,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO		
Dinas Kesehatan	48.205.000,00	44.712.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	163.200.000,00
Sekretariat DPRD	18.000.000,00	20.100.000,00
Retribusi Pemakaian Ruangan-LO		
Dinas Pendidikan	12.000.000,00	6.000.000,00
Dinas Kesehatan	21.000.000,00	3.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.500.000,00	3.000.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.000.000,00	9.000.000,00
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	68.744.500,00	53.900.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	114.000.000,00	60.000.000,00
Kecamatan Kahayan Hilir	3.000.000,00	3.000.000,00
Kecamatan Jabiren Raya	3.500.000,00	3.500.000,00
Kecamatan Maliku	2.500.000,00	3.600.000,00
Kecamatan Pandih Batu	2.500.000,00	2.000.000,00
Kecamatan Kahayan Kuala	5.850.000,00	1.050.000,00
Kecamatan Sebangau Kuala	1.600.000,00	1.600.000,00
Kecamatan Kahayan Tengah	1.050.000,00	875.000,00
Kecamatan Banama Tingang	0,00	750.000,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	31.000.000,00
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan ang Dikontrakkan-LO		
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	164.569.580,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO		
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	193.620.000,00	110.200.000,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO		
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
Dinas Pertanian	10.000.000,00	6.375.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO		
Dinas Perhubungan	21.304.000,00	93.507.500,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO		
Sekretariat DPRD	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO		
Dinas Perhubungan	835.477.500,00	750.750.000,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO		
Dinas Perikanan	33.200.000,00	1.200.000,00
Dinas Pertanian	0,00	0,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO		
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	0,00	68.711.393,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Daerah		
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO		
Dinas Perhubungan	61.040.000,00	36.694.000,00
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi-LO		
Kecamatan Maliku	0,00	4.492.800,00
Kecamatan Kahayan Kuala	0,00	1.250.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.078.041.088,00	0,00
Jumlah	3.905.845.604,00	2.798.277.761,00

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2023 dan 2022 sebesar Rp27.049.142,65 dan Rp7.017.720.761,00 turun sebesar Rp6.990.671.618,35, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 178 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO
TA 2023 dan 2022**

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dividen Bank Pembangunan Kalimantan Tengah	27.049.142,65	7.017.720.761,00
Jamkrida	0,00	0,00
Jumlah	27.049.142,65	7.017.720.761,00

5.4.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah - LO

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LO TA 2023 adalah sebesar Rp38.957.251.418,87 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp28.610.525.585,20. Pendapatan Lain-lain PAD yang sah naik sebesar Rp10.346.725.833,67 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 179 Lain-Lain PAD yang Sah - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	38.957.251.418,87	28.610.525.585,20
Jumlah	38.957.251.418,87	28.610.525.585,20

Rincian Lain-lain PAD yang Sah LO diuraikan sebagai berikut.

Tabel 180 Rincian Lain-Lain PAD yang Sah - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Hasil Sewa BMD- LO	50.000.000,00	50.000.000,00
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	178.737.507,00	0,00
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	3.630.654.033,95	2.423.218.263,05
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	27.993.841,80	6.080.625,60
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	0,00	15.658.168,93
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	2.065.500.327,77	860.614.022,87
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.551.433.702,08	314.676.325,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	70.000,00	32.000,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan	178.000,00	38.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Sejenisnya-LO		
Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	403.900,00	201.500,00
Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	20.200,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil-LO	733.218,00	0,00
Pendapatan Denda PBBP2-LO	36.192.357,00	56.344.994,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	20.400,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	0,00	61.200,00
Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	110.517.454,27	110.517.454,27
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	701.571.252,00	933.026.625,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	(2.312.913,00)	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK-LO	21.297.833,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM-LO	210.661,00	207.820.026,48
Pendapatan dari BLUD-LO	24.096.623.209,00	19.467.301.680,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	5.218.957.514,00	4.164.534.700,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	0,00	400.000,00
Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)-LO	1.268.448.921,00	0,00
Jumlah	38.957.251.418,87	28.610.525.585,20

Pengujian Prosedur Analitis Pendapatan Lain-lain PAD (LO-LRA), Piutang Lain-lain PAD yang sah tahun N dan N-1, Pendapatan lain-lain PAD yang sah diterima di Muka N dan N-1

Hasil Pengujian Prosedur Analitis

Uraian	Audited
Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah (LO) = Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah (LRA) + Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca) - Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 20NN-1 (Neraca) - Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka (Neraca) + Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LO)	38.957.251.418,87
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LRA)	37.515.518.584,60
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (Neraca)	2.756.323.824,74
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 20NN-1 (Neraca)	1.289.206.495,40
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Selisih	(25.384.495,07)
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	
	(25.384.495,07)

Penjelasan atas Selisih PA sebesar Rp25.384.495,07 tersaji pada rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pembayaran Piutang TGR terhadap pegawai bukan bendahara BPPKAD	(1.000.000,00)
Pembayaran Piutang TASPEN	(20.100.000,00)
Pengembalian Kas PKM Sebangau TA 2022	(20.000.000,00)



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah
Pengembalian Remunerasi TDF	15.658.168,93
Jasa Giro yang masih di tangan bendahara dan DPMPSTSP dan Dinas Ketahanan Pangan	57.336,00
Total	(25.384.495,07)

5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.165.808.092.343,70 lebih tinggi Rp251.096.018.574,04 jika dibandingkan dengan pendapatan 31 Desember 2022 sebesar Rp914.712.073.769,66.

Tabel 181 Pendapatan Transfer-LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik/Turun	
			%	Rp
Pendapatan Transfer-LO	1.165.808.092.343,70	914.712.073.769,66	27,45	251.096.018.574,04
Jumlah	1.165.808.092.343,70	914.712.073.769,66	27,45	251.096.018.574,04

Pendapatan Transfer-LO terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO sebagai berikut.

Tabel 182 Rincian Pendapatan Transfer-LO TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.080.487.514.623,07	842.548.862.821,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya-LO	30.741.173.000,00	26.803.680.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	54.579.404.720,63	45.359.530.948,66
Jumlah	1.165.808.092.343,70	914.712.073.769,66

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO adalah sebagai berikut.

Tabel 183 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	387.730.770.824,07	144.026.598.063,00
DBH PBB-LO	53.675.393.263,00	70.691.444.988,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	27.003.895.816,00	4.732.636.148,00
DBH SDA Minyak Bumi-LO	27.759.000,00	204.030.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	0,00	4.240.280,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	289.862.434.945,07	61.013.264.647,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	1.525.547.700,00	5.422.671.000,00
DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	14.255.842.000,00	0,00
DBH SDA Perikanan-LO	1.379.898.100,00	1.958.311.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dana Alokasi Umum (DAU)	519.420.164.092,00	515.284.162.032,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	519.420.164.092,00	515.284.162.032,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	84.090.064.909,00	96.772.954.708,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	571.373.900,00	2.062.965.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	1.604.854.200,00	10.913.934.864,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	8.357.345.800,00	4.189.691.939,00
DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	655.890.333,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	0,00	3.462.763.494,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	0,00	15.896.846.754,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	0,00	131.542.800,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	0,00	653.545.000,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	15.461.383.300,00	7.284.020.200,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO	0,00	4.956.592.750,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	14.493.039.750,00	10.503.800.000,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	29.616.188.750,00	11.654.300.000,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	0,00	5.736.799.000,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	0,00	4.012.416.000,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	9.933.840.000,00	7.838.830.000,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO	0,00	2.595.812.700,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB-LO	2.010.648.876,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	921.000.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	464.500.000,00	4.304.797.032,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana-LO	0,00	574.297.175,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	89.246.514.798,00	86.465.148.018,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	18.992.941.816,00	17.813.906.693,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	922.500.000,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	48.043.590.880,00	45.726.670.420,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	866.750.000,00	980.250.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	3.584.600.400,00	3.677.994.300,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	0,00	225.700.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	14.050.114.622,00	14.602.470.755,00
DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	158.459.200,00	400.800.000,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	294.672.600,00	191.632.050,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*) Kabupaten Pulang Pisau Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	2.149.190.000,00	2.017.355.800,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	0,00	451.800.000,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	183.695.280,00	376.568.000,00
Jumlah	1.080.487.514.623,07	842.548.862.821,00

Pengujian Prosedur Analitis atas Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan (LO) = Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan (LRA) + Piutang Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan (Neraca) - Piutang Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan Tahun 20NN-1 (Neraca) - Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka (Neraca) + Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)

Hasil Pengujian Prosedur Analitis

Uraian	Audited
Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan (LO) = Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan (LRA) + Piutang Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan (Neraca) - Piutang Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan Tahun 20NN-1 (Neraca) - Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka (Neraca) + Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	
Transfer Pemerintah Pusat (LO)	1.111.228.687.623,07
Transfer Pemerintah Pusat (LRA)	1.055.819.725.878,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan (Neraca)	-
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	-
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Selisih	55.408.961.745,07
<i>Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)</i>	
	55.408.961.745,07

Terdapat selisih Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan sebesar Rp55.408.961.745,07 yang tersaji berikut ini.

Uraian	Jumlah
TDF tahun 2022	(51.280.527.086,00)
TDF tahun 2023	188.045.589.000,00
Remunerasi TA 2022	(15.658.168,93)
Dana Desa yang tidak tercatat di LO	(81.340.442.000,00)
Total	55.408.961.745,07

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO berupa Dana Insentif Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 184 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
DID-LO	30.741.173.000,00	26.803.680.000,00
Transfer Dana Desa LO	0,00	0,00
Jumlah	30.741.173.000,00	26.803.680.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.4.1.2.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Pemerintah Provinsi)-LO sebagai berikut.

Tabel 185 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Pemerintah Provinsi) - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	31.412.826.340,00	4.562.344.433,80
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	3.005.671.929,00	5.298.066.713,57
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	11.987.977.110,63	27.133.325.528,11
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	56.473.026,00	58.318.210,18
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	8.116.456.315,00	8.307.476.063,00
Jumlah	54.579.404.720,63	45.359.530.948,66

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp57.301.952.643,00 lebih rendah Rp272.862.633.937,00 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp330.164.586.580,00.

Tabel 186 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO TA 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Naik/Turun	
			%	Rp
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	57.301.952.643,00	330.164.586.580,00	(82,64)	(272.862.633.937,00)
Jumlah	57.301.952.643,00	330.164.586.580,00	(82,64)	(272.862.633.937,00)

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Rincian Pendapatan Hibah – LO sebagai berikut.

Tabel 187 Pendapatan Hibah – LO TA 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Naik/Turun	
			%	Rp
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	56.750.620.000,00	17.528.500,00	323661,99	56.733.091.500,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	525.679.943,00	329.840.836.580,00	(99,84)	(329.315.156.637,00)
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	7.952.700,00	117.760.500,00	(93,25)	(109.807.800,00)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	17.700.000,00	188.461.000,00	(90,61)	(170.761.000,00)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	57.301.952.643,00	330.164.586.580,00	(82,64)	(272.862.633.937,00)



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.4.1.3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO

Pada Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat LO sebesar Rp56.750.620.000,00 merupakan hibah dari Pemerintah Pusat pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 188 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO TA 2023

No	Uraian	2023 (Rp)
1	Terima Hibah Aset Tetap berupa peralatan PUSDALOPS dari BNPB dengan nomor surat 12/BNPB/SU/RT.03.03/07/2022	377.850.000,00
2	Terima Hibah Aset Tetap berupa kendaraan bus dari Kementrian Perhubungan	518.590.000,00
3	Terima Hibah Aset Tetap berupa kendaraan mini bus dari Kementrian Perhubungan	663.000.000,00
4	Terima Hibah Aset Tetap berupa bangunan dermaga berdasarkan BA Nomor HK 201/26/12/DJPD/2023 dari Kementrian Perhubungan	30.291.064.000,00
5	Terima Hibah Aset Tetap dari Kemenkes berupa alat kesehatan anthropometri Kit	821.600.000,00
6	Terima Hibah Aset Tetap dari dari BMN berupa alat kesehatan	23.545.142.500,00
7	Terima Hibah Aset Tetap dari dari BMN berupa alat kesehatan	533.373.500,00
Jumlah		56.750.620.000,00

5.4.1.3.1.2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah – LO

Pada Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah - LO sebesar Rp525.679.943,00 merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi pada tahun 2023 berupa Persediaan Obat di Puskesmas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 189 Pada Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah – LO TA 2023

No	Uraian	2023 (Rp)
1	Hibah Persediaan obat PKM	525.679.943,00
Jumlah		525.679.943,00

5.4.1.3.1.3 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri – LO

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan dalam Negeri – LO sebesar Rp7.952.700,00 merupakan hibah dari Masyarakat berupa Tanah untuk Dermaga yang direncanakan dihibahkan ke Kementrian Perhubungan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 190 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan dalam Negeri – LO TA 2023

No	Uraian	2023 (Rp)
1	Hibah Tanah untuk Dermaga Buntoi	2.002.000,00
2	Hibah Tanah untuk Dermaga Maluku Mulya	652.800,00
3	Hibah Tanah untuk Dermaga Badirih	2.180.500,00
4	Hibah Tanah untuk Dermaga Pangkoh Hulu	3.117.400,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	2023 (Rp)
	Jumlah	7.952.700,00

5.4.1.3.1.4 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri – LO

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri – LO sebesar Rp17.700.000,00 merupakan Hibah dari MTQ berupa Laptop.

Tabel 191 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri – LO TA 2023

No	Uraian	2023 (Rp)
1	Hibah MTQ berupa Laptop	17.700.000,00
	Jumlah	17.700.000,00

Prosedur Analitis pengujian Pendapatan Hibah

Hasil Pengujian Prosedur Analitis

Uraian	Audited
<i>Lain-Lain Pendapatan yang Sah (LO) = Lain-Lain Pendapatan yang Sah (LRA) + Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah (Neraca) - Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 20NN-1 (Neraca) - Lain-Lain Pendapatan yang Sah Diterima Dimuka (Neraca) + Lain-Lain Pendapatan yang Sah Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)</i>	
Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (LO)	57.301.952.643,00
Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (LRA)	-
Piutang Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (Neraca)	-
Piutang Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Lain - Lain Pendapatan yang Sah Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	-
Lain - Lain Pendapatan yang Sah Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Selisih	57.301.952.643,00
<i>Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)</i>	
	57.301.952.643,00

Terdapat selisih pengujian analitis sebesar Rp57.301.952.643,00 yang terinci sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Terima hibah barang berupa peralatan pusdalops dari bnpb dengan nomor surat 12/bnpb/su/rt.03.03/07/2022	114.405.000,00
Terima hibah barang berupa peralatan pusdalops dari bnpb dengan nomor surat 12/bnpb/su/rt.03.03/07/2022	263.445.000,00
Terima hibah berupa bus dari kementerian perhubungan	518.590.000,00
Terima hibah berupa kendaraan mini bus dari kementerian perhubungan	663.000.000,00
Terima hibah berupa bangunan dermaga berdasarkan ba nomor hk 201/26/12/djpd/2023 dari kementerian perhubungan	30.291.064.000,00
Diterima hibah dari kemenkes berupa alat kesehatan anthropometri kit	821.600.000,00
Menerima pendapatan hibah dari dari bmn berupa alat kesehatan	224.400.000,00
Menerima pendapatan hibah dari dari bmn berupa alat kesehatan	3.019.500.000,00
Menerima pendapatan hibah dari dari bmn berupa alat kesehatan	20.301.242.500,00
Terima hibah dari bmn tahun 2023 berupa alkes	533.373.500,00
Mencatat persediaan hibah obat pkm	525.679.943,00
Mencatat persediaan barang berupa tanah yang direncanakan untuk dihibahkan	7.952.700,00
Hibah mtq berupa laptop	17.700.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Total	57.301.952.643,00
--------------	--------------------------

5.4.2. Beban

Beban merupakan beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun 2023. Beban LO terdiri atas Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Hibah, Beban Penyusutan Dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya. Beban LO Tahun 2023 lebih besar Rp153.718.518.031,08 dibandingkan dengan TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 192 Beban TA 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Naik/Turun	
			%	Rp
Beban	1.222.853.376.202,90	1.069.134.858.171,82	14,38	153.718.518.031,08
Jumlah	1.222.853.376.202,90	1.069.134.858.171,82	14,38	153.718.518.031,08

Rincian Beban TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 193 Rincian Beban TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Pegawai	350.439.638.898,34	332.356.343.026,00
Beban Persediaan	213.548.514.754,96	99.635.084.113,73
Beban Jasa	113.815.293.305,57	101.331.602.096,48
Beban Pemeliharaan	21.857.835.690,44	38.128.758.917,73
Beban Perjalanan Dinas	57.335.285.834,00	57.253.386.121,00
Beban Hibah	29.802.652.356,00	13.291.266.799,00
Beban Bantuan Sosial	0	415.940.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	360.162.310.348,89	358.508.333.997,06
Beban Penyisihan Piutang	53.321.714,70	6.434.792.300,82
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	638.000.000,00	638.000.000,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	730.000.000,00	3.420.738.400,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	74.470.523.300,00	57.720.612.400,00
Jumlah	1.222.853.376.202,90	1.069.134.858.171,82

5.4.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp350.439.638.898,34 sedangkan untuk 31 Desember 2022 sebesar Rp332.356.343.026,00. Beban Pegawai terdiri atas rincian obyek dapat dilihat pada **Lampiran 12**.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.4.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan TA 2023 sebesar Rp213.548.514.754,96 dan TA 2022 sebesar Rp99.635.084.113,73. Adapun rincian dari Beban Persediaan LO dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

5.4.2.3. Beban Jasa

Beban Jasa TA 2023 sebesar Rp113.815.293.305,57 dan TA 2022 yang nilainya sebesar Rp101.331.602.096,48. Beban jasa terdiri atas rincian obyek dapat dilihat di **Lampiran 14**.

Pengujian Prosedur Analitis Beban Barang dan Jasa LO

Hasil Pengujian Prosedur Analitis

Uraian	Audited
PENGUJIAN INI DILAKUKAN JIKA ENTITAS MENYAJIKAN BEBAN BARANG DAN JASA DI FACE LO - JIKA TIDAK ABAIKAN HASIL FORMULA INI	
Beban Barang & Jasa (LO) = Belanja Barang & Jasa (LRA) + Utang Belanja Barang & Jasa (Neraca) - Utang Belanja Barang & Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca) - Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka (Neraca) + Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca) - Persediaan Barang (Neraca) + Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	
Beban Barang dan Jasa Tahun Berjalan (LO)	406.556.929.584,97
Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (LRA)	378.662.524.636,93
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (Neraca)	3.716.911.296,00
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca)	6.478.193.883,00
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	456.419.823,14
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	54.097.770,00
Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	11.270.568.444,77
Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	72.069.685.000,97
Selisih	(29.741.106.968,02)
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	
	(29.741.106.968,02)

Terdapat selisih pengujian prosedur analitis sebesar Rp29.741.106.968,02 dimana selisih tersebut disajikan secara rinci sebagai berikut.

Rincian selisih Prosedur Analitis untuk Barang dan Jasa

Uraian	Jumlah
Penambahan	8.245.062.383,74
Ekstrakomtabel	720.561.696,22
Hutang	3.527.862.520,00
koreksi saldo awal persediaan	320.829.568,45
persediaan dari hibah	525.679.943,00
Reklasifikasi dan mutasi antar SKPD	2.810.013.199,93



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah
Persediaan Tanah yang akan dihibahkan	7.952.700,00
koreksi atas kesalahan pembebanan akun untuk pembayaran Utang Belanja Barang yang di bebaskan pada utang pengadaan aset tetap saat pembayaran utang	42.877.840,00
Reklasifikasi beban barang dibayar dimuka	289.284.916,14
Pengurangan	(37.986.169.351,76)
Hutang bukan berasal dari hutang barang dan jasa	(97.833.890,00)
Reklasifikasi dari berbagai akun	(28.996.140.856,49)
Persediaan Expired	(110.284.039,64)
Reklasifikasi dan mutasi antar SKPD berupa Perencanaan dan pengawasan	(6.470.598.855,63)
Koreksi Saldo Awal	(508.950,00)
Koreksi atas kelebihan hutang saja konsultansi yang tercatat dalam hutang pengadaan aset tetap	(1.762.697.760,00)
Koreksi saldo awal persediaan	(295.970.000,00)
Utang Jasa Pelayanan Kesehatan	(10.820.000,00)
reklasifikasi penataan halaman kantor disbudporapar yang dipakai oleh pengadilan negeri	(199.500.000,00)
Hibah komponen lainnya dari MTQ	(41.815.000,00)
JUMLAH	(29.741.106.968,02)

Uraian selisih per transaksi per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

5.4.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp21.857.835.690,44 sedangkan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp38.128.758.917,73. Beban pemeliharaan LO terdiri atas rincian obyek berikut.

Tabel 194 Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	465.424.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.655.763.834,00	5.037.867.717,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.862.674.993,43	2.945.787.405,73
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.339.396.863,01	29.679.679.795,00
Jumlah	21.857.835.690,44	38.128.758.917,73

5.4.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp57.335.285.834,00 sedangkan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp57.253.386.121,00. Beban Perjalanan Dinas terdiri atas rincian obyek berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 195 Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	56.927.835.434,00	55.837.404.621,00
Beban Perjalanan Dinas Tetap	10.400.000,00	39.486.900,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	326.850.400,00	834.499.100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	70.200.000,00	526.420.000,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	15.575.500,00
Jumlah	57.335.285.834,00	57.253.386.121,00

5.4.2.6. Beban Hibah

Beban Hibah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp29.802.652.356,00 sedangkan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13.291.266.799,00. Beban Hibah terdiri atas rincian obyek sebagai berikut.

Tabel 196 Beban Hibah TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	418.642.200,00	471.399.000,00
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	9.330.000.000,00	8.000.000,00
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	12.000.000,00	0,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.140.703.127,00	11.597.500.770,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	780.000.000,00	295.000.000,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	715.000.000,00	400.000.000,00
Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	886.940.000,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	519.367.029,00	519.367.029,00
Jumlah	29.802.652.356,00	13.291.266.799,00

Pengujian Prosedur Analitis Beban Hibah

Hasil Pengujian Prosedur Analitis

Uraian	Audited
<i>Beban Hibah (LO) = Belanja Hibah (LRA) + Utang Belanja Hibah (Neraca) - Utang Belanja Hibah Tahun 20NN-1 (Neraca)</i>	
Beban Hibah Tahun Berjalan (LO)	29.802.652.356,00
Belanja Hibah Tahun Berjalan (LRA)	29.372.010.156,00
Utang Belanja Hibah Tahun Berjalan (Neraca)	-
Utang Belanja Hibah Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Selisih	430.642.200,00
<i>Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)</i>	430.642.200,00

Hasil pengujian prosedur analitis terhadap Beban Hibah menunjukkan terdapat selisih sebesar Rp430.642.200,00 dimana selisih tersebut merupakan selisih akibat adanya hibah kendaraan bermotor ke Kodim Kapuas dan Polres Pulang Pisau oleh SKPD BPBD sebesar Rp418.642.200,00 dan hibah Motor kepada SMK yang tercatat di Pemerintah Prov. Kalimantan tengah sebesar Rp12.000.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.4.2.7. Beban Bantuan Sosial

Tidak terdapat Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 sedangkan Tahun 2022 adalah Bantuan Langsung Tunai untuk pelaku usaha transportasi penyebrangan sungai yang terdampak inflasi kenaikan BBM serta Bantuan Sosial Individu yang diserahkan kepada mahasiswa S2.

Tabel 197 Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Bantuan Sosial	0,00	415.940.000,00
Jumlah	0,00	415.940.000,00

5.4.2.8. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan penambahan Penyisihan Piutang selama tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 198 Beban Penyisihan Piutang TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	22.488.850,00	12.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	282.518.895,82
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	30.832.864,70	6.140.273.405,00
Jumlah	53.321.714,70	6.434.792.300,82

Pengujian Prosedur Analitis Beban Penyisihan Piutang

Hasil Pengujian Prosedur Analitis

Uraian	Audited
<i>Beban Penyisihan Piutang (LO) = Penyisihan Piutang Tahun 20NN-1 (Neraca) - Penyisihan Piutang (Neraca)</i>	
Beban Penyisihan Piutang Tahun Berjalan (LO)	53.321.714,70
Penyisihan Piutang Tahun Berjalan (Neraca)	(8.064.543.050,55)
Penyisihan Piutang Tahun 20NN-1 (Neraca)	(14.002.947.787,25)
Selisih	5.991.726.451,40
<i>Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)</i>	5.991.726.451,40

Dari hasil pengujian analitis terdapat selisih sebesar Rp5.991.726.451,40. Selisih tersebut merupakan selisih yang muncul akibat terealisasinya piutang BPHTB sebesar Rp5.991.626.451,40 dan adanya pengurangan piutang karena pembayaran cicilan sebesar Rp100.000,00 di BPPKAD.

5.4.2.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 199 Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	32.256.750.238,66	27.049.773.841,99
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	85.638.066.864,00	68.237.652.860,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	242.040.879.712,92	263.037.024.928,38
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	226.613.533,31	183.882.366,69
Jumlah	360.162.310.348,89	358.508.333.997,06

5.4.2.9.1. Beban Penyusutan

Beban penyusutan pada tahun anggaran 2023 dan 2022 pada Aset Tetap sebesar Rp359.935.696.815,58 dan Rp358.324.451.630,27. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 200 Beban Penyusutan TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	32.256.750.238,66	27.049.773.841,99
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	85.638.066.864,00	68.237.652.860,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	242.040.879.712,92	263.037.024.928,38
Jumlah	359.935.696.815,58	358.324.451.630,37

Untuk rincian Beban Penyusutan TA 2023 berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

Pengujian Prosedur Analitis Atas Beban Penyusutan

Hasil Pengujian Prosedur Analitis Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	Audited
<i>Beban Peny. Aset Tetap Peralatan (LO) = Akm. Peny. Aset Tetap Peralatan Tahun 20NN-1 (Neraca) - Akm. Peny. Aset Tetap Peralatan (Neraca)</i>	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LO)	32.256.750.238,66
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca)	(327.634.985.309,72)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 20NN-1 (Neraca)	(295.586.079.248,06)
Selisih	207.844.177,00
<i>Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)</i>	
	207.844.177,00

Hasil Pengujian Prosedur Analitis Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	Audited
<i>Beban Peny. Aset Tetap Gedung & Bangunan (LO) = Akm. Peny. Aset Tetap Gedung & Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca) - Akm. Peny. Aset Tetap Gedung & Bangunan (Neraca)</i>	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LO)	85.638.066.864,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca)	(574.817.896.730,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca)	(493.142.708.737,00)
Selisih	3.962.878.871,00
<i>Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)</i>	
	3.962.878.871,00

Hasil Pengujian Prosedur Analitis Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan

Uraian	Audited
<i>Beban Peny. Aset Tetap JII (LO) = Akm. Peny. Aset Tetap JII Tahun 20NN-1 (Neraca) - Akm. Peny. Aset Tetap JII (Neraca)</i>	
Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LO)	242.040.879.712,92
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca)	(2.574.672.474.603,28)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 20NN-1 (Neraca)	(2.196.207.993.933,36)
Selisih	(136.423.600.957,00)
<i>Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)</i>	
	(136.423.600.957,00)



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 201 Data perhitungan Beban dan Akumulasi Penyusutan

Uraian	2022 (Rp)	Koreksi Saldo Awal Penyusutan	Beban Penyusutan	2023 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(295.586.079.248,06)	(207.844.177,01)	32.256.750.238,66	(327.634.985.309,71)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(493.142.708.737,00)	(3.962.878.871,00)	85.638.066.864,00	(574.817.896.730,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(2.196.207.993.933,36)	136.423.600.957,01	242.040.879.712,92	(2.574.672.474.603,29)
Jumlah	(2.984.936.781.918,42)	132.252.877.909,00	359.935.696.815,58	(3.477.125.356.643,00)

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukan bahwa selisih pada Pengujian Prosedur Analitis merupakan Koreksi Saldo Awal Penyusutan

5.4.2.9.2. Beban Amortisasi

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud terdapat pada Tujuh SKPD, dengan total nilai amortisasi adalah sebesar Rp226.613.533,31. Rincian nilai Amortisasi Aset Tak berwujud pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

Tabel 202 Beban Amortisasi TA 2023 dan 2022 per SKPD

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	0,00	3.290.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	4.750.000,00	4.750.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41.763.333,33	41.763.333,34
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.665.700,00	9.665.700,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.316.666,67	8.316.666,67
Sekretariat Daerah	79.090.000,00	49.830.000,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	83.027.833,31	66.266.666,68
Jumlah	226.613.533,31	183.882.366,69

5.4.2.10. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 203 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	638.000.000,00	638.000.000,00
Jumlah	638.000.000,00	638.000.000,00

5.4.2.11. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Beban Transfer Tahun 2023 sebesar Rp730.000.000,00 yang merupakan pembayaran utang bantuan transponder TVRI dan TMII Tahun 2022 sebesar Rp490.000.000,00 dan pembayaran pendanaan bantuan transponder Tahun 2023 sebesar Rp240.000.000,00. Sedangkan Tahun 2022 Beban Transfer Keuangan sebesar Rp3.420.738.400,00 yang merupakan utang bantuan keuangan untuk transponder TVRI dan TMII serta beban premi BPJS Kesehatan.

Tabel 204 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
--------	-----------	-----------



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Transponder TVRI (Hutang tahun 2022)	245.000.000,00	245.000.000,00
Beban Biaya Pemeliharaan TMII (Hutang tahun 2022)	245.000.000,00	240.000.000,00
Beban Transponder TVRI Tahun 2023	240.000.000,00	2.935.738.400,00
Jumlah	730.000.000,00	3.420.738.400,00

5.4.2.12. Beban Transfer Bantuan Keuangan

Pada Tahun 2023 Transfer Bantuan Keuangan telah dilaksanakan sebesar Rp74.470.523.300,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 205 Beban Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	5.021.800.000,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	(485.000.000,00)	0,00
Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	397.230.400,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah ke Desa	69.536.492.900,00	57.720.612.400,00
Jumlah	74.470.523.300,00	57.720.612.400,00

5.4.2.12.1. Beban Bantuan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota

Beban Transfer Bantuan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebesar Rp5.021.800.000,00 yang merupakan Bantuan Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Oleh Pemerintah.

Tabel 206 Beban Transfer Bantuan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	5.021.800.000,00	0,00
Jumlah	5.021.800.000,00	0,00

5.4.2.12.2. Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi

Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Tahun 2023 adalah pembayaran hutang provinsi Kalimantan Tengah berupa TMII dan transponder sebesar Rp485.000.000,00.

Tabel 207 Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	(485.000.000,00)	0,00
Jumlah	(485.000.000,00)	0,00

5.4.2.12.3. Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa

Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa Tahun 2023 merupakan pencatatan hutang Dinas Kesehatan berupa hutang PBI BPJS kesehatan sebesar Rp397.230.400,00.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 208 Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Bantuan Umum Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa	397.230.400,00	0,00
Jumlah	397.230.400,00	0,00

5.4.2.12.4. Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah ke Desa

Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa Tahun 2023 dan 2022 terdiri atas akun berikut ini.

Tabel 209 Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah ke Desa TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Bantuan Keuangan ADD	69.536.492.900,00	57.720.612.400,00
Jumlah	69.536.492.900,00	57.720.612.400,00

Pengujian Prosedur Analitis Beban Transfer

Hasil Pengujian Prosedur Analitis

Uraian	Audited
Beban Transfer (LO) = Belanja Transfer (LRA) + Utang Transfer Tahun 20NN (Neraca) - Utang Transfer Tahun 20NN - 1 (Neraca)	
Beban Transfer Tahun Berjalan (LO)	75.838.523.300,00
Belanja Transfer Tahun Berjalan (LRA)	157.266.734.900,00
Utang Transfer Tahun Berjalan (Neraca)	397.230.400,00
Utang Transfer Tahun 20NN-1 (Neraca)	485.000.000,00
Selisih	(81.340.442.000,00)
Penjelasan Unaudited dan Audited dapat diidentifikasi dari (lihat masing-masing kolom)	
	(81.340.442.000,00)

Hasil pengujian analisis menunjukkan adanya selisih sebesar Rp81.340.442.000,00 yang merupakan Transfer Dana Desa yang tidak tercatat di LO.

5.4.3. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi merupakan selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 210 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan	1.292.320.889.335,22	1.293.738.743.739,96
Beban	(1.222.853.376.202,90)	(1.069.134.858.171,82)
Jumlah	69.467.513.132,32	224.603.885.568,14

5.4.4. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 defisit sebesar Rp2.370.308.682,00, sedangkan pada TA 2022 bernilai Rp2.834.980.893,12. Surplus dari Kegiatan Non Operasional ini berasal dari pengakuan pendapatan lelang aset sebesar Rp718.058.223,00 sedangkan defisit dari kegiatan Non Operasional adalah pengakuan kerugian PDAM karena metode ekuitas sebesar Rp2.675.787.300,00 dan juga adanya



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

pencatatan atas obat yang *expired date* pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dengan nilai total sebesar Rp877.251.816,12.

5.4.5. Pos Luar Biasa

Berikut rincian Pos Luar Biasa LO.

Tabel 211 Rincian Pos Luar Biasa TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022
Pendapatan Luar Biasa - LO	5.991.726.451,40	0,00
Beban Luar Biasa	1.531.452.297,00	657.172.500,00
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	4.460.274.154,40	(657.172.500,00)

5.4.5.1. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.991.726.451,40 sedangkan TA 2022 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 212 Pendapatan Luar Biasa TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik/Turun	
			%	Rp
Pendapatan Pos Luar Biasa-LO	5.991.726.451,40	0,00	0,00	5.991.726.451,40
Jumlah	5.991.726.451,40	0,00	0,00	5.991.726.451,40

Pendapatan Pos Luar Biasa – LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.991.726.451,40 merupakan pendapatan luar biasa akibat dari dihapusnya penyisihan piutang BPHTB karena piutangnya telah terbayar.

5.4.5.2. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa TA 2023 merupakan yang merupakan Beban yang berasal dari belanja tidak terduga akibat adanya bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang melanda di beberapa wilayah Kabupaten Pulang Pisau. dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 213 Beban Luar Biasa TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Tak Terduga	1.531.452.297,00	657.172.500,00
Jumlah	(1.531.452.297,00)	657.172.500,00

5.4.6. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit – LO merupakan selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp71.557.478.604,72 dan Defisit per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp221.111.732.175,02.

Tabel 214 Surplus/Defisit - LO TA 2023 dan 2022



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	2023	2022	Naik/Turun	
			%	Rp
Surplus Defisit dari Operasi	69.467.513.132,32	224.603.885.568,14	(69,07)	(155.136.372.435,82)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(2.370.308.682,00)	(2.834.980.893,12)	(16,39)	464.672.211,12
Surplus Defisit dari Pos Luar Biasa	4.460.274.154,40	(657.172.500,00)	778,71	5.117.446.654,40
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	71.557.478.604,72	221.111.732.175,02	(67,64)	(149.554.253.570,30)

5.5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi keluar dan masuknya Kas, baik dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pembiayaan dan Non Anggaran serta Saldo Kas pada awal maupun akhir periode anggaran.

5.5.1. Arus Kas Aktivitas Operasi

Tabel 215 Arus Kas Operasi Tahun 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik/Turun	
			%	Rp
Arus Kas Aktivitas Operasi	329.980.825.655,98	254.358.311.451,00	29,73	75.622.514.204,98
Jumlah	329.980.825.655,98	254.358.311.451,00	29,73	75.622.514.204,98

Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas dari aktivitas operasi terdiri atas Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, dengan penjelasan sebagai berikut.

5.5.1.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Tabel 216 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	1.247.219.961.309,25	1.072.307.814.551,18
Jumlah	1.247.219.961.309,25	1.072.307.814.551,18

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.247.219.961.309,25 dan Rp1.072.307.814.551,18, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 217 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	91.320.674.278,00	85.181.880.484,10



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	3.905.676.024,00	2.798.277.761,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	27.049.142,65	7.017.720.761,00
Lain-lain PAD yang Sah	37.515.518.584,60	32.597.267.410,00
Dana Bagi Hasil Pajak	80.679.289.079,00	24.143.554.050,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	155.973.142.250,00	68.602.516.927,00
Dana Alokasi Umum	533.749.099.842,00	515.284.162.032,00
Dana Alokasi Khusus	173.336.579.707,00	183.238.102.726,00
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	112.081.615.000,00	106.317.876.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	58.631.317.402,00	47.126.456.400,08
Jumlah Arus Kas Masuk	1.247.219.961.309,25	1.072.307.814.551,18

5.5.1.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Tabel 218 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	917.239.135.653,27	817.949.503.100,18
Jumlah	917.239.135.653,27	817.949.503.100,18

Saldo arus kas keluar dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp917.239.135.653,27 dan Rp817.949.503.100,18, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 219 Rincian Saldo Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Belanja Pegawai	350.406.413.663,34	329.683.273.923,00
Belanja Barang dan Jasa	378.662.524.636,93	333.194.564.335,18
Belanja Hibah	29.372.010.156,00	12.811.867.799,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	415.940.000,00
Belanja Tak Terduga	1.531.452.297,00	790.310.243,00
Transfer Bagi Hasil Pajak	638.000.000,00	638.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya	5.751.800.000,00	3.180.738.400,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	150.876.934.900,00	137.234.808.400,00
Transfer Bantuan Keuangan lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	917.239.135.653,27	817.949.503.100,18

5.5.1.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Tabel 220 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	1.247.219.961.309,25	1.072.307.814.551,18
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	917.239.135.653,27	817.949.503.100,18
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	329.980.825.655,98	254.358.311.451,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp329.980.825.655,98 dan Rp254.358.311.451,00, naik sebesar Rp75.622.514.204,98.

5.5.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Tabel 221 Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Arus Kas Aktivitas Investasi	(381.894.517.460,25)	(221.526.615.275,64)	72,39	(160.367.902.184,61)
Jumlah	(381.894.517.460,25)	(221.526.615.275,64)	72,39	(160.367.902.184,61)

5.5.2.1. Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi

Tabel 222 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	0,00	718.058.223,00
Jumlah	0,00	718.058.223,00

Arus Kas Masuk merupakan arus kas masuk dari aktivitas investasi non keuangan selama TA 2023. Pada TA 2023 tidak ada Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi sedangkan untuk TA 2022 terdapat sebesar Rp718.058.223,00 yang merupakan hasil penjualan kendaraan melalui mekanisme lelang terbuka.

5.5.2.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Tabel 223 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	381.894.517.460,25	222.244.673.498,64
Jumlah	381.894.517.460,25	222.244.673.498,64

Arus Kas Keluar merupakan arus kas keluar dari aktivitas investasi atau Belanja Daerah yang dapat dikapitalisasi ke aset daerah, dalam hal ini belanja modal pemerintah daerah. Nilai arus investasi keluar selama TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp381.894.517.460,25 dan Rp222.244.673.498,64, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 224 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Belanja Tanah	199.500.000,00	646.810.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	33.351.898.507,56	28.676.649.006,19
Belanja Gedung dan Bangunan	108.424.624.137,36	73.112.943.643,72
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	234.881.455.815,33	117.448.436.859,73



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Belanja Aset Tetap Lainnya	37.039.000,00	359.833.989,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	381.894.517.460,25	222.244.673.498,64

5.5.2.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Tabel 225 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	0,00	718.058.223,00
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	381.894.517.460,25	222.244.673.498,64
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(381.894.517.460,25)	(221.526.615.275,64)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp381.894.517.460,25) dan (Rp221.526.615.275,64), naik sebesar (Rp160.367.902.184,61).

5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas Aktivitas Pembiayaan merupakan arus kas aktivitas pembiayaan daerah pengeluaran pembiayaan tersebut dikeluarkan untuk keperluan investasi daerah baik di perusahaan daerah ataupun yang lain. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan merupakan arus kas masuk yang berasal dari penerimaan kembali piutang daerah. Tidak terdapat realisasi atas arus kas tersebut.

5.5.3.1. Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Pembiayaan merupakan arus kas masuk atau keluar karena adanya pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pada Arus Kas Keluar karena adanya transaksi terkait dengan pembayaran pokok utang, penanaman modal pemerintah daerah, pemberian pinjaman jangka panjang dan sejenisnya. Pada TA 2023 dan TA 2022 untuk Transaksi ini, tidak terdapat realisasi Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Pembiayaan.

5.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran

Tabel 226 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	(24.563.946,00)	67.742.721,00	(136,26)	(92.306.667,00)
Jumlah	(24.563.946,00)	67.742.721,00	(136,26)	(92.306.667,00)

Arus Kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi APBD Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran terdiri atas Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran, Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.5.4.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran

Tabel 227 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran	102.075.378.009,00	76.978.656.103,00
Jumlah	102.075.378.009,00	76.978.656.103,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp102.075.378.009,00 dan Rp76.978.656.103,00, naik sebesar Rp25.096.721.906,00. Pada TA 2023 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran merupakan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp102.005.027.108,00 dan Kas Lainnya sebesar Rp70.350.901,00.

5.5.4.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran

Tabel 228 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran	102.099.941.955,00	76.910.913.382,00
Jumlah	102.099.941.955,00	76.910.913.382,00

Arus kas keluar dari aktivitas non anggaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp102.099.941.955,00 dan Rp76.910.913.382,00 naik sebesar Rp25.189.028.573,00. Pada TA 2023 Arus kas keluar dari aktivitas non anggaran merupakan pengeluaran PFK sebesar Rp102.005.027.108,00 dan Kas Lainnya sebesar Rp94.914.847,00.

5.5.4.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

Tabel 229 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran	102.075.378.009,00	76.978.656.103,00
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran	102.099.941.955,00	76.910.913.382,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(24.563.946,00)	67.742.721,00

Arus kas bersih dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp24.563.946,00) dan Rp67.742.721,00

Penerimaan dan pengeluaran PFK yang terdapat pada arus kas aktivitas non anggaran merupakan pajak pusat yang berasal dari transaksi belanja baik LS ataupun GU berikut ini.

Tabel 230 PFK (LS) TA 2023

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	IWP(1%) Iuran Wajib Pegawai	1.696.921.172,00	1.696.921.172,00
2	IWP (8%) Iuran Wajib Pegawai	11.809.826.495,00	11.809.826.495,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
4	BPJS Kesehatan PNS	7.653.003.060,00	7.653.003.060,00
5	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	339.246.672,00	339.246.672,00
6	Jaminan Kematian (JKM)	1.017.740.169,00	1.017.740.169,00
8	PPH Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	13.464.346.610,00	13.464.346.610,00
9	PPH Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	963.414.774,00	963.414.774,00
10	PPH Pasal 23 Jasa	166.537.581,00	166.537.581,00
12	PPH Pasal 4 (2) Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan	661.710,00	661.710,00
13	PPH Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	2.957.815,00	2.957.815,00
14	PPH Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	8.707.345.220,00	8.707.345.220,00
15	PPH Pasal 26 Jasa	2.151.355,00	2.151.355,00
16	PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	54.417.046.431,00	54.417.046.431,00
17	IWP (3,25%) Iuran Wajib Pegawai	188.521.126,00	188.521.126,00
TOTAL		100.429.720.190,00	100.429.720.190,00

Tabel 231 PFK (GU) TA 2023

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	PPH 21	65.750.000,00	65.750.000,00
2	PPH 22	199.939.739,00	199.939.739,00
3	PPH 23	254.067.837,00	254.067.837,00
4	PPN	1.055.549.342,00	1.055.549.342,00
TOTAL		1.575.306.918,00	1.575.306.918,00

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melakukan rekonsiliasi atas PFK tersebut setiap semester dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangka Raya, akan tetapi sampai dengan saat ini rekonsiliasi yang dilakukan belum sesuai dengan nilai yang seharusnya. rincian akan nilai rekonsiliasi dan nilai PFK yang seharusnya tersaji berikut ini:

Tabel 232 Rincian Rekonsiliasi atas PFK TA 2023

Uraian	PFK yang telah direkonsiliasi	PFK LS dan GU	PFK yang belum di rekonsiliasi
PPH 21	13.003.243.047,00	13.530.096.610,00	526.853.563,00
PPH 22	967.581.222,00	1.163.354.513,00	195.773.291,00
PPH 23	383.365.179,00	420.605.418,00	37.240.239,00
PPH4(2)	4.939.291.466,00	8.710.964.745,00	3.771.673.279,00
PPH 26	1.524.350,00	2.151.355,00	627.005,00
PPN	38.504.963.816,00	55.472.595.773,00	16.967.258.962,00
Jumlah	57.799.969.080,00	79.299.768.414,00	21.499.426.339,00

5.5.5. Kenaikan/(Penurunan) Kas

Kenaikan /penurunan bersih kas selama TA 2023 diperoleh dari penjumlahan dari seluruh aktivitas bersih dalam perhitungan laporan arus kas, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 233 Kenaikan/(Penurunan) Kas TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
--------	-----------	-----------



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	329.980.825.655,98	254.358.311.451,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(381.894.517.460,25)	(221.526.615.275,64)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(24.563.946,00)	67.742.721,00
Kenaikan/Penurunan Kas	(51.938.255.750,27)	32.899.438.896,36
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas Dibendahara Pengeluaran	186.137.740.178,55	153.238.301.282,19
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas Dibendahara Pengeluaran	134.199.484.428,28	186.137.740.178,55

Saldo akhir kas di BUD dan kas di bendahara pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 234 Rincian Saldo Akhir Kas TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Saldo Akhir Kas di BUD	100.399.582.428,50	150.735.724.490,07
Kas di Bendahara Pengeluaran	46.675.091,00	20.000.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi	60.211.155,32	2.675.062,65
Kas dari Dana BOS	938.303,00	95.752.927,37
Kas BLUD	32.194.425.645,46	35.208.672.851,46
Kas dana BOK	1.411.437.097,00	0,00
Kas Dana Prolanis	15.863.807,00	0,00
Kas Lainnya	70.350.901,00	74.914.847,00
Jumlah	134.199.484.428,28	186.137.740.178,55

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tabel 235 Laporan Perubahan Ekuitas TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Ekuitas Akhir	2.258.451.765.086,96	2.311.445.762.335,56	(2,29)	(52.993.997.248,60)
Jumlah	2.258.451.765.086,96	2.311.445.762.335,56	(2,29)	(52.993.997.248,60)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan pos-pos sebagai berikut, ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang merupakan dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, dan Ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten Pulang Pisau diuraikan sebagai berikut.

5.6.1. Ekuitas Awal

Tabel 236 Ekuitas Awal TA 2023



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Saldo Awal Ekuitas	2.311.445.762.335,56	2.121.993.677.698,29	8,93	189.452.084.637,27
Jumlah	2.311.445.762.335,56	2.121.993.677.698,29	8,93	189.452.084.637,27

Ekuitas Awal TA 2023 merupakan saldo ekuitas pada Neraca Audited per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.311.445.762.335,56 yang terbagi pada SKPD Kabupaten Pulang Pisau dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 237 Rincian Ekuitas Awal TA 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	212.336.586.046,37	220.435.516.765,88
Dinas Kesehatan	83.840.105.866,34	82.283.837.625,83
Rumah Sakit Umum Daerah	123.444.368.906,17	97.511.396.771,92
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.323.897.947.381,31	1.116.979.071.710,24
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12.570.343.368,20	12.891.290.093,20
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.693.959.546,00	1.519.212.984,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.245.488.130,00	1.159.291.728,00
Dinas Sosial	4.886.928.920,99	5.286.112.675,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.689.847.683,00	5.937.130.244,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.741.499.940,33	9.891.221.501,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.763.510.672,00	5.499.606.337,00
Dinas Ketahanan Pangan	3.968.660.535,00	4.461.017.544,00
Dinas Lingkungan Hidup	7.517.233.334,00	5.229.001.892,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.342.805.677,20	5.174.536.299,20
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.899.398.006,00	4.177.140.301,00
Dinas Perhubungan	7.058.278.645,00	7.481.743.451,00
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	988.523.078,00	1.012.370.547,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.472.966.313,55	5.086.417.786,44
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14.928.315.698,00	14.816.290.314,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.208.061.064,00	5.691.007.605,00
Dinas Perikanan	12.891.188.071,21	12.894.937.975,26
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.038.472.860,00	4.275.174.591,00
Dinas Pertanian	21.480.792.274,70	32.015.398.308,70
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	24.059.309.875,49	25.347.644.912,77
Sekretariat Daerah	42.062.393.430,90	42.490.185.436,46
Sekretariat DPRD	12.078.103.836,00	13.008.173.974,00
Kecamatan Kahayan Hilir	2.685.352.843,00	2.705.002.027,00
Kecamatan Jabiren Raya	654.201.944,00	736.219.028,00
Kecamatan Maliku	233.203.093,00	234.477.067,00
Kecamatan Pandih Batu	1.477.363.233,00	1.330.023.780,00
Kecamatan Kahayan Kuala	1.944.174.483,00	1.623.562.721,00
Kecamatan Sebangau Kuala	574.822.351,00	693.112.709,00
Kecamatan Kahayan Tengah	1.259.618.365,00	1.335.044.200,00
Kecamatan Banama Tingang	1.390.842.986,00	1.478.427.947,00
Inspektorat	3.419.031.279,00	2.233.682.690,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	9.761.465.995,00	10.762.251.744,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	82.915.058.202,89	195.426.054.689,86
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	249.736.816.223,91	158.221.084.390,53
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.288.722.177,00	2.660.005.331,00
Jumlah	2.311.445.762.335,56	2.121.993.677.698,29

5.6.2. Surplus/(Defisit) - LO

Tabel 238 Surplus/(Defisit) - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Surplus/Defisit LO	71.557.478.604,72	221.111.732.175,02	(67,64)	(149.554.253.570,30)
Jumlah	71.557.478.604,72	221.111.732.175,02	(67,64)	(149.554.253.570,30)

Rincian Surplus/(Defisit) – LO TA 2023 sebesar Rp71.557.478.604,72 merupakan Surplus/(Defisit)-LO dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 239 Rincian Surplus/(Defisit) - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Surplus/defisit dari operasi	75.459.239.583,72	224.603.885.568,14
Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	(2.370.308.682,00)	(2.834.980.893,12)
Surplus/defisit dari pos luar biasa	(1.531.452.297,00)	(657.172.500,00)
Jumlah	71.557.478.604,72	221.111.732.175,02

Rincian surplus/(defisit) LO pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan mendasar Tahun 2023 sebesar (Rp124.551.475.853,32) dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 240 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2023 dan 2022

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Koreksi Saldo awal Persediaan	24.859.568,45	(540.500,00)
Penghapusan Aset Tetap	(39.431.500,00)	0,00
Penyesuaian Aset Tetap	(9.900.000,00)	0,00
Koreksi dan penyesuaian Piutang	5.537.467.014,00	(31.266.396.632,00)
koreksi dan Mutasi persediaan	0,00	(2.562.400,00)
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(131.880.580.532,00)	(16.170.168,00)
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
Mutasi , Koreksi dan penyesuaian Aset Tetap	1.872.715.096,23	1.902.007,26
Penyesuaian KAS	0,00	(681.931,008)
Hibah	(64.060.500,00)	0,00
Penyesuaian Kewajiban Jangka Pendek	7.512.336,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Penyesuaian Pendapatan	(57.336,00)	0,00
Koreksi Aset yang masuk kategori ekstrakomtabel	0,00	(375.197.914,00)
Jumlah	(124.551.475.853,32)	(31.659.647.537,75)

1. Koreksi saldo awal Aset Persediaan

Koreksi Saldo Awal Persediaan sebesar Rp24.859.568,45 terjadi pada RSUD berupa koreksi atas saldo awal persediaan obat, dimana terdapat koreksi audited atas obat expired yang diasumsikan masih tercatat, ternyata sudah tidak ada dalam pencatatan senilai Rp320.829.568,45 dan Koreksi saldo persediaan berupa kontrak Penataan Halaman Masjid Agung yang telah dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar (Rp295.970.000,00) yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. Penghapusan Aset Tetap

Penghapusan aset tetap terdapat di Badan Kesbangpol berupa penghapusan aset peralatan mesin R2 karena ada dobel catat dengan Setda senilai Rp14.650.000,00 dan Penghapusan aset sepeda motor sesuai SK No. 07 Tahun 2023 Tanggal 29 Mei 2023 senilai Rp24.781.500,00

3. Penyesuaian Aset Tetap

Penyesuaian Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp9.900.000,00 terdapat di Rumah Sakit Umum Daerah dikarenakan adanya koreksi aset tetap gedung dan bangunan karena adanya perubahan parameter .

4. Koreksi dan Penyesuaian Piutang

Koreksi dan Penyesuaian Piutang TA 2023 sebesar Rp5.537.467.014,00 yang merupakan penyesuaian Piutang yang terdapat pada BPPKAD karena adanya koreksi piutang BPHTB PT KLS berdasarkan SK Nomor 98 tahun 2023.

5. Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2023 sebesar (131.880.580.532,00) akibat adanya koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 1 Januari 2022 yang disebabkan karena adanya mutasi aset tetap antar SKPD dan atribusi Aset tetap yang terdapat pada SKPD berikut ini.

Tabel 241 Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan	228.430.658,00
Dinas Kesehatan	508.502.190,00
Rumah Sakit Umum Daerah	4.285.142,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(132.956.095.335,00)



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

SKPD	Jumlah (Rp)
Satuan Polisi Pamong Praja	18.720.000,00
Dinas Sosial	0,01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.967.668,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	617.342,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(12.741.042,00)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	97.223,00
Dinas Pertanian	31.047.960,00
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	85.743.625,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	149.412.536,99
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	51.431.500,00
Jumlah	(131.880.580.532,00)

6. Mutasi , Koreksi dan penyesuaian Aset Tetap

Mutasi, Koreksi dan Penyesuaian Aset Tetap sebesar Rp1.872.715.096,23 terdapat pada SKPD sebagai berikut.

Tabel 242 Daftar Mutasi, Koreksi dan Penyesuaian Aset Tetap TA 2023

SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan	27.674.529.641,60
Dinas Kesehatan	34.340.300,00
Rumah Sakit Umum Daerah	497.091.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(20.132.909.700,74)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(9.748.638.240,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	156.105.668,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.840.000,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	412.072.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22.880.000,00
Dinas Pertanian	58.345.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	686.440.000,00
Sekretariat Daerah	(3.382.210.472,63)
Sekretariat DPRD	548.396.000,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(609.697.000,00)
Kecamatan Kahayan Hilir	199.524.900,00
Kecamatan Pandih Batu	4.941.944.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

SKPD	Jumlah (Rp)
Kecamatan Banama Tingang	498.662.000,00
Jumlah	1.872.715.096,23

7. Hibah

Hibah sebesar Rp64.060.500,00 terdapat di Dinas Pendidikan berupa pengurangan nilai KIB B dinas Pendidikan karena barang diserahkan ke TK Swasta

8. Penyesuaian Kewajiban Jangka Pendek

Penyesuaian Kewajiban Jangka Pendek terjadi karena kesalahan pencatatan atas Kewajiban Jangka Pendek tahun anggaran sebelumnya yang terjadi di Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp 1.185.000,00 yaitu koreksi atas utang belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, jasa giro di Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp24.640,00, Jasa Giro di DPMPTSP senilai Rp32.696,00 yang terjadi akibat adanya kesalahan dari pihak bank yang tidak melakukan *autodebet* jasa giro pada kedua SKPD tersebut, sehingga pada saat akhir tahun anggaran SKPD akan melakukan penihilan transaksi ikut ditarik secara tunai dan tersimpan di kas bendahara dan juga Jasa Pelayanan Kesehatan Tahun 2021 sebesar Rp6.270.000,00 yang belum di bayar yang terdapat di SKPD RSUD.

9. Penyesuaian Pendapatan

Penyesuaian Pendapatan terdapat di BPPKAD senilai Rp57.336,00 dikarenakan adanya pendapatan jastir yang masih di DPMPTSP dan Ketahanan Pangan.

5.6.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir TA 2023 adalah sebesar Rp2.258.451.765.086,96 yang terdapat pada SKPD berikut ini.

Tabel 243 Rincian Ekuitas Akhir TA 2023 dan 2022

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	227.821.491.952,50	212.336.586.046,37
Dinas Kesehatan	84.925.066.453,21	83.840.105.866,34
Rumah Sakit Umum Daerah	180.275.392.674,74	123.444.368.906,17
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.130.270.069.409,00	1.323.897.947.381,31
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	29.612.023.743,75	12.570.343.368,20
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.632.496.187,00	1.693.959.546,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.285.876.449,00	1.245.488.130,00
Dinas Sosial	4.818.172.611,00	4.886.928.920,99
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.268.343.906,00	5.689.847.683,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.851.227.486,66	8.741.499.940,33
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.123.922.761,98	5.763.510.672,00
Dinas Ketahanan Pangan	4.073.088.057,00	3.968.660.535,00
Dinas Lingkungan Hidup	7.184.577.097,00	7.517.233.334,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.053.031.207,50	4.342.805.677,20
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.476.459.944,89	3.899.398.006,00
Dinas Perhubungan	29.043.874.360,00	7.058.278.645,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	823.028.920,00	988.523.078,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.580.733.417,49	4.472.966.313,55
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	15.076.033.278,00	14.928.315.698,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.184.027.002,00	5.208.061.064,00
Dinas Perikanan	11.945.891.629,80	12.891.188.071,21
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.991.092.674,00	4.038.472.860,00
Dinas Pertanian	23.835.205.703,70	21.480.792.274,70
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	22.676.904.981,49	24.059.309.875,49
Sekretariat Daerah	37.247.486.496,90	42.062.393.430,90
Sekretariat DPRD	11.599.817.520,44	12.078.103.836,00
Kecamatan Kahayan Hilir	2.473.987.558,00	2.685.352.843,00
Kecamatan Jabiren Raya	575.327.996,00	654.201.944,00
Kecamatan Maluku	223.767.150,00	233.203.093,00
Kecamatan Pandih Batu	6.018.174.114,00	1.477.363.233,00
Kecamatan Kahayan Kuala	1.722.044.222,00	1.944.174.483,00
Kecamatan Sebangau Kuala	481.649.501,00	574.822.351,00
Kecamatan Kahayan Tengah	1.156.319.073,00	1.259.618.365,00
Kecamatan Banama Tingang	1.765.253.605,00	1.390.842.986,00
Inspektorat	4.349.736.454,85	3.419.031.279,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8.546.866.493,00	9.761.465.995,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27.560.905.734,09	82.915.058.202,89
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	335.189.784.842,97	249.736.816.223,91
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.712.612.418,00	2.288.722.177,00
Jumlah	2.258.451.765.086,96	2.311.445.762.335,56



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau terdiri atas 38 Organisasi Perangkat Daerah yaitu.

Tabel 244 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

No	Kode	Uraian
	5.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	5.1.01	PENDIDIKAN
1	5.1.01.1-01.0-00.0-00.01	Dinas Pendidikan
	5.1.02	KESEHATAN
2	5.1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan
3	5.1.02.1-02.0-00.0-00.02	Rumah Sakit Umum Daerah
	5.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	5.1.03.1-03.0-00.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	5.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	5.1.04.1-04.2-10.0-00.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	5.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
6	5.1.05.1-05.0-00.0-00.01	Satuan Polisi Pamong Praja
	5.1.06	SOSIAL
7	5.1.06.1-06.0-00.0-00.01	Dinas Sosial
8	5.1.06.1-06.1-05.0-00.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	5.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	5.2.07	TENAGA KERJA
9	5.2.07.2-07.3-32.0-00.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	5.2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10	5.2.08.2-08.2-14.0-00.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	5.2.09	PANGAN
11	5.2.09.2-09.0-00.0-00.01	Dinas Ketahanan Pangan
	5.2.11	LINGKUNGAN HIDUP
12	5.2.11.2-11.3-28.0-00.01	Dinas Lingkungan Hidup
	5.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	5.2.12.2-12.0-00.0-00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	5.2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
14	5.2.13.2-13.0-00.0-00.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	5.2.15	PERHUBUNGAN
15	5.2.15.2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan
	5.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA
16	5.2.16.2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Kode	Uraian
	5.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
17	5.2.17.2-17.3-30.3-31.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	5.2.18	PENANAMAN MODAL
18	5.2.18.2-18.0-00.0-00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	5.2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
19	5.2.19.2-19.0-00.0-00.01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	5.2.22	KEBUDAYAAN
20	5.2.22.2-22.3-26.0-00.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	5.2.23	PERPUSTAKAAN
21	5.2.23.2-23.2-24.0-00.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	5.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	5.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN
22	5.3.25.3-25.0-00.0-00.01	Dinas Perikanan
	5.3.27	PERTANIAN
23	5.3.27.3-27.0-00.0-00.01	Dinas Pertanian
	5.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.4.01	SEKRETARIAT DAERAH
24	5.4.01.4-01.3-29.5-06.01	Sekretariat Daerah
	5.4.02	SEKRETARIAT DPRD
25	5.4.02.4-02.0-00.0-00.01	Sekretariat DPRD
	5.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.5.01	PERENCANAAN
26	5.5.01.5-01.5-05.0-00.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.5.02	KEUANGAN
27	5.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.5.03	KEPEGAWAIAN
28	5.5.03.5-03.5-04.0-00.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
	5.6.01	INSPEKTORAT
29	5.6.01.6-01.0-00.0-00.01	Inspektorat
	5.7	UNSUR KEWILAYAHAN
	5.7.01	KECAMATAN
30	5.7.01.7-01.0-00.0-00.01	Kecamatan Kahayan Hilir
31	5.7.01.7-01.0-00.0-00.02	Kecamatan Jabiren Raya
32	5.7.01.7-01.0-00.0-00.03	Kecamatan Maliku
33	5.7.01.7-01.0-00.0-00.04	Kecamatan Pandih Batu
34	5.7.01.7-01.0-00.0-00.05	Kecamatan Kahayan Kuala
35	5.7.01.7-01.0-00.0-00.06	Kecamatan Sebangau Kuala
36	5.7.01.7-01.0-00.0-00.07	Kecamatan Kahayan Tengah
37	5.7.01.7-01.0-00.0-00.08	Kecamatan Banama Tingang
	5.8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Kode	Uraian
	5.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
38	5.8.01.8-01.1-05.0-00.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

6.2. Program Jaminan Kesehatan Nasional

Dalam rangka percepatan rekrutmen peserta menuju *Universal Health Coverage* (UHC) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mendaftarkan 9.972 peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan Berita Acara antara Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya Nomor 4784/BA/VIII-06/1221 dan 1145/440/Kes-PP/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021.

Program Jaminan Kesehatan Nasional tahun untuk masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 ditetapkan dengan SK Bupati Pulang Pisau Nomor 44 Tahun 2023. Belanja yang sudah dibayarkan ke BPJS Kesehatan dengan layanan pada kelas III adalah sebesar Rp5.021.800.000,00 pada tahun 2023.

6.3. Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak (*taxing power*). Setidaknya ada empat perubahan fundamental yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pertama, mengubah penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari *open-list system* menjadi *closed-list system*. Kedua, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah melalui perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah, penambahan jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah, dan pemberian diskresi kepada daerah untuk menetapkan tarif sesuai batas tarif maksimum dan minimum yang ditentukan. Ketiga, memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/ kota dan kebijakan earmarking untuk jenis pajak daerah tertentu. Keempat, meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif. Hal yang paling menonjol dalam UU 28 Tahun 2009 adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah. Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh Pemda. Sedangkan, PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat.

Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pulang Pisau diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Pulang Pisau merupakan pelimpahan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor: BA-33/WPJ.29/KP.03/2014. Pada tahun 2023 terdapat 52.641 objek pajak yang terdaftar pada aplikasi SISMIOP Kabupaten Pulang Pisau.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB VII

PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Per 31 Desember 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan (LK) dan CaLK Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan CaLK mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasian. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk Pengakuan Aktiva (Aset), Utang (Kewajiban), dan Ekuitas Dana;
3. CaLK ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LK dan CaLK Tahun Anggaran (TA) 2023. Adapun akun-akun neraca yang dijelaskan hanya berkaitan pada pos-pos yang memiliki nilai transaksi terkait dengan APBD TA 2023;
4. Diharapkan dengan diterbitkannya LK dan CaLK, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan daerah yang tergambar dalam Laporan Keuangan, maupun pihak internal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sendiri dalam pengambilan keputusan;
5. Atas jumlah Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2023, dalam penyusunannya sampai kepada penetapan jumlahnya tidak dilakukan penilaian atas Aset Tetap oleh Lembaga Penilaian Independen. Jumlah yang tercantum dalam Neraca adalah kompilasi dari saldo awal Aset Tetap per 1 Januari 2023 ditambah/dikurangi mutasi Belanja Modal dalam TA 2023 dan beberapa mutasi Aset Tetap;
6. Dalam rangka memberikan dasar hukum atas penetapan jumlah aset tetap Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, pada kesempatan ini kami usulkan untuk dilakukan penilaian atas aset tetap oleh Lembaga Penilai yang Independen dengan tetap mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemampuan daerah.

Demikian LK dan CaLK Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2023 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PJ. BUPATI PULANG PISAU

NUNU ANDRIANI

LAMPIRAN